

Laporan Akhir

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN TANAH ASET DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN



**KERJASAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah di mana pun –tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Pamekasan— umumnya memiliki sejumlah asset daerah yang perlu dilindungi dan dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Banyak bukti dan pengalaman di sejumlah daerah memperlihatkan, keberadaan aset daerah bukan tidak mungkin menjadi kontra-produktif, dan bahkan hilang ketika asset tersebut tidak dikelola dengan baik. Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan asset daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pemanfaatan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan lain-lain yang semuanya adalah serangkaian proses untuk memastikan agar asset daerah tidak sia-sia keberadaannya.

Dari berbagai asset yang dimiliki Kabupaten Pamekasan, salah satu asset yang penting adalah tanah atau lahan. Tanah adalah salah satu kekayaan atau asset daerah yang dimiliki Kabupaten Pamekasan, yang keberadaannya tersebar di berbagai wilayah. Tanah atau lahan yang dimiliki Kabupaten Pamekasan, sebagian merupakan lahan produktif yang disewakan kepada pihak lain, tetapi sebagian berupa lahan terlantar yang belum dikelola dengan baik.

Kegiatan sebagaimana dilaporkan bermaksud memetakan asset lahan yang dimiliki Kabupaten Pamekasan, dan sekaligus merumuskan program yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan sumber pemasukan bagi PAD Kabupaten Pamekasan yang berasal dari pengelolaan asset daerah. Kegiatan ini penting dilakukan, karena disadari kekayaan atau keberadaan asset daerah jika tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak kontra-produktif.

Selanjutnya Kegiatan Kajian Pengelolaan Dan Perlindungan Tanah Aset Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan ini dapat diselenggarakan dan terselesaikan dengan tepat waktu, berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini.
2. Ketua Bappeda Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan ini.
3. Kepala dan staf di seluruh dinas terkait dan *stakeholders* yang telah bersedia memberikan masukan dan informasi untuk melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan serta membantu kelancaran proses administrasi dan pengumpulan data yang diperlukan dalam kegiatan ini.
4. Seluruh informan yang telah dengan sukarela memberikan keterangan dan data yang mendukung dan memperkaya hasil kajian serta membantu proses pengumpulan data kegiatan ini.

Kami berharap hasil kajian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan asset

Surabaya,

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Permasalahan	2
3. Tujuan	2
4. Metode dan Prosedur Kegiatan	3
BAB 2 ASET DAERAH DAN PEMANFAATANNYA: KERANGKA ANALISIS	4
1. Problema Pengelolaan Aset Daerah	5
2. Prinsip Pengelolaan Aset Daerah	7
BAB 3 GAMBARAN UMUM KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN PAMEKASAN	9
1. Kondisi Geografis Kabupaten Pamekasan	10
2. Kondisi Demografi	16
3. Kondisi Pendidikan	23
4. Kondisi Fasilitas Kesehatan	25
5. Kondisi Ekonomi	27
BAB 4 INVENTARISASI ASET DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN	31
1. Aset Badan Keuangan Daerah	33
2. Aset yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37
3. Aset yang Dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	45
4. Aset Barang dan Tanah yang Dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	48
5. Aset yang Dimiliki Dinas Pendidikan	53
6. Aset yang Dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika	107
7. Aset yang Dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga	109
8. Aset yang Dimiliki Kecamatan Pamekasan	114
9. Aset yang Dimiliki Kecamatan Pademawu	140
10. Aset yang Dimiliki Kecamatan Waru	150
11. Aset yang Dimiliki Sekretariat Daerah	153
12. Kendala dalam Upaya Perlindungan Aset Daerah (FGD)	159
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	164
1. Kesimpulan	165
2. Saran	173
Daftar Pustaka	176

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Kondisi Umum Geografis dan Iklim Kabupaten Pamekasan Tahun 2018	11
Tabel III.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kemiringan Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 (Ha)	13
Tabel III.3	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jenis Kualitas Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 (Ha)	15
Tabel III.4	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan, 2010, 2017 dan 2018	16
Tabel III.5	Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018	17
Tabel III.6	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018	18
Tabel III.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	19
Tabel III.8	Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2018	21
Tabel III.9	Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018	22
Tabel III.10	Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Program Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018	22
Tabel III.11	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Bawah Kementrian Pendidikan Menurut Kecamatan, 2017-2018	24
Tabel III.12	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Bawah Kementrian Pendidikan dan Agama Menurut Kecamatan, 2017-2018	24
Tabel III.13	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pamekasan 2017-2018	25
Tabel III.14	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan 2018	26
Tabel III.15	Jumlah Tenaga Medis Puskesmas Menurut Potensi dan Tahun di Kabupaten Pamekasan, 2018	27
Tabel III.16	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018 (Juta Rupiah)	28
Tabel III.17	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (TD 2010) Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018 (Juta Rupiah)	28
Tabel III.18	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pamekasan 2017-2018 (%)	29
Tabel IV.1	Aset yang Dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan	35

Tabel IV.2	Aset yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan	40
Tabel IV.3	Aset yang Dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pamekasan	47
Tabel IV.4	Aset dan Barang yang Dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan	50
Tabel IV.5	Aset yang Dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan	57
Tabel IV.6	Aset yang Dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan	108
Tabel IV.7	Aset yang Dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pamekasan	112
Tabel IV.8	Aset yang Dimiliki Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan	117
Tabel IV.9	Aset yang Dimiliki Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan	142
Tabel IV.10	Aset yang Dimiliki Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan	152
Tabel IV.11	Aset yang Dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan	156

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah di mana pun –tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Pamekasan— umumnya memiliki sejumlah aset daerah yang perlu dilindungi dan dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Per definisi yang dimaksud aset daerah di sini adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Banyak bukti dan pengalaman di sejumlah daerah memperlihatkan, keberadaan aset daerah bukan tidak mungkin menjadi kontra-produktif, dan bahkan hilang ketika aset tersebut tidak dikelola dengan baik. Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan aset daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pemanfaatan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan lain-lain yang semuanya adalah serangkaian proses untuk memastikan agar aset daerah tidak sia-sia keberadaannya.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, selain dituntut memiliki data inventarisasi aset daerah yang lengkap dan selalu *up to date*, yang tak kalah penting dalam pengelolaan aset daerah Pemerintah Daerah kabupaten Pamekasan juga dituntut melakukan secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

Dari berbagai asset yang dimiliki Kabupaten Pamekasan, salah satu aset yang penting adalah tanah atau lahan. Tanah adalah salah satu kekayaan atau asset daerah yang dimiliki Kabupaten Pamekasan, yang keberadaannya tersebar di berbagai wilayah. Tanah atau lahan yang dimiliki Kabupaten Pamekasan, sebagian merupakan lahan produktif yang disewakan kepada pihak lain, tetapi sebagian berupa lahan terlantar yang belum dikelola dengan baik.

Kegiatan sebagaimana dilaporkan bermaksud memetakan asset lahan yang dimiliki Kabupaten Pamekasan, dan sekaligus merumuskan program yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan sumber pemasukan bagi PAD Kabupaten Pamekasan yang berasal dari pengelolaan asset daerah. Kegiatan ini penting dilakukan, karena disadari kekayaan atau keberadaan asset daerah jika tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak kontra-produktif.

2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dikaji dalam kegiatan ini adalah:

1. Di mana dan berapa banyak asset daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan, terutama asset dalam bentuk tanah?
2. Bagaimana kondisi dari asset daerah, terutama dalam bentuk yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan?
3. Program apa sajakah yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan sumber pemasukan PAD yang bersumber dari pengelolaan asset daerah dalam bentuk tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan?

3. Tujuan

Secara garis besar, tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memetakan keberadaan asset daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan, terutama asset dalam bentuk tanah.
2. Mendeskripsikan kondisi dari asset daerah, terutama dalam bentuk yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Merumuskan program yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan sumber pemasukan PAD yang bersumber dari pengelolaan asset daerah dalam bentuk tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

4. Metode dan Prosedur Kegiatan

Studi ini pada dasarnya bertujuan untuk memetakan aset daerah, khususnya tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sekaligus menyusun upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mendayagunakan aset terhadap untuk kepentingan peningkatan PAD Kabupaten Pamekasan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, beberapa langkah kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. ***Langkah Pertama***, persiapan awal dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya pengelolaan aset daerah.
2. ***Langkah Kedua***, menghimpun berbagai data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen pembangunan Kabupaten Pamekasan, risalah dialog publik, hasil kajian, opini publik, hasil lokakarya perencanaan strategis, dan hasil temu stakeholders Kabupaten Pamekasan.
3. ***Langkah Ketiga***, melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) dengan berbagai stakeholders terkait yang menangani persoalan aset daerah di Kabupaten Pamekasan. FGD ini, selain dalam rangka menginventarisasi aset daerah yang ada, terutama tanah, juga untuk memperoleh masukan tentang strategi apa yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari upaya pemanfaatan aset daerah di Kabupaten Pamekasan.
4. ***Langkah Keempat***, mendiskusikan hasil pemetaan aset daerah dan kebijakan pengelolaannya melibatkan pemerintah, tim ahli dan *stakeholders* terkait.

BAB 2

ASET DAERAH DAN PEMANFAATANNYA: KERANGKA ANALISIS

Aset atau barang milik daerah pada dasarnya adalah semua kekayaan daerah baik yang di beli atau di peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagian ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat di nilai, di hitung, atau di timbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya (Soleh & Rochmansjah, 2010). Secara sederhana, pengertian aset daerah ebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan adalah semua barang di beli atau di peroleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset daerah tidak selalu harus berasal dari pembelian atau pengadaan yang dananya bersumber dari APBD. Sumber dana dan asal dari asset atau barang milik daerah dapat berasal dari sumber yang bermacam-macam, antara lain: pembelanjaan dari APBD, sumbangan dari dalam maupun luar negeri, sumbangan pihak ketiga, pemberian dari Pemerintah Pusat, swadaya masyarakat, dan lain-lain. Intinya asset daerah adalah semua barang yang secara hukum dikuasai Pemerintah Daerah –yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Aset daerah, dalam bentuk apa pun –entah tanah, gedung, dan lain sebagainya-- merupakan salah satu sumber pemasukan penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang dan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Keberadaan aset daerah tidak bisa dibiarkan lepas kendali dan tidak produktif, sehingga pemerintah daerah mana pun dituntut untuk pandai-pandai mengelola aset daerah secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan sumbangan yang benar-benar optimal bagi masyarakat maupun pemerintah daerah yang bersangkutan. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dituntut dapat menjadi salah satu cara memberikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, selain juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan (*return*) dalam bentuk uang. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan daerah termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan merupakan penopang bagi PAD.

Semua pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah pada dasarnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang harus disetorkan langsung kepada Kas Daerah dan selanjutnya akan dapat digunakan untuk kegiatan belanja daerah secara berkelanjutan (*sustainable*) melalui APBD. Pada dasarnya pemanfaatan aset atau barang milik daerah ini bisa dikategorisasikan sebagai bagian dari investasi dan pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Aset daerah yang tidak dikelola dengan baik, dan hanya dikelola untuk kepentingan elit politik tertentu, bukan saja kontraproduktif, tetapi juga akan menjadi bagian kasus kriminal yang menyeret pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selama ini, persoalan pengelolaan aset daerah menjadi berita di media massa, mulai dari kasus lahan aset daerah yang dikuasai warga secara ilegal, fisik aset tidak ditemukan walau terdapat dalam pencatatan atau sebaliknya, penggunaan aset belum sesuai ketentuan, sampai dengan kasus penjualan aset daerah yang dilakukan oknum pejabat untuk kepentingan pribadinya.

1. Problema Pengelolaan Aset Daerah

Idealnya aset daerah adalah bagian dari kekayaan dan sumber ekonomi Pemerintah Daerah yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk menambah pemasukan PAD dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Di Indonesia, diketahui hampir semua daerah memiliki aset yang strategis dan dapat dimanfaatkan secara produktif. Namun demikian, tidak semua daerah ternyata tanggap dan memiliki inisiatif yang kuat untuk mengelola aset daerah dengan baik.

Studi Kaganova dan Nayyar-Stone (2000) yang dibiayai World Bank menemukan bahwa pemerintah daerah di hampir semua negara memiliki aset publik (aset pemerintah) dalam jumlah yang signifikan. Berbagai asset daerah ini, ketika dikelola dengan baik bukan tidak mungkin dampaknya akan signifikan bagi kualitas layanan public pemerintah. Namun sayangnya di berbagai daerah, ternyata belum banyak Pemerintah Daerah yang memiliki kesadaran bahwa aset publik merupakan portofolio yang seharusnya dikelola dengan baik, karena dapat memberi manfaat langsung, yaitu efisiensi atas anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset. Kaganova dan McKellar (2006) menegaskan bahwa banyak Pemerintah Daerah di seluruh dunia merupakan pemilik aset terbesar dari segi kuantitas dan nilai dibanding lembaga atau korporasi apapun di wilayahnya masing-masing. Potensi kepemilikan asset daerah yang besar ini, oleh sebab itu perlu dikelola dan ditata dengan baik agar memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo, dkk (2012) dan Mardiasmo (2012) terhadap tiga Pemerintah Daerah di Indonesia menemukan bahwa lambatnya proses reformasi dalam manajemen pengelolaan aset daerah umumnya disebabkan oleh: urusan pasca reformasi yang belum sepenuhnya tertata, terbatasnya kapabilitas SDM; (3) Lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan; dan (4) rendahnya fungsi manfaat aset.

Dalam studi lain yang dilakukan oleh Hanis, dkk (2011) pada Pemerintah Daerah yang berbeda, diketahui terdapat faktor-faktor lain yang menghambat pengelolaan aset daerah seperti: (1) Belum komprehensifnya kerangka kebijakan; (2) Persepsi tradisional yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah; (3) Inefisiensi; (4) Keterbatasan data; dan (5) Keterbatasan SDM.

Menambahkan studi/riset yang pernah dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, maka perlu disandingkan dengan fakta yang dipaparkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap manajemen aset daerah ini dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang Penulis rangkum dari Semester I dan II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016, di mana beberapa persoalan yang sering muncul yaitu: (1) Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Aset tidak

didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset belum dioptimalkan (*underutilized*); (5) Standard operating prosedur (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Prinsip Pengelolaan Aset Daerah

Prinsip dasar pengelolaan aset daerah adalah keterbukaan atau transparansi. Artinya, yang namanya aset daerah selain harus tercatat dalam laporan kepemilikan aset daerah, juga yang tak kalah penting adalah bagaimana laporan secara terbuka pemasukan yang diperoleh dari pengelolaan aset daerah. Prinsip dasar pengelolaan aset daerah ini perlu diketahui seluruh SKPD. Tujuannya adalah agar supaya Pemerintah Daerah menjadi lebih mudah dalam pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah.

Secara garis besar, tiga prinsip dasar dalam pengelolaan aset daerah adalah sebagai berikut: (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) Pengawasan (*monitoring*).

Pertama, perencanaan yang tepat merupakan prinsip yang pertama dan penting dalam pengelolaan aset daerah. Pemerintah daerah sangat diharuskan untuk memiliki atau membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Dengan berpijak pada rencana yang sudah dibuat ini, kemudian pemerintah daerah baru bisa mengusulkan anggaran pengadaannya.

Dalam perencanaan dan pengelolaan aset daerah, peran serta masyarakat khususnya anggota DPRD sangat penting dalam hal ikut melakukan pengawasan (*monitoring*) apakah kekayaan aset yang tadi sudah direncanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan benar – benar dibutuhkan atau tidak?. Dalam hal Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (*compulsory competitive tendering contract*). Hal ini dilakukan dengan

tujuan agar pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan, serta sekaligus menjamin proses transparansi di balik realitas yang tampak.

Selain masyarakat, untuk memastikan agar keberadaan asset daerah benar-benar dapat dikelola dengan baik, tentunya anggota DPRD dituntut untuk lebih tegas dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Dalam hal ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan yang tepat: (1) melihat kondisi daerah di masa lalu; (2) aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang dan (3) perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang.

Kedua, pelaksanaan hasil perencanaan. Setelah menyusun dan memiliki perencanaan yang dilakukan secara tepat, tahapan selanjutnya adalah eksekusi atau tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan asset daerah Pemerintah Daerah harus mengedepankan dan memperhatikan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas hal ini bertujuan supaya bisa optimal dalam mengelola aset daerah yang dimiliki.

Ketiga, monitoring. Dalam upaya memastikan agar asset daerah benar-benar dikelola untuk kepentingan daerah dan masyarakat, maka peran penting masyarakat dan DPRD sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan asset daerah tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah.

Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountabilty for probity and legality*); (2) Akuntabilitas proses (*process accountability*); dan (3) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kejujuran dilakukan dengan menghindari dari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk dilakukannya *compulsory competitive tendering contrac* (CCTC) serta langkah antisipasi kemungkinan terjadinya mark up, ketika proses penganggaran terhadap rencana atau program pengadaan barang daerah. Untuk itu diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan tentunya masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan ataupun pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan serta sampai kepada tahap penghapusan barang daerah.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN PAMEKASAN

Pembangunan suatu wilayah membutuhkan tidak sedikit anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, total anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah selama ini dari Pemerintah Pusat tentu saja tidak mencukupi semua kebutuhan di daerah karena harus dibagi-bagi dengan daerah lainnya. Demikian dengan Kabupaten Pamekasan, dari sejumlah anggaran yang dimiliki tentu saja harus dialokasikan ke berbagai bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Untuk menambah sumber-sumber anggaran, keberadaan asset yang dimiliki daerah sebenarnya memiliki peran strategis. Asset-aset yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Pamekasan bisa menjadi sumber pendapatan daerah apabila memiliki produktivitas.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah, belum terencanakannya program-program pemanfaatan asset daerah di Kabupaten Pamekasan dengan baik. Sehingga keberadaan asset daerah saat ini masih banyak yang terbengkalai menjadi lahan yang tidak produktif.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi asset daerah serta merencanakan program-program untuk pemanfaatan asset daerah di Kabupaten Pamekasan program tersebut, tentunya juga harus kontekstual dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Karena itu, data-data terkait kondisi geografis, demografis, maupun social ekonomi menjadi penting untuk menunjang kegiatan analisis agar program pemanfaatan asset daerah menjadi kontekstual dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

1. Kondisi Geografis Kabupaten Pamekasan

Secara Astronomis, Kabupaten Pamekasan terletak pada 113°19' - 113°58' BT dan 6°51' - 7°31' LS sehingga beriklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan. Wilayah Kabupaten Pamekasan memiliki luas 79.230,01 Hektar yang

secara administratif dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah Utara, Selat Madura di sebelah Selatan, Kabupaten Sampang di sebelah Barat dan Kabupaten Sumenep di sebelah Timur.

Tabel III.1
Kondisi Umum Geografis dan Iklim Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

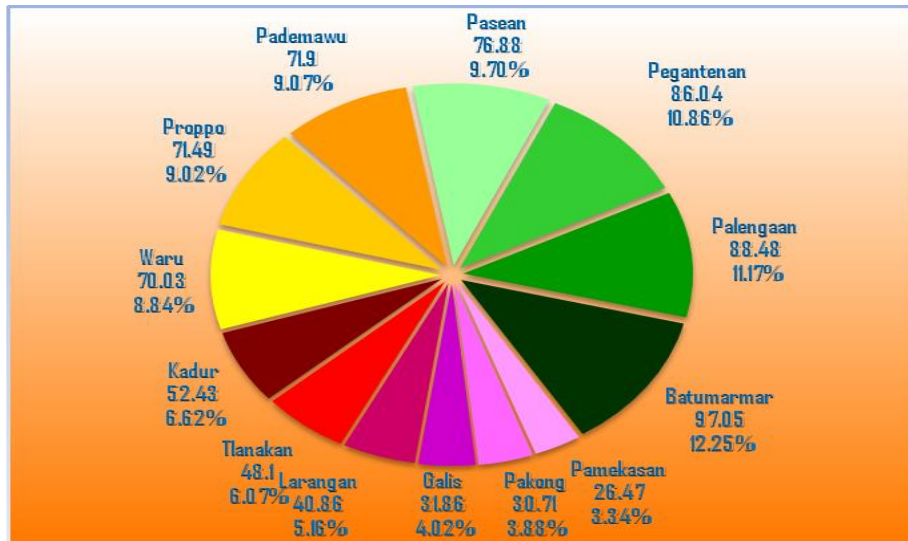
001.	Luas Wilayah	:	79.230,01 Hektar
002.	Letak Wilayah	:	113° 19' - 113° 58' BT 6° 51' - 7° 31' LS
003.	Batas Wilayah		
	a. Utara	:	Laut Jawa
	b. Selatan	:	Selat Madura
	c. Barat	:	Kab. Sampang
	d. Timur	:	Kab. Sumenep
004.	Ketinggian dari Permukaan Laut		
	a. Tertinggi	:	350 meter
	b. Terendah	:	6 meter
005.	Musim		
	a. Oktober-April	:	Penghujan
	b. April-Oktober	:	Kemarau
006.	Temperatur Rata-rata		
	a. Maksimum	:	30° Celcius
	b. Minimum	:	28° Celcius
007.	Kelembaban Udara rata-rata	:	80 %
008.	Jarak Pamekasan ke:		
	a. Sumenep	:	53 Km
	b. Sampang	:	33 Km
	c. Bangkalan	:	99 Km
	d. Surabaya	:	125 Km

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Wilayah ini memiliki ketinggian tertinggi 350 meter diatas permukaan laut dan wilayah terendah pada ketinggian 6 meter diatas permukaan laut. Kondisi ini menjadikan wilayah Kabupaten Pamekasan memiliki temperatur rata-rata maksimum 30° C dan 28° C dan kelembaban udara rata-rata 80%.

Wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi kedalam 13 kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda di masing-masing kecamatan. Kecamatan Baturem merupakan kecamatan yang wilayahnya terluas yaitu 97,05 Ha atau 12,25% dari luas Pamekasan. Sedangkan kecamatan Pamekasan yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah terkecil yaitu 26,47 Ha atau 3,34% dari luas Kabupaten Pamekasan.

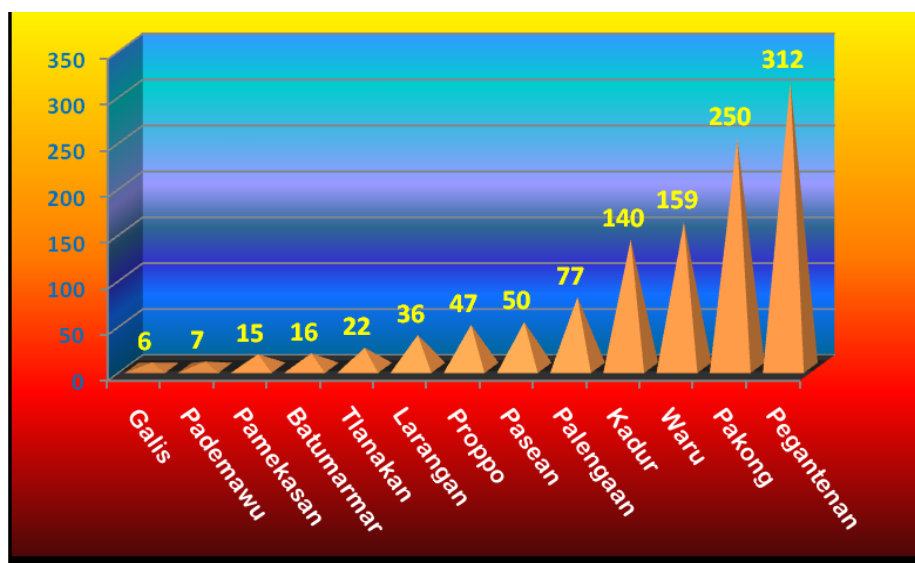
Gambar III.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018
(Km²)



Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Secara geografis, wilayah Kabupaten Pamekasan sebagian terletak di dataran rendah dan sebagian lagi di dataran tinggi. Hal ini memberikan karakter yang berbeda terhadap mata pencaharian penduduk. Dataran rendah memberikan potensi kelautan serta pertanian dan dataran tinggi memberikan potensi perbukitan yang cocok digunakan untuk perkebunan.

Gambar III.2
Ketinggian Wilayah dari Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pamekasan 2018 (meter)



Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Wilayah yang terletak pada ketinggian >100 meter diatas permukaan laut adalah Kecamatan Pegantenan, Pakong, Waru dan Kadur dengan wilayah tertinggi adalah Pegantenan yang terletak pada 312 meter diatas permukaan laut. Wilayah yang berada pada >40 dan <100 meter diatas permukaan laut adalah Kecamatan Palengaan, Pasean, dan Proppo. Sedangkan yang terletak pada ketinggian <40 meter diatas permukaan laut adalah Kecamatan Larangan, Tlanakan, Batumarmar, Pamekasan, Pademawu dan Galis.

Ketinggian wilayah yang berbeda menyebabkan wilayah Kecamatan di Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemiringan tanah yang berbeda-beda. Secara umum, tingkat kemiringan tanah di Kabupaten Pamekasan terbagi kedalam 4 kluster yaitu kemiringan antara 0°-15°, 15°-25°, 25°-40° dan >40°.

Tabel III.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kemiringan Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 (Ha)

Kecamatan	Kemiringan Tanah				Jumlah
	0°-15°	15°-25°	25°-40°	>40°	
1. Tlanakan	4.810	-	-	-	4.810
2. Pademawu	7.189	-	-	-	7.189
3. Galis	3.186	-	-	-	3.186
4. Larangan	3.841	245	-	-	4.086
5. Pamekasan	2.647	-	-	-	2.647
6. Proppo	6.882	267	-	-	7.149
7. Palengaan	6.830	1.880	138	-	8.848
8. Pegantenan	5.733	1.873	513	485	8.604
9. Kadur	3.376	272	638	956	5.242
10. Pakong	1.993	532	113	433	3.071
11. Waru	4.774	1.509	-	720	7.003
12. Batumarmar	3.308	5.808	463	128	9.707
13. Pasean	5.395	1.905	388	-	7.688
Jumlah	59.964	14.291	2.253	2.722	79.230

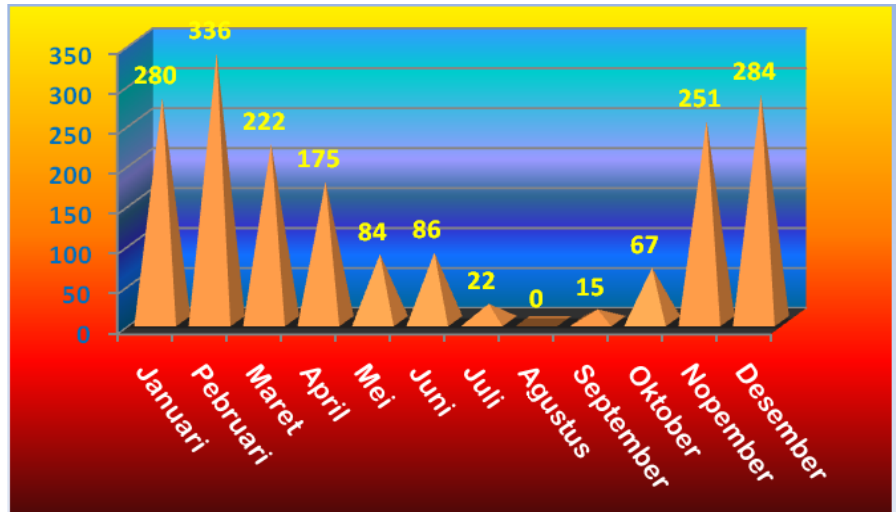
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis dan Pamekasan semua wilayahnya berada pada kemiringan 0°-15°. Keempat kecamatan ini terletak di dataran rendah, sehingga tingkat kemiringan tanahnya juga rendah. Beberapa wilayah memiliki tingkat kemiringan sampai 15°-25° yaitu Kecamatan Larangan, Proppo dan Waru.

Semakin suatu wilayah terletak pada dataran tinggi maka semakin besar pula tingkat kemiringan tanahnya. Beberapa wilayah berada pada kemiringan 25°-40° yaitu Palengaan dan Pasean. Wilayah yang terletak pada tingkat kemiringan

>40° antara lain Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Jika dilihat secara umum maka sebagian besar wilayah Kabupaten Pamekasan yaitu 59.964 Ha terletak pada kemiringan 15°-25°.

Gambar III.3
Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Pamekasan 2018



Sumber : Dinas Pengairan UPTD Pamekasan Tahun 2019

Kabupaten Pamekasan terletak di daerah tropis, sehingga curah hujan di wilayah Kabupaten Pamekasan bersifat fluktuatif mengikuti musim. Pada Tahun 2017, curah hujan tinggi terjadi pada musim penghujan dengan puncaknya yaitu bulan februari dimana dalam setahun telah terjadi 336 kali hujan. Bulan desember mengalami 284 kali hujan, januari 280 kali hujan dan curah hujan mulai berkurang menjelang musim kemarau. Sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan juli-september dengan curah hujan terendah di bulan agustus. Pada bulan agustus tidak terjadi hujan sama sekali, sementara pada bulan juli masih terjadi 22 kali hujan dan bulan september terjadi hujan sebanyak 15 kali.

Dengan adanya dua musim ini, menjadikan Kabupaten Pamekasan memiliki potensi pertanian yang beberapa merupakan tanaman komoditas baik lokal, nasional maupun internasional yaitu padi pada saat musim penghujan dan tembakau disaat musim kemarau.

Tabel III.3
Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jenis Kualitas Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 (Ha)

Kecamatan	Aluvial	Regosol	Mediteran	Litosol	Jumlah
1. Tlanakan	401	4.409	-	-	4.810
2. Pademawu	3.735	2.779	-	675	7.189
3. Galis	-	2.661	-	525	3.186
4. Larangan	-	1.351	1.359	1.376	4.086
5. Pamekasan	2.572	0	75	-	2.647
6. Proppo	-	1.550	4.665	934	7.149
7. Palengaan	-	4.022	647	4.179	8.848
8. Pegantenan	-	3.234	1.692	3.678	8.604
9. Kadur	-	3.477	-	1.765	5.242
10. Pakong	-	967	1.654	450	3.071
11. Waru	-	3.770	1.468	1.765	7.003
12. Batumarmar	-	6.157	1.536	2.014	9.707
13. Pasean	-	1.686	4.279	1.723	7.688
Jumlah	6.708	36.063	17.375	19.084	79.230

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Letak geografis selain berpengaruh pada ketinggian, kemiringan, curah hujan, juga berpengaruh pada jenis kualitas tanah. Di Kabupaten Pamekasan terdapat 4 jenis kualitas tanah yaitu aluvial, regosol, mediteran dan litosol. Tanah aluvial di Kabupaten Pamekasan seluas 6.708 Ha berada di Kecamatan Pademawu 3.735 Ha, Pamekasan seluas 2.752 Ha dan di Tlanakan seluas 401 Ha. Jenis tanah aluvial ini cocok digunakan untuk menanam padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau dan buah-buahan.

Tanah regosol luasnya mencapai 36.063 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Pamekasan. Tanah regosol yang berasal dari material gunung api ini sangat cocok digunakan sebagai area pertanian padi, tebu, palawija, sayuran, dan tembakau.

Kabupaten Pamekasan juga memiliki luas tanah mediteran 17.375 Ha yang tersebar di hampir seluruh kecamatan kecuali Tlanakan, Pademawu Galis dan Kadur. Tanah jenis mediteran ini merupakan hasil dari pelapukan batuan kapur dan sedimen, sehingga cocok untuk tanaman palawija, jati, tembakau dan jambu mente.

Sebanyak 19.084 Ha wilayah Kabupaten terdiri dari tanah litosol yang terdapat di hampir semua kecamatan kecuali Pamekasan dan Tlanakan. Adanya tanah litosol yang berbatu-batu ini memberikan potensi bagi hidupnya rumput

untuk pakan ternak, palawija dan beberapa tanaman yang cocok hidup di tanah jenis litosol.

Adanya jenis-jenis kualitas tanah yang berbeda di Kabupaten Pamekasan memberikan potensi bagi wilayah tersebut untuk pengembangan berbagai jenis tanaman. Jenis kualitas tanah yang berbeda di dalam satu wilayah kecamatan, memberikan potensi bagi wilayah tersebut untuk memiliki variasi tanaman yang berbeda sesuai dengan kecocokan tanah.

2. Kondisi Demografi

Mengetahui gambaran umum demografi sangat penting untuk memetakan kebutuhan penduduk sebagai obyek dari pembangunan. Kondisi penduduk di Kecamatan Pamekasan secara social kultural merupakan penduduk asli Pulau Madura. Konsentrasi penduduk tersebut tersebar di 13 kecamatan.

Menurut catatan BPS, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan sebesar 871.497 jiwa. Jumlah tersebut merupakan kenaikan dari tahun 2017 sebesar 862.914 jiwa dan pada tahun 2010 sebesar 795.918 jiwa. Dari kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2010-2018 telah terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,10%.

Tabel III.4
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan, 2010, 2017 dan 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2017	2018	2010	2018
1. Tlanakan	59.156	63.660	64.450	1.11	0.12
2. Pademawu	76.713	82.724	83.773	1.14	0.13
3. Galis	28.235	28.852	29.461	0.36	0.21
4. Larangan	53.174	55.529	55.979	0.67	0.08
5. Pamekasan	89.103	95.318	96.419	1.02	0.11
6. Proppo	75.079	79.056	79.791	0.79	0.09
7. Palengaan	85.246	104.325	105.059	2.99	0.07
8. Pegantenan	63.014	66.181	66.773	0.76	0.09
9. Kadur	44.622	45.061	46.300	0.19	0.27
10. Pakong	34.429	35.874	36.155	0.64	0.10
11. Waru	59.346	64.683	65.602	1.29	0.14
12. Batumarmar	77.653	91.852	90.572	2.49	-0.14
13. Pasean	50.148	49.889	51.163	-0.02	0.25

Jumlah	795.918	862.914	871.497	1.21	0.10
---------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Pertumbuhan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Kadur sebesar 0,27% dimana jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 44.622 jiwa menjadi 46.300 pada tahun 2018. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pasean sebesar 0,25% dengan jumlah pertambahan penduduk dari tahun 2010 sebesar 50.148 jiwa menjadi 51.163 jiwa pada tahun 2018. Sementara itu, disaat jumlah penduduk di kecamatan lainnya mengalami kenaikan, jumlah penduduk di Kecamatan Batumarmar justru menurun yaitu dari 91.852 jiwa pada tahun 2010 menjadi 90.572 jiwa pada tahun 2018, sehingga laju pertumbuhan penduduk - 0,14%. Pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan tersebut dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi.

Tabel III.5
Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di
Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Kepadatan Penduduk	
				Per Km ²	Per Ruta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Tlanakan	48,10	64.450	17.441	1.339,9	4
3. Pademawu	71,90	83.773	22.783	1.165,1	4
4. Galis	31,88	29.461	9.028	924,1	3
5. Larangan	40,86	55.979	17.221	1.370,0	3
6. Pamekasan	26,47	96.419	24.631	3.642,6	4
7. Proppo	71,49	79.791	19.227	1.116,1	4
8. Palengaan	88,48	105.059	19.883	1.187,4	5
9. Pegantenan	86,04	66.773	16.594	776,1	4
10. Kadur	52,43	46.300	13.244	883,1	3
11. Pakong	30,71	36.155	9.659	1.177,3	4
12. Waru	70,03	65.602	16.602	936,8	4
13. Batumarmar	97,05	90.572	24.426	933,3	4
14. Pasean	76,88	51.163	15.072	665,5	3
Jumlah	792,32	871.497	225.811	1.099,9	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Adapun konsentrasi penduduk paling padat terdapat di Kecamatan Pamekasan yaitu sebesar 3.642,6 jiwa/km². Selanjutnya kecamatan yang mengalami kepadatan Tlanakan mencapai 1.339,9 jiwa/km². Sementara itu,

terdapat kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Pasean sebesar 665,5 jiwa/km².

Meskipun Kecamatan Pamekasan memiliki jumlah penduduk paling besar dan kepadatan tertinggi, namun kepadatan rumah tangga tertinggi di Kabupaten Pamekasan terletak di Kecamatan Palengaan yaitu sebesar 5 jiwa/ruta. Artinya didalam setiap rumah tangga rata-rata terdapat 5 orang/ruta. Sementara beberapa kecamatan lainnya rata-rata memiliki kepadatan 3 jiwa/ruta seperti Galis, Larangan, Kadur, dan Pasean.

Tabel III.6
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
1. Tlanakan	31.416	33.034	64.450	95,10
2. Pademawu	40.656	43.117	83.773	94,29
3. Galis	14.271	15.190	29.461	93,95
4. Larangan	26.680	29.299	55.979	91,06
5. Pamekasan	47.231	49.188	96.419	96,02
6. Proppo	38.726	41.065	79.791	94,30
7. Palengaan	53.704	51.355	105.059	104,57
8. Pegantenan	31.536	35.237	66.773	89,50
9. Kadur	22.032	24.268	46.300	90,79
10. Pakong	16.879	19.276	36.155	87,56
11. Waru	31.679	33.923	65.602	93,39
12. Batumarmar	44.532	46.040	90.572	96,72
13. Pasean	24.245	26.918	51.163	90,07
Jumlah	423.587	447.910	871.497	94,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Pembangunan yang adil dan merata merupakan pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa adanya diskriminasi atau merugikan salah satu pihak tertentu. Adanya data terkait jenis kelamin penduduk memudahkan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk tanpa adanya diskriminasi pada salah satu kelompok. Salah satu bentuk pembangunan yang adil dan merata adalah pembangunan berbasis gender dimana tidak ada keberpihakan antara laki-laki atau perempuan. Kebutuhan semua penduduk baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang dapat terakomodir dengan baik.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan mencapai 871.497 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 423.587 jiwa dan perempuan sebesar 447.910 jiwa. Banyaknya penduduk perempuan dibanding laki-laki menjadikan angka sex ratio sebesar 94,57%. Jika diperhatikan hampir semua kecamatan di Kabupaten Pamekasan memiliki sex ratio kurang dari 100%. Artinya kecamatan-kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibanding laki-laki. Sedangkan kecamatan yang memiliki sex ratio lebih dari 100% yaitu Palengaan sebesar 104,57% dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 53.704 jiwa dan perempuan 51.355 jiwa.

Karakteristik penduduk Kabupaten Pamekasan berdasarkan umur berada pada rentang produktif yaitu usia 15-60 tahun. Bonus demografi memberikan peluang dan tantangan bagi Kabupaten Pamekasan. Peluang dari bonus demografi adalah penduduk usia produktif sebagai penggerak roda pembangunan. Akan tetapi tantangan dari bonus demografi tersebut apabila tidak diimbangi dengan adanya peluang kerja yang seimbang, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan.

Tabel III.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Umur	Laki-laki	Perempuan
0-4	34.606	33.474
5-9	37.011	35.696
10-14	42.279	40.625
15-19	44.563	40.946
20-24	37.124	38.345
25-29	32.318	36.637
30-34	33.798	37.789
35-39	32.627	34.211
40-44	29.151	32.247
45-49	27.667	30.405
50-54	22.262	24.551
55-59	18.378	19.631
60+	31.803	43.353

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Keberadaan sebagian besar penduduk usia produktif juga memberikan keuntungan bagi Kabupaten Pamekasan yaitu mengurangi angka ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif. Kondisi tersebut akan mempermudah dan meringankan beban penduduk usia produktif untuk

meningkatkan kesejahteraan kehidupannya karena beban yang ditanggung lebih ringan.

Untuk penduduk non produktif di Kabupaten Pamekasan sebagian besar merupakan penduduk usia anak-anak sehingga harapan di masa depan bertumpu pada usia tersebut. Sedangkan penduduk usia non produktif yang berusia +60 tahun sebesar 31.803 laki-laki dan 43.353 perempuan. Banyaknya lansia yang berusia perempuan menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan di Kabupaten Pamekasan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Berbicara tentang kependudukan maka tidak akan terlepas dari kondisi ketenagakerjaan penduduk. Deskripsi ketenagakerjaan penduduk memberikan gambaran tentang kondisi permasalahan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pamekasan serta keterkaitannya dengan permasalahan social ekonomi yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dari tahun ketahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika pada tahun 2015 penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 624.787 jiwa, maka pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 660.551 jiwa.

Dari jumlah penduduk yang ada secara keseluruhan, penduduk yang bukan merupakan Angkatan kerja juga meningkat dari 155.706 jiwa pada tahun 2015 menjadi 202.465 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan, jumlah penduduk dengan status pengangguran mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 mencapai 18.133 jiwa menjadi 13.385 jiwa.

Adapun tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan terbilang sedang yaitu 69,35%. Sementara tingkat kesempatan kerja sebesar 97,08%. Meskipun tingkat kesempatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja, namun di Kabupaten Pamekasan masih terdapat pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,92%. Artinya kesempatan atau peluang kerja yang ada belum bisa menyerap Angkatan kerja yang ada. Kondisi tersebut bisa dikarenakan karena kualifikasi yang diminta oleh lowongan kerja belum bisa dipenuhi oleh para pencari kerja. Namun bisa juga kondisi lain seperti factor social dimana masih banyak penduduk yang bekerja di sector pertanian, sehingga sector informal masih sedikit diminati.

Tabel III.8
Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Penduduk	836.224	854.194	863.004	871.497
Penduduk Usia 15 Thn Keatas	624.787	0	651.952	660.551
Bukan Angkatan Kerja	155.706	0	188.551	202.465
Angkatan Kerja	469.081	0	463.401	458.086
Bekerja Seminggu Yang Lalu	459.046	0	445.268	444.701
Pengangguran	10.035	0	18.133	13.385
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,08	0	0	69.35
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,86	0	0	97.08
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,14	0	0	2.92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Berbicara kualifikasi lowongan pekerjaan, tentu tidak lepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pencari kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk di Kabupaten Pamekasan merupakan lulusan sarjana yang dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Demikian dengan lulusan sarjana muda juga banyak, serta minimal merupakan lulusan SMA. Adapun pencari kerja jika dilihat dari jenis kelamin, pencari pekerja perempuan jumlahnya juga lebih banyak baik pada tahun 2017 maupun 2018.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi perubahan social di masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Saat ini perempuan-perempuan di daerah tersebut telah memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan maupun pekerjaan di sector public. Perempuan tidak lagi dikaitkan dengan pekerjaan pada ranah domestic sebagai ibu rumah tangga, tetapi mereka mulai ingin bekerja di ranah public dengan bekal pendidikan yang telah mereka tamatkan.

Tabel III.9
Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018

Tingkat Pendidikan	2017			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah Dasar	-	-	-	1	0	1
S M T P	2	-	2	1	0	1
S M T A	175	68	243	236	244	480
Sarjana Muda	10	18	28	117	223	340
Sarjana	95	65	160	391	478	869
Jumlah	282	151	433	746	945	1.691

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pamekasan Tahun 2019

Untuk penempatan tenaga kerja sendiri terbagi kedalam antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara. Dilihat dari trend penempatan tenaga kerja dalam rentang waktu 2014-2018 perkembangannya cukup fluktuatif. Misalnya saja pada tahun 2014 penempatan tenaga kerja lokal lebih banyak yaitu 89 jiwa, sementara yang diluar negeri sebanyak 64. Pada tahun 2015 jumlah penempatan kerja berkurang hingga pada tahun 2017 sebanyak 84 tenaga kerja merupakan penempatan lokal. Akan tetapi pada tahun 2018 penempatan tenaga kerja antar negara jumlahnya lebih besar dibandingkan yang penempatan lokal.

Tabel III.10
Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Program Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018

Tahun	Program Kerja			Jumlah
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah	Antar Kerja Antar Negara	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2014	89	-	64	153
2015	51	-	7	58
2016	6	-	17	23
2017	84	-	-	84
2018	65	-	163	228

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Kondisi tersebut, menggambarkan bahwa era keterbukaan informasi turut mempengaruhi kondisi tenaga kerja di Kabupaten Pamekasa. Kemudahan akses dan informasi tentang bekerja diluar negeri juga berpengaruh terhadap minat tenaga kerja untuk bisa bekerja disana dengan upah yang lebih menjanjikan. Pada

satu sisi kondisi tersebut menguntungkan karena menambah devisa negara. Akan tetapi disisi lain perlu dipahami bahwa berpindahnya penduduk usia produktif ke luar daerah maupun luar negeri akan berpengaruh pada laju pembangunan daerah yang ditinggalkan. Karena suatu daerah dengan mayoritas penduduk usia non produktif akan sulit untuk berkembang, kecuali jika para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dapat memanfaatkan remittance dengan baik sebagai modal di masa depan.

3. Kondisi Pendidikan

Dalam proses perubahan social di masyarakat pendidikan memegang peran penting. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat proses perubahan akan sulit dilakukan. Sebagai sebuah alat perubahan pendidikan mampu menjadikan masyarakat melakukan transformasi social, ekonomi, kultural, politik maupun bidang lainnya.

Di Kabupaten Pamekasan sendiri, transformasi social yang terjadi tidak lepas dari peran pendidikan. Jika dibandingkan antara dulu dengan sekarang berbagai kemajuan telah dicapai oleh Kabupaten Pamekasan. Tentunya perubahan tersebut dapat dicapai karena terjadinya peningkatan sumber daya manusia di daerah Pamekasan dan menduduki posisi-posisi strategis dalam pengambilan kebijakan untuk kemajuan Kabupaten Pamekasan.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidik di Kabupaten Pamekasan, tentunya ada upaya yang telah dilakukan untuk pembangunan di bidang pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya sarana dan prasarana pendidikan yang telah tersedia. Sarana dan prasarana pembangunan bidang pendidikan tersedia dari PAUD hingga perguruan tinggi.

Pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan telah terdapat 464 sekolah baik negeri maupun swasta. Adapun jumlah murid sekolah dasar selama tahun 2017-2018 sebesar 59.176 siswa dengan jumlah guru 5.549 orang. Jika dihitung rasio antara murid dan guru totalnya sebesar 10,7 murid per guru.

Pada tingkat SMP terdapat 176 sekolah baik negeri maupun swasta dimana terdapat sebanyak 21.380 murid. Adapun jumlah guru yang mengajar di SMP sebanyak 2.952 orang dengan rasio murid dengan guru sebesar 7.2 murid/guru.

Sementara untuk tingkat SMA sebesar 78 unit dengan 5.378 murid dan guru sebanyak 1.004 orang. Jika dihitung, maka rasio murid dan guru sebesar 5.36 murid per guru.

Tabel III.11
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Bawah Kementerian Pendidikan Menurut Kecamatan, 2017-2018

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
SD	464	59.176	5.549	10.7
SMP	176	21.380	2.952	7.2
SMA	78	5.378	1.004	5.36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Selain sarana dan prasarana pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, juga terdapat sarana dan prasarana pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Agama. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah berbasis releigi. Artinya pendidikan tidak hanya ditekankan pada pengetahuan umum tetapi juga pengetahuan agama.

Adapun jumlah sekolah pada tingkat pendidikan MI sebesar 318 unit dengan jumlah guru sebanyak 3.242 orang dan 26.955 murid. Jika dihitung rasio antara jumlah murid dan guru maka rasionya 8.3 murid/guru. Sementara itu, jumlah MTs sebanyak 197 unit dengan jumlah guru sebanyak 2.402 guru dan murid sebanyak 28.495 murid. Rasio antara murid dan guru sebesar 11,9 murid/guru. Untuk tingkat pendidikan Aliyah ada sebanyak 108 unit dengan 1.532 guru. Adapun jumlah murid pada tingkat pendidikan Aliyah sebanyak 20.659. Jika dihitung rasio antara murid dengan guru sebesar 13.5 murid/guru.

Tabel III.12
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Bawah Kementerian Pendidikan dan Agama Menurut Kecamatan, 2017-2018

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid/guru
MI	318	3.242	26.955	8.3
MTs	197	2.402	28.495	11.9
Aliyah	108	1.532	20.659	13.5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Untuk melihat seberapa besar partisipasi penduduk usia sekolah di Kabupaten Pamekasan serta seberapa jauh program pembangunan di bidang pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari APK dan APM.

APK menggambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat terserap oleh fasilitas pendidikan yang ada. Pada tahun 2017-2018 APK pada tingkat pendidikan SD/MI sebesar 98,98%. Artinya sebanyak 98,98% penduduk pada usia SD mampu mengakses fasilitas pendidikan pada jenjang tersebut. Untuk APK pada tingkat SMP/MTs sebesar 90,42%. Hal ini berarti sebesar 90,42% penduduk usia SMP telah dapat mengakses pendidikan pada jenjang tersebut.

Tabel III.13
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pamekasan 2017-2018

Jenjang Pendidikan	APM	APK
SD/MI	92,69%	98,98%
SMP/MTs	81,98%	90,42%
SMA/SMK/MA	ts	ts

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Sementara itu, untuk melihat banyaknya penduduk pada usia sekolah jenjang tertentu yang sedang bersekolah dapat dilihat dari APM. Oleh karena itu, APM dinilai lebih akurat dibandingkan dengan APK. Angka APM dapat mencapai 100% manakala semua penduduk pada usia sekolah tertentu secara keseluruhan mengakses fasilitas pendidikan pada usia tertentu tersebut. Pada tahun 2017-2018 APM untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 92,69%. Artinya sebanyak 92,69% penduduk pada usia sekolah tertentu telah bersekolah pada tingkat pendidikan SD/MI. Sementara pada tingkat SMP/MTs jumlah APM sebesar 81,98% yang artinya ada sebesar 81,98% penduduk pada usia SMP/MTs yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Angka APM yang tidak mencapai 100% tersebut bisa dikarenakan anak pada usia pendidikan tertentu tidak bersekolah atau bersekolah di luar daerah.

4. Kondisi Fasilitas Kesehatan

Suatu keluarga yang tulang punggung utamanya mengalami kondisi sakit akan berdampak pada keluarga lainnya secara social dan ekonomi. Secara social, keluarga tersebut mendekati kemiskinan karena ketiadaan pencari nafkah dan keterbatasan dan tergerusnya asset yang mereka miliki. Secara ekonomi, pemasukan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan keluarga berkurang atau bahkan hilang sama sekali manakala anggota keluarga yang lain tidak bisa

mengandalkan kemampuan mereka, sementara pengeluaran semakin besar karena adanya biaya untuk pergi berobat.

Kondisi tersebut menggambarkan betapa pembangunan dalam bidang kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kondisi penduduk yang sehat dapat melakukan aktivitas dengan lancar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian sebaliknya, kondisi kesehatan penduduk yang buruk akan mengganggu aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan sehingga sulit bagi mereka untuk memaksimalkan upaya yang ada dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi terlibat dalam pembangunan di daerahnya.

Pemenuhan kebutuhan dalam bidang kesehatan dapat terpenuhi melalui adanya sarana dan prasarana dibidang kesehatan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Sampai pada tahun 2018 tercatat ada sebanyak 6 rumah sakit di Kabupaten Pamekasan 3 unit diantaranya di Kecamatan Pamekasan dan 1 unit lainnya di Tlanakan, Pademawu dan Waru.

Rumah sakit khusus untuk bersalin di Kabupaten Pamekasan telah tersedia 5 unit yang terletak di Kecamatan Pamkasan sebanyak 3 unit dan 2 lainnya di Tlanakan dan Pademawu. Selain rumah sakit juga telah terdapat poliklinik sebanyak 7 unit yang berada di Kecamatan Pamekasan sebanyak 3 unit, di Palengaan 1 unit, Pegantenan 1 unit, Pakong 1 unit dan Pasean 1 unit. Sementara untuk kebutuhan pelayanan kesehatan pada tingkat kecamatan maupun desa telah terdapat 20 unit puskesmas dan 42 unit puskesmas pembantu yang terletak di setiap kecamatan. Di Kabupaten Pamekasan juga telah terdapat 27 apotek yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain sarana kesehatan tersebut di setiap desa juga terdapat polindes untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar.

Tabel III.14
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan 2018

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poli klinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1. Tlanakan	1	1	0	2	4	2
2. Pademawu	1	1	0	2	5	3
3. Galis	0	0	0	1	2	2
4. Larangan	0	0	0	2	2	3
5. Pamekasan	3	3	3	2	4	7
6. Proppo	0	0	0	2	5	1
7. Palengaan	0	0	1	1	5	1

8. Pegantenan	0	0	1	2	2	2
9. Kadur	0	0	0	1	3	1
10. Pakong	0	0	1	1	2	2
11. Waru	1	0	0	2	2	1
12. Batumarmar	0	0	0	1	2	1
13. Pasean	0	0	1	1	4	1
Pamekasan	6	5	7	20	42	27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Dilihat dari trend keberadaan tenaga medis di Kabupaten Pamekasan menunjukkan peningkatan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah dokter umum mencapai 39 orang dan dokter gigi sebanyak 16 orang. Jumlah tenaga paramedic mencapai 586 orang dan bidang sebanyak 521 orang.

Keberadaan tenaga medis ini sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Jika dilihat dari data yang ada keberadaan dokter spesialis masih kosong. Sementara disisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dokter spesialis memegang peranan penting. Keberadaan dokter spesialis pada tingkat daerah ini setidaknya dapat meminimalisir biaya pasien untuk melakukan pengobatan di rumah sakit provinsi.

Tabel III.15
Jumlah Tenaga Medis Puskesmas Menurut Potensi dan Tahun di Kabupaten Pamekasan, 2018

Tenaga Medis	2014	2015	2016	2017	2018
Dokter spesialis	0	0	0	0	0
Dokter Umum	36	41	39	33	39
Dokter Gigi	12	13	12	16	16
Tenaga Paramedis	217	260	234	199	586
Bidan	273	294	281	506	521
Jumlah	538	608	566	754	1.162

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

5. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Pamekasan ditunjang oleh beberapa sector yang tergolong dalam sector primer, sekunder dan tersier. Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Adapun sector yang memiliki PDRB atas Dasar Harga Berlaku terbesar adalah sector pertanian kemudian disusul oleh sector Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kemudian sector konstruksi.

Tabel III.16
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017*	2018**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4.944.112,5	5.218,2
B. Pertambangan dan Penggalian	520.274,4	576,8
C. Industri Pengolahan	922.152,3	1.043,5
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.268,4	8,1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.214,5	11,9
F. Konstruksi	1.559.098,5	1.724
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Spd Motor	3.038.802,3	3.386,2
H. Transportasi dan Pergudangan	232.889,4	254,8
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98.373,7	109
J. Informasi dan Komunikasi	883.026,7	961,6
K. Jasa Keuangan	287.862,2	312,5
L. Real Estat	264.370,4	292,1
M.N. Jasa Perusahaan	55.243,8	61,3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	938.787,6	1.041,6
P. Jasa Pendidikan	617.985,2	668,8
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	104.626,7	114,3
R,S,T,U. Jasa Lainnya	154.487,6	167,3
PDRB	14.640.576,0	15.952,1

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

PDRB atas Dasar Harga Konstan juga mengalami kenaikan pada tahun 2018. Kenaikan PDRB atas Dasar Harga Konstan terjadi pada semua sektor penopang perekonomian. Sama dengan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dimana ada 3 sektor yang memiliki PDRB terbesar yaitu sektor pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Konstruksi.

Tabel III.17
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (TD
2010) Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017*	2018**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3.137.578,5	3.187,7
B. Pertambangan dan Penggalian	376.476,4	397,1
C. Industri Pengolahan	659.667,8	717
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.109,0	6,3
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.110,1	9,5

F. Konstruksi	1.081.967,7	1.170,9
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Spd Motor	2.222.637,5	2.384,3
H. Transportasi dan Pergudangan	176.844,5	188,7
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69.432,0	75,5
J. Informasi dan Komunikasi	776.903,4	838,6
K. Jasa Keuangan	194.190,4	206,2
L. Real Estat	203.143,8	216,6
M.N. Jasa Perusahaan	44.277,5	47,3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	694.045,0	728,1
P. Jasa Pendidikan	456.514,5	486,6
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	79.305,1	85,4
R,S,T,U. Jasa Lainnya	122.038,5	127,8
PDRB	10.310.241,6	10.873,5

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Meskipun pada PDRB atas Dasar Harga Berlaku sector pertanian mengalami pertumbuhan, namun kontribusi terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Pamekasan menurun yaitu dari 33,77% pada tahun 2017 menjadi 32,71% pada tahun 2018. Beberapa sector lain juga mengalami penurunan kontribusi diantaranya Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Jasa Keuangan, Jasa Pendidikan dan Jasa lainnya.

Gambar III.18
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pamekasan 2017-2018 (%)

Lapangan Usaha	2017*	2018**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	33,77	32,71
B. Pertambangan dan Penggalian	3,55	3,62
C. Industri Pengolahan	6,30	6,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07
F. Konstruksi	10,65	10,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Spd Motor	20,76	21,23
H. Transportasi dan Pergudangan	1,59	1,60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,67	0,68
J. Informasi dan Komunikasi	6,03	6,03
K. Jasa Keuangan	1,97	1,96

L. Real Estat	1,81	1,83
M.N. Jasa Perusahaan	0,38	0,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,41	6,53
P. Jasa Pendidikan	4,22	4,19
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	0,71	0,72
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,06	1,05
PDRB	100	100

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

Dilihat dari komposisi komponen penyusun PDRB di Kabupaten Pamekasan yang masih di dominasi oleh sector primer yaitu pertanian, terlihat bahwa daerah ini memiliki karakteristik sebagai daerah agraris dimana sector pertanian masih memegang peranan utama dalam kehidupan masyarakatnya. Akan tetapi sector lainnya juga mulai bertumbuh yang menjadikan komponen perekonomian Kabupaten menjadi bervariasi.

Bervariasinya komponen penyanggah perekonomian tersebut merupakan nilai positif bagi Kabupaten Pamekasan. Variasi tersebut menyebabkan Kabupaten Pamekasan memiliki daya elastisitas dalam menghadapi tekanan ekonomi dimana ketika sector pertanian tidak dapat diandalkan karena perubahan iklim, maka sector lainnya masih dapat menopang perekonomian.

BAB 4

INVENTARISASI ASET DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah aset atau barang milik daerah merupakan salah satu instrumen penting yang dapat mendukung upaya pelayanan terhadap *stakeholders* dan masyarakat serta terwujudkannya kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu upaya pengelolaan atas aset atau kekayaan pemerintah daerah harus benar-benar dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai undang-undang yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Pengelolaan dan penertiban barang milik daerah harus dilakukan secara baik serta harus dapat dipertanggungjawaban pemerintah daerah dalam laporan keuangan tersebut setiap tahun untuk selanjutnya diberikan opini. Dengan demikian penatausahaan dan pelaporan aset yang dikelola pemerintah daerah sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan materiil atas nilai yang diinvestasikan dan dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan aset atau kekayaan daerah serta pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan otoritas atau desentralisasi kewenangan yang diberikan terhadap pemerintah daerah.

Sebagaimana tertuang dalam pasal nomor 22 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki beberapa kewajiban yakni; *pertama*, berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya (urusan pemerintahan) dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, pemerintah daerah berkewajiban membuat rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah dan *ketiga*, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan kewenangan daerah untuk mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahan selain urusan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Oleh sebab itu pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam membuat kebijakan daerah agar dapat memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berlandaskan pada payung yuridis tersebut maka pemerintah daerah diberikan otoritas atau kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur berbagai urusan termasuk menyangkut sektor pengelolaan keuangan dan aset atau kekayaan yang dimiliki daerah. Diakui atau tidak kesehatan kondisi keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan turut menentukan sukses tidaknya pelaksanaan implementasi otonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi kewenangan pengelolaan pemerintahan maka beban pembiayaan seluruh program pembangunan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Bahkan dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan.

Pengelolaan aset milik pemerintah daerah di Kabupaten Pamekasan didasarkan pada payung hukum yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah dan barang yang berasal dari perolehan

lainnya yang sah. Barang yang dimaksud adalah barang yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki otonomi Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkewajiban melakukan tata kelola aset sebab menyangkut ketentuan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu elemen penting terhadap penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan penataan dalam menangani pengelolaan barang milik daerah, barang milik daerah tersebut yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Aktivitas penataan dan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pamekasan dapat dilakukan secara lebih optimal apabila diiringi dengan identifikasi atau inventarisasi secara berkelanjutan terhadap aset yang selama ini dimiliki pemerintah daerah sehingga dapat diketahui apa saja jenis barang atau aset, harga, tahun kepemilikan, proses memilikinya, sejak kapan dan sebagainya. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Terkait dengan tujuan tersebut maka pada bagian berikut ini disajikan uraian tentang berbagai jenis aset atau barang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya oleh tiap SKPD yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan.

1. Aset Badan Keuangan Daerah

Selama ini pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan berbagai aktivitas terkait dengan pengelolaan keuangan termasuk melaksanakan pendataan atas aset yang dimiliki daerah. Meski telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan aset atau kekayaan yang dimiliki daerah dengan melakukan pendataan dan penilaian ulang barang milik daerah namun kegiatan inventarisasi dan pemantauan atas perkembangan kondisi aset daerah perlu selalu dilakukan secara intens setidaknya didasarkan pada 2 hal penting yakni; (a). Untuk kepentingan administratif yaitu

sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga pemerintah daerah memperoleh opini tertentu atas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dimiliki; (b). dengan melakukan inventarisasi dan kajian tentang pengelolaan aset daerah maka dapat dipahami sejauh mana kondisi terkini kekayaan atau kemampuan keuangan yang dimiliki daerah. Dengan memahami kondisi terkini aset yang dimiliki selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan proses pembangunan terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selama ini aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pamekasan tersebar di berbagai wilayah dan SKPD. Aset atau kekayaan daerah dimanfaatkan oleh berbagai SKPD sebagai fasilitas dan sarana pendukung aktivitas operasional kelembagaan sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tiap-tiap dinas atau lembaga yang ada. Aset yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan misalnya sampai dengan tahun 2018 SKPD ini memiliki sejumlah aset atau barang yang digunakan sebagai fasilitas dan sarana pendukung bagu tugas operasional keseharian. Bentuk aset yang dimiliki seluruhnya dalam bentuk tanah dengan ukuran luas yang beragam. Menurut catatan yang ada aset yang dimiliki BKD dalam bentuk tanah dengan berbagai ukuran mulai dari 553 meter persegi sampai yang paling luas berukuran 3828 meter persegi. Secara lokalistik berbagai tanah aset BKD tersebut terletak di berbagai wilayah antara lain; di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan, di Kecamatan Larangan dan di berbagai desa yang ada di Kecamatan Tlanakan.

Tabel IV.1
Aset yang Dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (m2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)
		KODE BARANG	REGISTER				HAK	SERTIFIKAT				
								TANGGAL	NOMOR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah	01.01.13.13.08	0010	1720	2003	Jl. Stadion 58 A Pamekasan	Hak pakai	1985-12-17	-	Gedung Kantor DPPKA	Pembelian	129.000.000,00
2	Tanah	01.01.13.13.08	0013	684	2009	Barurambat Kota	Hak pakai	2001-02-15	-	DPD Golkar	Pembelian	1.231.200.000,00
3	Tanah	01.01.13.13.08	0017	851	2010	Blumbungan Kec. Larangan	Hak pakai	1985-04-20	-	Pemandian eks. Belanda	Pembelian	75.000.000,00
4	Tanah	01.01.13.13.08	0021	3828	2011	Desa Ceguk Kec. Tlanakan Pamekasan	Hak pengelolaan	2011-12-31	-	-	Pembelian	302.412.000,00
5	Tanah	01.01.13.13.08	0022	579	2011	Desa Ceguk Kec. Tlanakan Pamekasan	Hak pengelolaan	2011-12-31	-	-	Pembelian	67.048.000,00
6	Tanah	01.01.13.13.08	0023	1661	2011	Desa Ceguk Kec. Tlanakan Pamekasan	Hak pengelolaan	2011-12-31	-	-	Pembelian	113.778.500,00
7	Tanah	01.01.13.13.08	0024	719	2011	Desa Ceguk Kec. Tlanakan Pamekasan	Hak pengelolaan	2011-12-31	-	-	Pembelian	64.350.500,00
8	Tanah	01.01.13.13.08	0025	738	2011	Desa Ceguk Kec. Tlanakan Pamekasan	Hak pengelolaan	2011-12-31	-	-	Pembelian	66.051.000,00

9	Tanah	01.01.13.13.08	0027	2315	2004	jl. Kesehatan 3 - 5 Pamekasan	Hak pakai	2003-12-31	-	Ex RSUD	Pembelian	2.315.000.000,00
10	Tanah	01.01.13.13.08	0028	6540	2004	jl. Kesehatan 3 - 5 Pamekasan	Hak pakai	2003-12-31	-	Ex RSUD	Pembelian	6.540.000.000,00
11	Tanah	01.01.13.13.08	001537	1552	2018	DSN DULANG DS CEGUK KEC TLANAKAN KAB PAMEKASAN	Hak pengelolaan	2018-10-05	-	TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA (MUNJIA)	Pembelian	407.560.654,02
12	Tanah	01.01.13.13.08	001536	803	2018	DSN DULANG DS CEGUK KEC TLANAKAN KAB PAMEKASAN	Hak pengelolaan	2018-01-02	-	TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA (MUHARI)	Pembelian	202.084.345,98
13	Tanah	01.01.13.13.08	001538	2700	2018	DSN TENGAH RT 02 RW 03 DESA BRANTA TINGGI KEC TLANAKAN	Hak pengelolaan	2018-11-27	-	PENGADAAN TANAH (RTH) taman gerbang salam	Pembelian	4.178.750.000,00
14	Tanah	01.01.13.13.08	001539	553	2018	DSN LEBI DS CEGUK KEC TLANAKAN KAB PAMEKASAN	Hak pengelolaan	2018-12-14	-	TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA (BAGUS IRAWAN NIZAR)	Pembelian	302.901.447,91
15	Tanah	01.01.13.13.08	001540	705	2018	DSN BARAT DS CEGUK KEC TLANAKAN KAB PAMEKASAN	Hak pengelolaan	2018-12-14	-	TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA (SUMRIYEH)	Pembelian	230.546.849,07
16	Tanah	01.01.13.13.08	001541	1086	2018	DSN DULANG DS CEGUK KEC TLANAKAN KAB PAMEKASAN	Hak pengelolaan	2018-12-14	-	TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA (SANITRO)	Pembelian	340.413.703,02
TOTAL											16.566.097.000,00	

Memperhatikan data diatas terlihat bahwa aset tanah yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan memiliki status tanah hak pakai. Selama ini aset dalam bentuk tanah yang ada di BKD Kabupaten Pamekasan digunakan sebagai gedung atau kantor DPKAA, DPD Golkar, eks RSUD dan sebagainya. Aset tanah ini dilengkapi dengan sertifikat sejak tahun 1985 sampai dengan 2018. Sedangkan asal usul pemilikan aset tanah ini semuanya diperoleh dari hasil pembelian dengan berbagai harga dalam kisaran antara Rp. 64.350.500,- sampai dengan Rp. 6.540.000.000,-. Selajutnya dari data diatas juga terlihat bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama ini yakni sejak tahun pengadaan 2003 sampai dengan 2018 untuk pembelian tanah tersebut tercatat sebesar Rp. 16.566.097.000,-.

Apabila memperhatikan data terkait aset yang ada di Badan Keuangan Daerah tersebut terlihat beberapa hal antara lain; (a) bahwa selama ini telah dilakukan pencatatan aset sesuai dengan jenis aset, tahun pengadaan, ukuran, harga, penggunaan, status sertifikat serta lokasi aset yang ada; (b) Aset yang ada seluruhnya dalam status hak pakai dengan lokasi yang tersentralistik pada pusat Kabupaten Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan serta Kecamatan Larangan; (c). Menurut catatan yang ada ditemukan adanya aset yang belum dimanfaatkan secara optimal sebab terdapat beberapa aset tanah yang belum dimanfaatkan seperti yang ditemukan di Desa Ceguk kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

2. Aset yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Aktivitas identifikasi dan inventarisasi aset atau barang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap serta mutakhir terkait dengan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan kegiatan inventarisasi maka akan diperoleh informasi arat data yang memperlihatkan seluruh kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada di SKPD Dinas Perindustrian dan perdagangan. Melalui aktivitas inventarisasi secara leng, teratur dan berkelanjutan maka diharapkan mampu mendukung aktivitas berikutnya

terkait dengan pengelolaan aset daerah antara lain; (a). Melakukan langkah pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang yang dimiliki; (b). untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing dalam rangka pendukung proses pembangunan; serta (c). Mampu menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. Sebagaimana dipahami bahwa barang inventaris merupakan seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan idelanya dicatat serta didaftar dalam buku inventaris aset daerah.

Apabila memperhatikan data yang ada terlihat bahwa aset yang ada dan dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan telah tercatat sesuai dengan nama barang, tahun pengadaan, status kepemilikan, penggunaan, asal usul serta besaran harga ketika melakukan pengadaan aset. Terkait dengan jenis aset atau barang yang ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki aset dalam bentuk tanah bangunan dan tanah kosong. Sebagian besar aset yang ada dalam bentuk tanah bangunan pasar . Meski demikian menurut catatan yang ada juga ditemukan ada aset dalam bentuk tanah bangunan rumah negara, tanah bangunan kantor pemerintah dan ruko serta tanah bangunan gedung.

Terkait dengan ukuran atau luas tanah yang dimiliki SKPD ini relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran 278 meter persegi dalam bentuk tanah bangunan rumah negara sampai dengan yang paling luas yakni 32308 meter persegi dalam bentuk tanah bangunan pasar. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah bangunan ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 1980 sampai dengan 2018 yakni dalam bentuk tanah bangunan pasar Pakong. Aset yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Menurut catatan yang ada aset yang ada mayoritas dalam bentuk tanah bangunan pasar yang ada di berbagai Kecamatan di Kabupaten Pamekasan antara lain di Kecamatan Pamekasan, Pakong, Waru, Pasean, pegantenan, Polagan, Blumbungan, Galis, Batumarmar, Larangan, Palengaan, dan Kecamatan Proppo. Aset dalam bentuk tanah bangunan pasar terlihat tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Ketersediaan aset

ini sangat penting dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi produktif masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Bagi masyarakat Pamekasan keberadaan infrastruktur publik dalam bentuk pasar sangat dibutuhkan masyarakat sebagai media yang mampu memberikan fasilitas dalam menggerakkan kondisi perekonomian masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan.

Tabel IV.2
Aset yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUA S UN PENG DAAN (m2)	TAH UN PENG DAAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAA N	ASAL USUL	HARGA (Rp.)
		KODE BARANG	REGIST ER				HAK	SERTIFIKAT				
				TANGGA L	NOMO R							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	01.01.11.01.04	009	278	1980	Jl. Ronggosukowati 13 Pamekasan	Hak pakai	1980-08- 25	Sertifikat No. 2	Rumah Dinas	Pembelian	125.100.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0010	970	1981	Jl. Jokotole 199 Pamekasan	Hak pakai	1981-06- 29	Sertifikat No. 3	Kantor	Pembelian	970.000.000,00
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0011	712	2010	Jl. Ronggosukowati 14 Pamekasan	Hak pakai	2010-05- 08	Sertifikat No. 18	Kantor	Pembelian	320.400.000,00
4	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0015	1935	2001	Barurambat Kota Pamekasan	Hak pakai	2001-02- 15	Sertifikat No. 63	Tanah Untuk Gedung Pasar Batik	Pembelian	3.870.000.000,00
5	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0019	32308	2003	JL. PINTU GERBANG	Hak	2003-12-	-	PASAR 17	Pembelian	2.584.640.000,00

					3	PAMEKASAN	pakai	31		AGUSTUS		
6	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0020	4500	200 3	KEC. GALIS	Hak pakai	2003-12- 31	Sertifikat No. 1	PASAR	Pembelian	67.500.000,00
7	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0021	5253	200 3	JL. TEJA PAMEKASAN	Hak pakai	2003-12- 31	-	PASAR	Pembelian	105.060.000,00
8	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0022	19344	200 3	JL. RONGGOSUKOWATI PAMEKASAN	Hak pakai	0000-00- 00	-	PASAR KOLPAJUNG	Pembelian	1.450.800.000,00
9	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0023	3410	198 6	KEC. PAKONG	Hak pakai	1986-08- 17	Sertifikat No. 13	PASAR PAKONG	Pembelian	572.320.000,00
10	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0024	665	198 5	JL. DIPONEGORO KEC. PAMEKASAN	Hak pakai	1985-12- 17	Sertifikat No. 31	PASAR SORE	Pembelian	2.480.000.000,00
11	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0025	379	200 3	JL. WARU - PASEAN	Hak pakai	2003-12- 31	-	PASAR	Pembelian	13.644.000,00
12	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0026	970	198 7	WARU BARAT	Hak pakai	1987-10- 15	Sertifikat No. 10	PASAR	Pembelian	32.215.000,00
13	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0027	7460	198 7	WARU BARAT	Hak pakai	1987-09- 18	Sertifikat No. 9	PASAR WARU	Pembelian	439.500.000,00

14	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0028	7967	198	POLAGAN	Hak pakai	1985-04-23	Sertifikat No. 6	PASAR HEWAN KEPPPO	Pembelian	92.250.000,00
15	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0029	4180	198	BLUMBUNGAN	Hak pakai	1985-04-20	Sertifikat No. 5	PASAR BLUMBUNGAN	Pembelian	70.000.000,00
16	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	01.01.11.02.02	0031	2081	200	JL. KABUPATEN	Hak pakai	2003-12-31	Sertifikat No. 54	PERTOKOAN CLM	Pembelian	7.145.000.000,00
17	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	01.01.11.02.02	0035	1679	200	Jl. R. Abd. Aziz Kec. Pamekasan	Hak pakai	2009-12-31	-	Pertokoan Eks. Pasar Gurem	Pembelian	478.515.000,00
18	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0039	3505	199	Desa Pegantenan Kec. Pegantenan	Hak pakai	1994-06-12	Sertifikat No. 11	Pasar Desa Pegantenanan	Pembelian	1.051.500.000,00
19	Tanah Kosong	01.01.11.05.00	0040	2795	199	Desa Pegantenan Kec. Pegantenan	Hak pakai	1994-02-11	Sertifikat No. 10	Tanah Kosong	Pembelian	559.000.000,00
20	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0041	619	200	Desa Laden Kec. Pamekasan	Hak pakai	2007-11-27	Sertifikat No. 57	Pasar Sekar Putih/Gurem	Pembelian	185.700.000,00
21	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.11.02.07	0042	1148	200	Bugih/Jl. Pintu Gerbang Pamekasan	Hak pakai	2001-02-15	Sertifikat No. 30	Eks. Terminal Bugih	Pembelian	1.836.800.000,00

22	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0043	2091	2007	Desa Polagan Kecamatan Galis	Hak pakai	2007-04-24	Sertifikat No. 10	Pasar Keppo (tambahan tnh kosong)	Pembelian	522.750.000,00
23	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0047	2432	1986	Batu Bintang Kec. Batumarmar	Hak pakai	1986-09-23	Sertifikat No. 3	Pasar Hewan	Pembelian	255.000.000,00
24	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0048	3155	1986	Batu Bintang Kec. Batumarmar	Hak pakai	1986-09-23	Sertifikat No. 5	Pasar Polowijo	Pembelian	321.000.000,00
25	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0049	7175	1985	Duko Timur Kec. Larangan	Hak pakai	1985-04-24	Sertifikat No. 2	Pasar Polowijo	Pembelian	300.000.000,00
26	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0053	10420	1981	Palengaan Laok	Hak pakai	1981-12-24	Sertifikat No. 4	Pasar Palengaan	Pembelian	100.000.000,00
27	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0054	3314	2001	Proppo	Hak pakai	2001-10-08	Sertifikat No. 154	Pasar Proppo	Pembelian	46.396.000,00
28	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0055	1894	2011	Proppo	Hak pakai	2011-07-12	Sertifikat No. 7	Pasar Proppo	Pembelian	26.516.000,00
29	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0056	1658	2013	Jl. Diponegoro; Kec. Pamekasan	Hak pakai	2013-08-02	Sertifikat No. 24	Pasar Sore Sebelah Timur	Pembelian	79.584.000,00

	TANAH UNTUK				198		Hak	1985-04-					
30	BANGUNAN GEDUNG	01.01.11.00.00	1	0	5	DESA WARU	milik	24	S.591	P.1	Pembelian	123.750.000,00	
31	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	0001	1139	200	Blumbungan	Hak	1985-04-	Sertifikat	PASAR DUWAK	Pembelian	58.275.000,00	
					3		pakai	20	No. 6	TENGGI			
32	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	001535	1429	201	PASAR PAKONG	Hak	0000-00-		PERLUASAN PASAR	Pembelian	559.466.500,00	
					8		pakai	00	-	TRADISIONAL			
TOTAL												26.842.681.500,00	

Terkait dengan ukuran atau luas tanah yang dimiliki SKPD ini relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran 278 meter persegi dalam bentuk tanah bangunan rumah negara sampai dengan yang paling luas yakni 32308 meter persegi dalam bentuk tanah bangunan pasar. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah bangunan ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 1980 sampai dengan 2018 yakni dalam bentuk tanah bangunan pasar Pakong. Aset yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Menurut catatan yang ada aset yang ada mayoritas dalam bentuk tanah bangunan pasar yang ada di berbagai Kecamatan di Kabupaten Pamekasan antara lain di Kecamatan Pamekasan, Pakong, Waru, Pasean, pegantenan, Polagan, Blumbungan, Galis, Batumarmar, Larangan, Palangaan, dan Kecamatan Proppo. Aset dalam bentuk tanah bangunan pasar terlihat tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Ketersediaan aset ini sangat penting dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi produktif masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Bagi masyarakat Pamekasan keberadaan infrastruktur publik dalam bentuk pasar sangat dibutuhkan sebagai media yang diharapkan mampu menggerakkan kondisi perekonomian masyarakat yang ada di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Faktanya sebagian besar aset yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan sebagai pasar baik perluasan pasar tradisional, pasar hewan, pertokoan, pasar polowijo dan pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat serta kebutuhan sekunder yang lainnya. Selain dalam bentuk pasar aset yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama ini juga digunakan sebagai rumah dinas, kantor dan pertokoan yang sesungguhnya memberikan manfaat bagi masyarakat Pamekasan dalam aktivitas ekonomi produktif yang ditekuninya.

3. Aset yang Dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2019 tercatat hanya satu jenis aset yakni tanah dengan ukuran atau luas tanah 436 meter persegi. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 2006 yang terletak di Kelurahan Barurrambat Kecamatan Kota. Menurut catatan yang ada aset

tersebut memiliki status tanah hak pakai dan saat ini digunakan sebagai gedung. Aset ini dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2006 seharga Rp. 192.150.000,-. Bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pamekasan ketersediaan aset ini sebenarnya sangat penting dalam rangka mendukung kegiatan penyediaan perumahan atau permukiman bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan secara keseluruhan. Sebagaimana dipahami bahwa perumahan atau pemukiman merupakan jenis kebutuhan utama yang harus dipenuhi selain kebutuhan pangan dan sandang. Bagi sebuah keluarga rumah atau papan yang nyaman dan aman merupakan jenis kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai media bagi mereka untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Rumah yang nyaman merupakan ruang bagi keluarga untuk melakukan sosialisasi serta mendidik anak-anak secara baik sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

Tabel IV.3
Aset yang Dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUA S (m2)	TAHUN PENGAD AAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)
		KODE BARANG	REGIST ER				HAK	SERTIFIKAT				
								TANGGAL	NOMOR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah	01.01.13.13.08	001 6	439	2006	Jl. Balaikambang No.25 Kel. Barurambat Kota	Hak pakai	2006-10- 03	Sertifikat No. 67 (AW 958466)	Bangunan Gedung	Pembelian	192.150.000,00
TOTAL												192.150.000,00

Memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2019 aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tercatat hanya berupa tanah dengan ukuran kurang dari 1000 meter persegi. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 2006 dengan status hak pakai dengan sertifikat tertanggal 03-10-2006. Lokasinya di jalan Balaikambang No 25 kelurahan Barurambat Kota. Meski selama ini aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman masih terbatas yakni hanya dalam bentuk aset tanah yang diatasnya berdiri bangunan gedung tetapi dalam praktek dinas ini terlihat dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan tugas pokok dan dan fungsi yang diemban dan mendukung program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pamekasan.

4. Aset Barang dan Tanah yang Dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Realitas yang ada menunjukkan bahwa umumnya Pemerintah Daerah memiliki banyak barang milik aset atau kekayaan yang berada dibawah penguasaannya. Tetapi kadang cukup banyak aset yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal dalam sesuai dengan penggunaan yang diharapkan dalam institusi. Pemanfaatan aset yang dimiliki daerah sebenarnya sangat strategis dan penting terutama dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selain itu juga pemanfaatan aset secara optimal juga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat serta menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan.

Secara teoritik sesungguhnya aset atau kekayaan milik daerah, dapat dimanfaatkan diguna-usahakan secara optimal, dengan berbagai tujuan antara lain; (a). agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya biaya dikaitkan dengan segi pemeliharaan dan pengamanannya, terutama untuk mencegah kemungkinan penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab; (b). apabila aset daerah tersebut dimanfaatkan secara optimal akan dapat meningkatkan atau menciptakan sumber PAD dan (c). Pemanfaatan aset daerah secara maksimal juga dapat menambah peluang

penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menciptakan sumber pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu aset daerah seharusnya bisa ditingkatkan pemanfaatannya sehingga dapat memberikan nilai guna dan memberikan kemungkinan untuk menjadi sumber pendapatan daerah. Pemanfaatan aset adalah pendayagunaan barang milik daerah/ aset yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, akan dimanfaatkan secara optimal oleh pihak ketiga atau oleh instansi lain dalam bentuk sewa, pinjam pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dan Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana tertuang dalam pasal 1, pasal 31 s/d 44 Permendagri No. 17 tahun 2007.

Selanjutnya apabila memperhatikan aset dan barang yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terlihat selama ini aset yang dimiliki seluruhnya berupa tanah. Aset atau kekayaan yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan digunakan untuk berbagai kepentingan antara lain kebun, kantor, bangunan, lahan pertanian dan bangunan yang seluruhnya digunakan sebagai fasilitas dan sarana pendukung bagu tugas operasional keseharian SKPD. Bentuk aset yang dimiliki seluruhnya dalam bentuk tanah dengan ukuran luas yang beragam. Menurut catatan yang ada aset yang dimiliki dinas ini dalam bentuk tanah dengan berbagai ukuran mulai dari 1440 meter persegi sampai yang paling luas berukuran 74.670 meter persegi. Secara lokalistik berbagai tanah aset tersebut terletak di berbagai wilayah antara lain; di Kecamatan Proppo, Galis, Pakong, Pademawu dan Kecamatan Pasean.

Tabel IV.4
Aset dan Barang yang Dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUA S (m2)	TAHU N PENGAD AAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH		PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)	KETERANGAN	
		KODE BARANG	REGIST ER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGGAL					NOMOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah	01.01.13.13.08	009	25000	1986-12-19	Desa Gugul	Hak pakai	1986-12-19	Sertifikat No. 1	Kebun	Pembelian	500.000.000,00	-
2	Tanah	01.01.13.13.08	0011	7190	1987-09-21	Ds Toket Kec Proppo	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 5	Kebun	Pembelian	179.750.000,00	-
3	Tanah	01.01.13.13.08	0012	2810	1987-09-21	Ds Toket Kec Proppo	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 4	Kebun	Pembelian	70.250.000,00	-
4	Tanah	01.01.13.13.08	0013	1440	1986-12-19	Jln Teja 131	Hak pakai	1986-12-19	Sertifikat No. 9	Kantor	Pembelian	270.000.000,00	-

5	Tanah	01.01.13.13.08	009	9770	198 8	Ds. Lenteng Kec. Proppo	Hak pakai	1988-09- 24	Sertifikat No. 2 (B 2902602)	Lahan Pertanian dan Bangunan	Pembelian	341.950.000,00	BPP, Rumah Dinas dan Lahan Sawah
6	Tanah	01.01.13.13.08	0010	8580	198 9	Ds. Billaan Kec. Proppo	Hak pakai	1989-09- 26	Sertifikat No. 3 (B 4899689)	Lahan Pertanian	Pembelian	214.500.000,00	Tanaman Mangga
7	Tanah	01.01.13.13.08	0011	11210	200 3	Ds. Galis Kec. Galis	Hak pakai	2003-01- 17	Sertifikat No. 4 (AB.340683)	Bangunan	Pembelian	140.125.000,00	Kantor BPP
8	Tanah	01.01.13.13.08	0012	21600	198 6	Ds. Polagan Kec. Galis	Hak pakai	1986-01- 04	Sertifikat No. 5 (B.1711659)	Pertanian	Pembelian	648.000.000,00	-
9	Tanah	01.01.13.13.08	0013	10540	200 2	Jl. Raya Pakong Kec. Pakong	Hak pakai	2002-05- 27	Sertifikat No. 6 (4118144)	Lahan Pertanian dan Bangunan	Pembelian	1.250.000.000,00	Kantor BPP dan Lahan Pertanian
10	Tanah	01.01.13.13.08	0014	9110	200 6	Ds. Lebbek Kec. Pakong	Hak pakai	2006-10- 03	Sertifikat No. 2 (958395)	Lahan Pertanian	Pembelian	91.100.000,00	-
11	Tanah	01.01.13.13.08	0015	1225	199 1	Jl. Raya Sumedangan Kel. Kanginan	Hak pakai	1991-01- 17	Sertifikat No. 1 (AB 340684)	Lahan Pertanian	Pembelian	21.437.500,00	Tanaman Padi
12	Tanah	01.01.13.13.08	0017	24570	198 6	Ds. Sumedangan Kec. Pademawu	Hak pakai	1986-02- 05	Sertifikat No. 2 (B 1711661)	Lahan Pertanian dan Bangunan	Pembelian	1.105.650.000,00	Kantor BPP dan Lahan Pertanian
13	Tanah	01.01.13.13.08	0018	3570	200	Ds. Pegantenan Kec.	Hak	2003-07-	Sertifikat No. 3	Lahan Pertanian	Pembelian	89.250.000,00	-

					3	Pegantenan	pakai	29	(6490904)				
14	Tanah	01.01.13.13.08	0019	10430	1971-07-29	Ds. Pegantenan Kec. Pegantenan	Hak pakai	1971-07-29	Sertifikat No. 2 (6490903)	Lahan Pertanian	Pembelian	260.750.000,00	-
15	Tanah	01.01.13.13.08	0020	74670	2003-07-29	Ds. Bulangan Barat Kec. Pegantenan	Hak pakai	2003-07-29	Sertifikat No. 1 (6490901)	Lahan Pertanian	Pembelian	2.240.100.000,00	-
16	Tanah	01.01.13.13.08	0021	6242	2009-07-01	Ds. Batu Kerbuy Kec. Pasean	Hak pakai	2009-07-01	Sertifikat No. 07 (BB 562516)	Lahan Pertanian dan Bangunan	Pembelian	624.200.000,00	Kantor BPP dan Lahan Pertanian
TOTAL												8.047.062.500,00	

Memperhatikan data diatas terlihat bahwa aset tanah yang ada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan memiliki status tanah hak pakai. Selama ini aset dalam bentuk tanah yang ada digunakan sebagai kebun, lahan pertanian, gedung atau kantor dan sebagainya. Aset tanah ini dilengkapi dengan sertifikat sejak tahun 1971 sampai dengan 2009. Sedangkan asal usul pemilikan aset tanah ini semuanya diperoleh dari hasil pembelian dengan berbagai harga dalam kisaran antara Rp. 21.437.500,- sampai dengan Rp. 2.240.100.000,-. Selajutnya dari data diatas juga terlihat bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama ini yakni sejak tahun pengadaan 1971 sampai dengan 2009 untuk pembelian tanah tersebut tercatat sebesar Rp. 8.047.062.500,00,-.

Apabila memperhatikan data terkait aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tersebut terlihat bahwa sebagian besar aset dimanfaatkan untuk kebun dan lahan pertanian sesuai dengan bidang atau dinas yang memilikinya. Di samping itu selama ini juga telah dilakukan pencatatan aset sesuai jenis aset, tahun pengadaan, ukuran, harga, penggunaan, status sertifikat serta lokasi aset yang ada. Aset yang ada juga dalam status hak pakai dengan lokasi yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dalam praktek aset yang dimiliki juga dimanfaatkan untuk rumah dinas dan kantor BPP yang sangat penting bagi upaya memberikan penyuluhan dan penyebaran informasi terkait dengan budidaya tanaman hortikultura serta berbagai hal menyangkut sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan.

5. Aset yang Dimiliki Dinas Pendidikan

Era otonomi daerah telah memberikan konsekuensi dalam soal kewenangan di mana dalam proses pembangunan termasuk di sektor pendidikan peran pemerintah pusat semakin kecil, sedangkan peran pemerintah daerah semakin kuat. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya sehingga pemerintah daerah juga harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Diakui bahwa salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah adalah melalui

sektor pajak. Namun selain mengandalkan sektor pajak langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mendapatkan penerimaan finansial adalah dengan mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki. Artinya dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya dapat mengoptimalkan pada potensi pajak, tetapi yang juga strategis untuk dilakukan adalah mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah daerah saat ini sehingga dapat dioptimalkan manfaatnya sekaligus sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Manajemen aset sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah.

Diakui bahwa selama ini dalam proses pengelolaan aset daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih dihadapkan pada berbagai kendala salah satunya menyangkut terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Oleh sebab itu ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan profesional perlu mendapatkan perhatian sebab pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan memiliki keterkaitan dengan opini yang diberikan oleh BPK terhadap pemerintah daerah atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan. Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan untuk mengatasi kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga mampu menampilkan kinerja pengelolaan aset daerah secara maksimal dan memperoleh penilaian yang positif dan wajar tanpa pengecualian dari BPK. Untuk itu manajemen aset daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendanaan operasional pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah perlu diupayakan. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah juga perlu dilakukan untuk mempermudah proses pengelolaan aset termasuk upaya optimalisasi penggunaannya.

Apabila memperhatikan data tentang aset daerah yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa sebagian besar aset yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam bentuk tanah dan gedung baik untuk kantor, gudang maupun gedung sekolah yang digunakan untuk memfasilitasi anak usia sekolah dalam menempuh pendidikan baik di tingkat Sekolah Dasar (SD)

maupun SLTP. Aset dalam bentuk bangunan atau gedung, kantor dan sekolah SD dan SLTP tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Menurut catatan yang ada sampai tahun terakhir yakni tahun 2018 jumlah aset dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan mencapai 445 aset. Banyaknya aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan baik dalam bentuk tanah maupun kantor dan gedung sekolah sesungguhnya merefleksikan perhatian pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Pamekasan. Di samping itu banyaknya fasilitas pendidikan formal baik di tingkat SD maupun SLTP di Kabupaten Pamekasan merupakan perwujudan implementasi atas amanah sesuai Undang-Undang Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu pendidikan juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Selama ini pembangunan sektor pendidikan melalui penyediaan infrastruktur fisik seperti bangunan atau gedung sekolah telah banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan sekaligus sebagai aset yang dimiliki pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan atas dasar kesadaran bahwa melalui pembangunan sektor pendidikan akan dapat meningkatkan kapasitas dan terciptanya insan yang cerdas serta kompetitif baik dalam tataran masyarakat lokal dan global. Oleh sebab itu untuk menguatkan pelayanan, dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi optimal agar mutu pendidikan menjadi relevan dan berdaya saing tinggi.

Selanjutnya terkait dengan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam sektor pendidikan sampai saat ini dalam proses pengelolaan telah dilakukan pencatatan yang menyangkut nama atau jenis barang, penomoran, ukuran, status tanah, penggunaan, asal usul dan harga. Meski demikian dari aspek

tahun pengadaan aset terlihat masih ada beberapa jenis aset atau barang milik daerah yang belum teridentifikasi tahun pengadaannya. Selain itu tanggal sertifikat untuk beberapa aset yang ada juga masih belum tercantumkan.

Tabel IV.5
Aset yang Dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (m2)	TAHUN PENGADAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTRER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah	01.01.13.13.08	009	1100	0	JL. RAYA PONTEH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED.P&K	Pembelian	22.000.000,00	KA. CABDIN P & K KEC. GALIS
2	Tanah	01.01.13.13.08	0010	489	0	DESA KADUR	Hak pakai	2017-01-01	6 / BK 486665	GED.P&K	Pembelian	16.000.000,00	KA. CABDIN P & K KEC. KADUR
3	Tanah	01.01.13.13.08	0011	288	0	DESA PATO'AN LAOK	Hak pakai	0000-00-00	-	KANTOR CAB. DINAS	Pembelian	8.640.000,00	KA. CABDIN P & K KEC. PALENGAAN
4	Tanah	01.01.13.13.08	0012	1100	0	JL PURBA 52	Hak pakai	0000-00-00	-	KANTOR CAB. DINAS	Pembelian	275.000.000,00	KA. CABDIN P & K KEC. PAMEKASAN
5	Tanah	01.01.13.13.08	0013	54	0	JL. SEGARA	Hak pakai	0000-00-00	-	KANTOR	Pembelian	21.600.000,00	KA. DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

6	Tanah	01.01.13.13.08	0014	1350	0	JL. RAYA PROPPPO	Hak pakai	0000-00-00	-		KANTOR	Pembelian	270.000.000,00	KA. DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
7	Tanah	01.01.13.13.08	0015	424	0	JL. RAYA PALENGAAN	Hak pakai	0000-00-00	-		GUDANG	Pembelian	68.900.000,00	KA. DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
8	BANGUNAN GEDUNG	01.01.13.13.9	0016	1505	1981	DESA AKKOR	Hak pakai	1981-11-06	Sertifikat No. 1		GED. SD	Pembelian	27.360.000,00	KEPSEK. SD AKKOR I
9	Tanah	01.01.13.13.08	0017	1500	0	DESA AMBAT	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	52.500.000,00	KEPSEK. SD AMBAT II
10	Tanah	01.01.13.13.08	0018	1500	0	DESA AMBENDER	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	26.250.000,00	KEPSEK. SD AMBENDER I
11	Tanah	01.01.13.13.08	0019	1500	0	DS. PANCOR DS. AMBENDER	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	30.000.000,00	KEPSEK. SD AMBENDER II
12	Tanah	01.01.13.13.08	0020	1500	0	DS. AMBENDER	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	15.000.000,00	KEPSEK. SD AMBENDER III
13	Tanah	01.01.13.13.08	0021	1900	0	DESA AMBENDER	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	55.000.000,00	KEPSEK. SD AMBENDER IV
14	Tanah	01.01.13.13.08	0022	1563	1987	DESA ANGSANAH	Hak pakai	1987-03-30	Sertifikat No. 1		GED. SD	Pembelian	31.260.000,00	KEPSEK. SD ANGSANAH I
15	Tanah	01.01.13.13.08	0023	643	0	DESA ANGSANAH	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	1.929.000,00	KEPSEK. SD ANGSANAH II

								00					
16	Tanah	01.01.13.13.08	0024	3500	0	JL. RAYA BADDURIH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	43.750.000,00	KEPSEK. SD BADDURIH
17	Tanah	01.01.13.13.08	0025	1699	1981	DESA BAJANG	Hak pakai	1981-11-06	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	16.000.000,00	KEPSEK. SD BAJANG II
18	Tanah	01.01.13.13.08	0026	1480	0	DESA BAJUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	66.600.000,00	KEPSEK. SD BAJUR II
19	Tanah	01.01.13.13.08	0027	1502	1981	DESA BAJUR	Hak pakai	1981-01-06	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	11.250.000,00	KEPSEK. SD BAJUR III
20	Tanah	01.01.13.13.08	0028	1116	0	JL.RAYA MANGGAR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	47.430.000,00	KEPSEK. SD BANDARAN I
21	Tanah	01.01.13.13.08	0029	1200	0	JL. RAYA MANGAR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	45.000.000,00	KEPSEK. SD BANDARAN I
22	Tanah	01.01.13.13.08	0030	1525	0	DS. BANDARAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	57.950.000,00	KEPSEK. SD BANDARAN II
23	Tanah	01.01.13.13.08	0031	1579	0	DS.BANDARAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	60.002.000,00	KEPSEK. SD BANDARAN III
24	Tanah	01.01.13.13.08	0032	1000	0	DSN. SUMBER BALANG DS. BANDUNGAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	7.500.000,00	KEPSEK. SD BANDUNGAN I

25	Tanah	01.01.13.13.08	0033	1523	1989	DS. BANDUNGAN	Hak pakai	1989-09-22	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	10.170.000,00	KEPSEK. SD BANDUNGAN II
26	Tanah	01.01.13.13.08	0034	887	1991	DESA BANGKES	Hak pakai	1991-09-17	Sertifikat No. 3	GED. SD	Pembelian	54.275.000,00	KEPSEK. SD BANGKES I
27	Tanah	01.01.13.13.08	0035	681	0	JL. RAYA BANGKES	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	5.107.500,00	KEPSEK. SD BANGKES II
28	Tanah	01.01.13.13.08	0036	846	0	DESA BANGKES	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	29.610.000,00	KEPSEK. SD BANGKES III
29	Tanah	01.01.13.13.08	0037	470	0	DESA BANGKES	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	3.525.000,00	KEPSEK. SD BANGKES VI
30	Tanah	01.01.13.13.08	0038	1390	1987	DESA BANGKES	Hak pakai	1987-07-15	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	63.855.000,00	KEPSEK. SD BANGKES IV
31	Tanah	01.01.13.13.08	0039	540	0	DESA BANGSEREH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	8.100.000,00	KEPSEK. SD BANGSEREH I
32	Tanah	01.01.13.13.08	0040	1683	1985	DESA BANYU PELLE	Hak pakai	1985-04-22	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	25.725.000,00	KEPSEK. SD BANYU PELLE II
33	Tanah	01.01.13.13.08	0041	887	0	JL. KESEHATAN 50	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	1.300.500.000,00	KEPSEK. SD BARURAMBAT KOTA I

34	Tanah	01.01.13.13.08	0042	1865	2001	JL JOKOTOLE	Hak pakai	2001-01-30	Sertifikat No. 64	GED. SD	Pembelian	2.144.500.000,00	KEPSEK. SD BARURAMBAT KOTA III
35	Tanah	01.01.13.13.08	0043	924	0	JL JOKOTOLE II/5	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	1.370.000.000,00	KEPSEK. SD BARURAMBAT KOTA IV
36	Tanah	01.01.13.13.08	0044	1200	0	JL. PURBA NO. 84	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	900.000.000,00	KEPSEK. SD BARURAMBAT KOTA V
37	Tanah	01.01.13.13.08	0045	1200	0	JL. PURBA NO 86	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	900.000.000,00	KEPSEK. SD BARURAMBAT KOTA VII
38	Tanah	01.01.13.13.08	0046	1160	0	JL. KH WAHID HASYIM 13	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	145.000.000,00	KEPSEK. SD BARURAMBAT TIMUR I
39	Tanah	01.01.13.13.08	0047	1505	1981	JL. VETERAN VIII/12	Hak pakai	1981-11-06	Sertifikat No. 10	GED. SD	Pembelian	54.000.000,00	KEPSEK. SD BARURAMBAT TIMUR II
40	Tanah	01.01.13.13.08	0048	1539	1985	DESA BATU BINTANG	Hak pakai	1985-04-28	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	39.125.000,00	KEPSEK. SD BATU BINTANG II
41	Tanah	01.01.13.13.08	0049	3230	0	DESA BATU BINTANG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	40.375.000,00	KEPSEK. SD BATU BINTANG IV
42	Tanah	01.01.13.13.08	0050	1570	0	DESA BATU BINTANG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	27.475.000,00	KEPSEK. SD BATU BINTANG V

43	Tanah	01.01.13.13.08	0051	1357	0	DESA BATU BINTANG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	16.612.500,00	KEPSEK. SD BATU BINTANG VII
44	Tanah	01.01.13.13.08	0052	2350	1981	DESA BATOKALANG	Hak pakai	1981-11-06	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	23.310.000,00	KEPSEK. SD BATOKALANG I
45	Tanah	01.01.13.13.08	0053	979	1987	JL.RAYA PASEAN	Hak pakai	1987-09-18	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	99.400.000,00	KEPSEK. SD BATUKERBUY I
46	Tanah	01.01.13.13.08	0054	840	0	DESA BATU KERBUY	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	21.000.000,00	KEPSEK. SD BATUKERBUY IV
47	Tanah	01.01.13.13.08	0055	1200	0	DESA BATU KERBUY	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	27.000.000,00	KEPSEK. SD BATUKERBUY V
48	Tanah	01.01.13.13.08	0056	2285	2001	DESA BETTET	Hak pakai	2001-05-18	Sertifikat No. 5	GED. SD	Pembelian	37.500.000,00	KEPSEK. SD BETTET I
49	Tanah	01.01.13.13.08	0057	1864	0	DESA BICORONG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	111.840.000,00	KEPSEK. SD BICORONG I
50	Tanah	01.01.13.13.08	0058	2278	0	JL. RAYA PASEAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	85.425.000,00	KEPSEK. SD BINDANG II
51	Tanah	01.01.13.13.08	0060	1300	0	DESA BLABAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	29.250.000,00	KEPSEK. SD BLABAN II

52	Tanah	01.01.13.13.08	0061	1246	0	KMP LONPAO	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	77.875.000,00	KEPSEK. SD BLABAN III
53	Tanah	01.01.13.13.08	0062	4410	0	DESA BLABAN	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	17.640.000,00	KEPSEK. SD BLABAN IV
54	Tanah	01.01.13.13.08	0063	2420	1981	DESA BLUMBUNGAN	Hak pakai	1981-01-26	Sertifikat No. 3		GED. SD	Pembelian	52.650.000,00	KEPSEK. SD BLUMBUNGAN I
55	Tanah	01.01.13.13.08	0064	1760	0	DESA BLUMBUNGAN	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	100.000.000,00	KEPSEK. SD BLUMBUNGAN II
56	Tanah	01.01.13.13.08	0065	1555	1987	DESA BLUMBUNGAN	Hak pakai	1987-01-26	Sertifikat No. 2		GED. SD	Pembelian	33.120.000,00	KEPSEK. SD BLUMBUNGAN III
57	Tanah	01.01.13.13.08	0066	1167	2006	DESA BLUMBUNGAN	Hak pakai	2006-07-10	Sertifikat No. 16		GED. SD	Pembelian	20.800.000,00	KEPSEK. SD BLUMBUNGAN IV
58	Tanah	01.01.13.13.08	0067	781	1986	DESA BLUMBUNGAN	Hak pakai	1986-09-28	Sertifikat No. 7		GED. SD	Pembelian	20.480.000,00	KEPSEK. SD BLUMBUNGAN V
59	Tanah	01.01.13.13.08	0068	1167	2006	DESA BLUMBUNGAN	Hak pakai	2006-07-10	Sertifikat No. 16		GED. SD	Pembelian	19.250.000,00	KEPSEK. SD BLUMBUNGAN VI
60	Tanah	01.01.13.13.08	0069	1728	1981	DESA BRANTA PESISIR	Hak pakai	1981-08-13	Sertifikat No. 5		GED. SD	Pembelian	309.690.000,00	KEPSEK. SD BRANTA PESISIR I
61	Tanah	01.01.13.13.08	0070	1500	0	DESA BRANTA TINGGI	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	56.250.000,00	KEPSEK. SD BRANTA TINGGI I

								00					
62	Tanah	01.01.13.13.08	0071	386	0	DESA BUDDAGAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	14.475.000,00	KEPSEK. SD BUDDAGAN I
63	Tanah	01.01.13.13.08	0072	756	0	DESA BUDDAGAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	151.200.000,00	KEPSEK. SD BUDDAGAN I
64	Tanah	01.01.13.13.08	0073	1000	0	DESA BUDDAGAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	37.500.000,00	KEPSEK. SD BUDDAGAN II
65	Tanah	01.01.13.13.08	0074	3130	0	JL DIRGAHAYU 6	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	391.250.000,00	KEPSEK. SD BUGIH I
66	Tanah	01.01.13.13.08	0075	2105	0	JL KABUPATEN 118	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	1.578.750.000,00	KEPSEK. SD BUGIH III
67	Tanah	01.01.13.13.08	0076	738	0	JL KABUPATEN NO 120	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	553.500.000,00	KEPSEK. SD BUGIH IV
68	Tanah	01.01.13.13.08	0077	704	0	JL PAMONG PRAJA 3	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	387.200.000,00	KEPSEK. SD BUGIH V
69	Tanah	01.01.13.13.08	0078	640	0	JL DIRGAHAYU	Lain-lain	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	14.400.000,00	KEPSEK. SD BUGIH VI
70	Tanah	01.01.13.13.08	0079	1147	0	JL PINTU GERBANG V/26	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	74.555.000,00	KEPSEK. SD BUGIH VII

71	Tanah	01.01.13.13.08	0080	1365	0	DESA BUJUR BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	20.475.000,00	KEPSEK. SD BUJUR BARAT I
72	Tanah	01.01.13.13.08	0081	728	0	DESA BUJUR BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	10.920.000,00	KEPSEK. SD BUJUR BARAT II
73	Tanah	01.01.13.13.08	0082	1147	1987	DESA BUJUR TENGAH	Hak pakai	1987-10-23	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	9.000.000,00	KEPSEK. SD BUJUR TENGAH I
74	Tanah	01.01.13.13.08	0083	210	0	DESA BUJUR TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	5.250.000,00	KEPSEK. SD BUJUR TIMUR I
75	Tanah	01.01.13.13.08	0084	1000	0	DESA BUJUR TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	22.500.000,00	KEPSEK. SD BUJUR TIMUR II
76	Tanah	01.01.13.13.08	0085	100	0	DESA TREBUNG OLOH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	2.250.000,00	KEPSEK. SD BUJUR TIMUR II
77	Tanah	01.01.13.13.08	0086	1170	0	DESA SONG LESONG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	35.100.000,00	KEPSEK. SD BUJUR TIMUR III
78	Tanah	01.01.13.13.08	0087	530	0	DESA BUJUR TIMUR	Lain-lain	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	11.925.000,00	KEPSEK. SD BUJUR TIMUR IV
79	Tanah	01.01.13.13.08	0088	1674	0	DS. BULANGAN BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	49.295.000,00	KEPSEK. SD BULANGAN BARAT

80	Tanah	01.01.13.13.08	0089	2028	0	DS. BULANGAN BRANTA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	12.168.000,00	KEPSEK. SD BULANGAN BRANTA
81	Tanah	01.01.13.13.08	0090	1718	2006	DESA BULANGAN HAJI	Hak pakai	2006-09-28	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	40.000.000,00	KEPSEK. SD BULANGAN HAJI I
82	Tanah	01.01.13.13.08	0091	1342	2006	DESA BULANGAN HAJI	Hak pakai	2006-09-28	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	26.840.000,00	KEPSEK. SD BULANGAN HAJI II
83	Tanah	01.01.13.13.08	0092	1500	0	DESA BULANGAN TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	33.750.000,00	KEPSEK. SD BULANGAN TIMUR I
84	Tanah	01.01.13.13.08	0093	2225	0	DESA BULANGAN TIMUR	Hak pakai	2016-08-16	1 / BK 486668	GED. SD	Pembelian	47.250.000,00	KEPSEK. SD BULANGAN TIMUR II
85	Tanah	01.01.13.13.08	0094	700	0	DESA BULAY KEC.GALIS	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	21.000.000,00	KEPSEK. SD BULAY I
86	Tanah	01.01.13.13.08	0095	1400	0	JL. RAYA BUNDER	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	42.000.000,00	KEPSEK. SD BUNDER I
87	Tanah	01.01.13.13.08	0096	920	0	DESA BUNDER	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	16.100.000,00	KEPSEK. SD BUNDER II
88	Tanah	01.01.13.13.08	0097	300	0	DESA BUNDER	Lain-lain	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	6.750.000,00	KEPSEK. SD BUNDER III
89	Tanah	01.01.13.13.08	0098	540	2006	DESA BUNGBARUH	Hak pakai	2006-09-	Sertifikat No.	GED. SD	Pembelian	19.720.000,00	KEPSEK. SD BUNGBARUH I

							20	2					
90	Tanah	01.01.13.13.08	0099	1000	0	DESA BUNGBARUH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	20.000.000,00	KEPSEK. SD BUNGBARUH II
91	Tanah	01.01.13.13.08	00100	1065	0	JL RAYA BATUAMPAR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	18.637.500,00	KEPSEK. SD CAMPOR III
92	Tanah	01.01.13.13.08	00101	1240	0	DESA CANDIBURUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	18.600.000,00	KEPSEK. SD CANDIBURUNG I
93	Tanah	01.01.13.13.08	00102	2479	0	DESA CANDIBURUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	37.185.000,00	KEPSEK. SD CANDIBURUNG II
94	Tanah	01.01.13.13.08	00103	1269	0	DS. CENLECEN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	76.140.000,00	KEPSEK. SD CENLECEN I
95	Tanah	01.01.13.13.08	00104	1200	0	DESA DABUAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	7.200.000,00	KEPSEK. SD DABUAN I
96	Tanah	01.01.13.13.08	00105	1032	0	DESA DASOK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	28.380.000,00	KEPSEK. SD DASOK I
97	Tanah	01.01.13.13.08	00106	1393	1987	JL. RAYA DASOK	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 3	GED. SD	Pembelian	154.440.000,00	KEPSEK. SD DASOK II
98	Tanah	01.01.13.13.08	00107	1349	1989	DESA DEMPO BARAT	Hak pakai	1989-09-02	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	18.250.000,00	KEPSEK. SD DEMPO BARAT I

99	Tanah	01.01.13.13.08	00108	1500	0	DSN. BARUH DS. DEMPO TIMUR	Hak pakai	0000-00-	-	GED. SD	Pembelian	9.000.000,00	KEPSEK. SD DEMPO TIMUR III
100	Tanah	01.01.13.13.08	00109	1521	1981	DS. DUKO TIMUR	Hak pakai	1981-01-08	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	4.445.000,00	KEPSEK. SD DUKO TIMUR II
101	Tanah	01.01.13.13.08	00110	1286	0	DES. DURBUK	Hak pakai	0000-00-	-	GED. SD	Pembelian	22.505.000,00	KEPSEK. SD DURBUK II
102	Tanah	01.01.13.13.08	00111	1600	0	DESA GAGAH	Hak pakai	0000-00-	-	GED. SD	Pembelian	72.000.000,00	KEPSEK. SD GAGAH
103	Tanah	01.01.13.13.08	00112	2663	1987	DESA GALIS	Hak pakai	1987-09-18	Sertifikat No. 3	GED. SD	Pembelian	37.035.000,00	KEPSEK. SD GALIS I
104	Tanah	01.01.13.13.08	00113	1260	0	JL.KH.AMIN JAKFAR35 PAMEKASAN	Hak pakai	0000-00-	-	GED. SD	Pembelian	275.500.000,00	KEPSEK. SD GLADAK ANYAR I
105	Tanah	01.01.13.13.08	00114	260	0	JL.KH AMIN JAKFAR PAMEKASAN	Hak pakai	0000-00-	-	GED. SD	Pembelian	58.500.000,00	KEPSEK. SD GLADAK ANYAR II
106	Tanah	01.01.13.13.08	00115	690	0	JL.SERSAN MESRUL PAMEKASAN	Hak pakai	0000-00-	-	GED. SD	Pembelian	58.650.000,00	KEPSEK. SD GLADAK ANYAR III
107	Tanah	01.01.13.13.08	00116	4295	2002	JL.PINTU GERBANG PAMEKASAN	Hak pakai	2002-05-18	Sertifikat No. 34	GED. SD GLADAK ANYAR IV	Pembelian	336.640.000,00	KEPSEK. SD GLADAK ANYAR IV

108	Tanah	01.01.13.13.08	00117	1100	0	JL.SERSAN MESRUL PAMEKASAN	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	121.000.000,00	KEPSEK. SD GLADAK ANYAR V
109	Tanah	01.01.13.13.08	00118	2890	0	DESA GRO'OM PROPO	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	132.500.000,00	KEPSEK. SD GRO'OM
110	Tanah	01.01.13.13.08	00119	1560	0	DESA GRUJUGAN	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	11.700.000,00	KEPSEK. SD GRUJUGAN
111	Tanah	01.01.13.13.08	00120	2532	0	JLN. RAYA GUGUL	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	101.280.000,00	KEPSEK. SD GUGUL I
112	Tanah	01.01.13.13.08	00121	3000	0	JLN RAYA GUGUL	Lain-lain	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	45.000.000,00	KEPSEK. SD GUGUL II
113	Tanah	01.01.13.13.08	00122	894	0	DUSUN BATULENGKONG	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	40.230.000,00	KEPSEK. SD GUGUL III
114	Tanah	01.01.13.13.08	00123	894	0	DUSUN POCOK	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	8.940.000,00	KEPSEK. SD GUGUL III
115	Tanah	01.01.13.13.08	00124	3146	2001	JL JALMAK NO 43	Hak pakai	2001-05-18	Sertifikat No. 7		GED. SD	Pembelian	198.000.000,00	KEPSEK. SD JALMAK I
116	Tanah	01.01.13.13.08	00125	1509	1987	DESA JAMBRINGIN	Hak pakai	1987-01-26	Sertifikat No. 2		GED. SD	Pembelian	36.300.000,00	KEPSEK. SD JAMBRINGIN II
117	Tanah	01.01.13.13.08	00126	795	0	DESA JAMBRINGIN	Hak pakai	2016-11-1	/ BK 486902		GED. SD	Pembelian	21.420.000,00	KEPSEK. SD JAMBRINGIN III

								15					
118	Tanah	01.01.13.13.08	00127	2691	1987	DES JARIN	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	126.650.000,00	KEPSEK. SD JARIN II
119	Tanah	01.01.13.13.08	00128	1600	0	DES JARIN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	68.000.000,00	KEPSEK. SD JARIN IV
120	Tanah	01.01.13.13.08	00129	825	0	JL SEGARA NO.198	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	123.750.000,00	KEPSEK. SD JUNGCAANGCANG III
121	Tanah	01.01.13.13.08	00130	476	0	JL. SEGARA PMK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	71.400.000,00	KEPSEK. SD JUNGCAANGCANG IV
122	Tanah	01.01.13.13.08	00131	2615	0	JL R ABD AZIZ	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	183.050.000,00	KEPSEK. SD JUNGCAANGCANG VI
123	Tanah	01.01.13.13.08	00132	320	0	JL.SINHADJI	Hak pakai	0000-00-00	-	RUMAH DINAS	Pembelian	11.200.000,00	KEPSEK. SD JUNGCAANGCANG VII
124	Tanah	01.01.13.13.08	00134	2720	0	JL. MASJID	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	136.000.000,00	KEPSEK. SD JUNGCAANGCANG VIII
125	Tanah	01.01.13.13.08	00135	1479	0	DESA KACOK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	33.277.500,00	KEPSEK. SD KACOK I
126	Tanah	01.01.13.13.08	00136	10495	0	DESA KACOK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	57.722.500,00	KEPSEK. SD KACOK II

127	Tanah	01.01.13.13.08	00137	1920	0	DESA KADUARA BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	384.000.000,00	KEPSEK. SD KADUARA BARAT I
128	Tanah	01.01.13.13.08	00138	2522	0	DESA KADUARA BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	56.745.000,00	KEPSEK. SD KADUARA BARAT III
129	Tanah	01.01.13.13.08	00139	1244	1987	DS. KADUR	Hak pakai	1987-01-29	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	21.700.000,00	KEPSEK. SD KADUR II
130	Tanah	01.01.13.13.08	00140	550	0	DS. KADUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	5.500.000,00	KEPSEK. SD KADUR V
131	Tanah	01.01.13.13.08	00141	4545	0	KEL. KANGENAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	1.807.000.000,00	KEPSEK. SD KANGENAN I
132	Tanah	01.01.13.13.08	00142	3160	0	DESA KAPONG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	474.000.000,00	KEPSEK. SD KAPONG I
133	Tanah	01.01.13.13.08	00143	1758	1987	JL.DS KERTAGENAH DAYA	Hak pakai	1987-03-30	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	18.125.000,00	KEPSEK. SD KERTAGENAH DAYA I
134	Tanah	01.01.13.13.08	00144	800	0	DS. KERTAGENA DAYA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	26.000.000,00	KEPSEK. SD KERTAGENAH DAYA II
135	Tanah	01.01.13.13.08	00145	924	0	DESA KERTAGENA LAOK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	32.340.000,00	KEPSEK. SD KERTAGENAH LAOK I

136	Tanah	01.01.13.13.08	00146	1501	1981	DESA KERTAGENA LAOK	Hak pakai	1981-11-06	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	34.717.500,00	KEPSEK. SD KERTAGENA LAOK II
137	Tanah	01.01.13.13.08	00147	805	0	DESA KERTAGENA LAOK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	18.112.500,00	KEPSEK. SD KERTAGENA LAOK III
138	Tanah	01.01.13.13.08	00148	1485	0	DESA KERTAGENA TENGGAH	Lain-lain	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	11.137.500,00	KEPSEK. SD KERTAGENA TENGGAH II
139	Tanah	01.01.13.13.08	00149	1922	1987	DESA KERTAGENA TENGGAH	Hak pakai	1987-08-25	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	13.650.000,00	KEPSEK. SD KERTAGENA TENGGAH III
140	Tanah	01.01.13.13.08	00150	714	0	JL. PALONGAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	7.140.000,00	KEPSEK. SD KLAMPAR I
141	Tanah	01.01.13.13.08	00151	1500	0	DSN. TENGGINAH DS. KLOMPANG TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	33.750.000,00	KEPSEK. SD KLOMPANG TIMUR I
142	Tanah	01.01.13.13.08	00152	1303	0	DSN. BRUKOH DS. KLOMPANG TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	26.060.000,00	KEPSEK. SD KLOMPANG TIMUR II
143	Tanah	01.01.13.13.08	00153	1356	0	DSN. TENGGINA DS. KLOMPANG TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	33.900.000,00	KEPSEK. SD KLOMPANG TIMUR III
144	Tanah	01.01.13.13.08	00154	2192	0	JL DESA KODIK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	27.400.000,00	KEPSEK. SD KODIK
145	Tanah	01.01.13.13.08	00155	1721	0	JL. GATOTKOCO	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	172.100.000,00	KEPSEK. SD KOLPAJUNG I

								00					
146	Tanah	01.01.13.13.08	00156	1970	2001	KEL. KOLPAJUNG	Hak pakai	2001-12-02	Sertifikat No. 5	GED. SD	Pembelian	246.250.000,00	KEPSEK. SD KOLPAJUNG II
147	Tanah	01.01.13.13.08	00157	1420	0	DESA KONANG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	31.950.000,00	KEPSEK. SD KONANG III
148	Tanah	01.01.13.13.08	00158	3215	0	DESA KRAMAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	80.375.000,00	KEPSEK. SD KRAMAT I
149	Tanah	01.01.13.13.08	00159	2304	0	JL TRUNOJOYO 371	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	172.800.000,00	KEPSEK. SD LADEN II
150	Tanah	01.01.13.13.08	00160	1070	0	DESA LANCAR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	8.025.000,00	KEPSEK. SD LANCAR
151	Tanah	01.01.13.13.08	00161	4000	0	DESA LARANGAN BADUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	300.000.000,00	KEPSEK. SD LARANGAN BADUNG I
152	Tanah	01.01.13.13.08	00162	1181	1991	DESA LARANGAN BADUNG	Hak pakai	1991-09-17	Sertifikat No. 3	GED. SD	Pembelian	109.375.000,00	KEPSEK. SD LARANGAN BADUNG II
153	Tanah	01.01.13.13.08	00163	1585	1985	DESA LARANGAN BADUNG	Hak pakai	1985-04-27	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	45.000.000,00	KEPSEK. SD LARANGAN BADUNG III
154	Tanah	01.01.13.13.08	00164	600	0	DESA LARANGAN BADUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	18.000.000,00	KEPSEK. SD LARANGAN BADUNG IV

155	Tanah	01.01.13.13.08	00166	1350	1985	DESA LARANGAN BADUNG	Hak pakai	1985-04- 27	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	34.375.000,00	KEPSEK. SD LARANGAN BADUNG VI
156	Tanah	01.01.13.13.08	00167	1507	1985	DESA LARANGAN DALAM	Hak pakai	1985-04- 23	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	34.020.000,00	KEPSEK. SD LARANGAN DALAM II
157	Tanah	01.01.13.13.08	00168	1960	0	JL RAYA KADUR LARANGAN	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	68.600.000,00	KEPSEK. SD LARANGAN LUAR III
158	Tanah	01.01.13.13.08	00169	2226	0	JL RAYA TLANAKAN DS LAR. TOKOL	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	100.170.000,00	KEPSEK. SD LARANGAN TOKOL I
159	Tanah	01.01.13.13.08	00170	1817	1987	DSN TAMAN DS LAR. TOKOL	Lain-lain	1987-09- 18	Sertifikat No. 24	GED. SD	Pembelian	26.250.000,00	KEPSEK. SD LARANGAN TOKOL III
160	Tanah	01.01.13.13.08	00171	1700	0	JL STADION 45	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	1.700.000.000,00	KEPSEK. SD LAWANGAN DAYA I
161	Tanah	01.01.13.13.08	00172	1617	0	JL STADION 45	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	1.617.000.000,00	KEPSEK. SD LAWANGAN DAYA II
162	Tanah	01.01.13.13.08	00173	2075	0	JL. DS. LEBBEK TENGAH	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	9.337.500,00	KEPSEK. SD LEBBEK I
163	Tanah	01.01.13.13.08	00174	1735	0	JL. DS. LEBBEK TENGAH	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	30.362.500,00	KEPSEK. SD LEBBEK II

164	Tanah	01.01.13.13.08	00175	1786	1991	DESA LEMBUNG KEC. GALIS PAMEKASAN	Hak pakai	1991-09- 26	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	43.550.000,00	KEPSEK. SD LEMBUNG
165	Tanah	01.01.13.13.08	00176	1400	0	DESA BUDDAGAN	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	5.600.000,00	KEPSEK. SD LEMPER I
166	Tanah	01.01.13.13.08	00177	2080	0	DESA LEMPER	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	26.000.000,00	KEPSEK. SD LEMPER II
167	Tanah	01.01.13.13.08	00178	2269	0	DESA LENTENG	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	90.760.000,00	KEPSEK. SD LENTENG I
168	Tanah	01.01.13.13.08	00179	1157	0	DESA LESONG DAJA	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	8.677.500,00	KEPSEK. SD LESONG DAYA I
169	Tanah	01.01.13.13.08	00180	750	0	DESA LESONG DAJA	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	5.625.000,00	KEPSEK. SD LESONG DAYA II
170	Tanah	01.01.13.13.08	00181	1080	0	DESA LESONG LAOK	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	5.400.000,00	KEPSEK. SD LESONG LAOK II
171	Tanah	01.01.13.13.08	00182	2193	0	DESA MAJUNGAN	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	60.307.500,00	KEPSEK. SD MAJUNGAN
172	Tanah	01.01.13.13.08	00183	943	0	DESA MANGGAR	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	56.580.000,00	KEPSEK. SD MANGGAR I
173	Tanah	01.01.13.13.08	00184	1240	0	DSN. BILAAN DS.	Hak pakai	0000-00- -	-	GED. SD	Pembelian	37.200.000,00	KEPSEK. SD MONTOK I

						MONTOK		00					
174	Tanah	01.01.13.13.08	00185	2190	0	DSN. BATES DS. MONTOK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	93.075.000,00	KEPSEK. SD MONTOK II
175	Tanah	01.01.13.13.08	00186	1550	1985	DSN BATES DS. MONTOK	Hak pakai	1985-03-27	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	63.750.000,00	KEPSEK. SD MONTOK III
176	Tanah	01.01.13.13.08	00187	1150	0	JL. PASAR PAO NO.30	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	86.250.000,00	KEPSEK. SD MORTAJEH I
177	Tanah	01.01.13.13.08	00188	1304	1987	DESA MURTAJIH	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	36.975.000,00	KEPSEK. SD MORTAJEH II
178	Tanah	01.01.13.13.08	00189	1500	0	DESA MURTAJIH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	112.500.000,00	KEPSEK. SD MORTAJEH III
179	Tanah	01.01.13.13.08	00190	1288	0	DS NYALABU DAJA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	28.980.000,00	KEPSEK. SD NYALABU DAYA I
180	Tanah	01.01.13.13.08	00191	1200	0	DS NYALABU DAJA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	27.000.000,00	KEPSEK. SD NYALABU DAYA I
181	Tanah	01.01.13.13.08	00192	1251	0	JL RAYA KLAMPAR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	25.020.000,00	KEPSEK. SD NYALABU DAYA II
182	Tanah	01.01.13.13.08	00193	820	0	DESA PADELEGAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	26.650.000,00	KEPSEK. SD PADELEGAN I

183	Tanah	01.01.13.13.08	00194	3050	0	DESA PADELEGAN	Lain-lain	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	99.125.000,00	KEPSEK. SD PADELEGAN II
184	Tanah	01.01.13.13.08	00195	2212	0	JL. RAYA PADEMAWU BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	71.890.000,00	KEPSEK. SD PADEMAWU BARAT I
185	Tanah	01.01.13.13.08	00196	4367	0	DESA PADEMAWU BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	24.018.500,00	KEPSEK. SD PADEMAWU BARAT II
186	Tanah	01.01.13.13.08	00197	500	0	JL. PADEMAWU BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	6.250.000,00	KEPSEK. SD PADEMAWU BARAT III
187	Tanah	01.01.13.13.08	00198	765	1991	JL. RAYA KRETEK	Hak pakai	1991-04-25	Sertifikat No. 3	GED. SD	Pembelian	4.273.500,00	KEPSEK. SD PADEMAWU BARAT IV
188	Tanah	01.01.13.13.08	00199	600	0	DESA PADEMAWU TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	120.000.000,00	KEPSEK. SD PADEMAWU TIMUR I
189	Tanah	01.01.13.13.08	00200	410	0	JL. PADEMAWU TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	17.425.000,00	KEPSEK. SD PADEMAWU TIMUR II
190	Tanah	01.01.13.13.08	00201	2216	0	PADEMAWU TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	94.180.000,00	KEPSEK. SD PADEMAWU TIMUR III
191	Tanah	01.01.13.13.08	00202	2533	0	DESA PADEMAWU TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	82.322.500,00	KEPSEK. SD PADEMAWU TIMUR V

192	Tanah	01.01.13.13.08	00203	1047	0	JL RAYA SUMENEP DS. PAGENDINGAN	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	183.225.000,00	KEPSEK. SD PAGENDINGAN I
193	Tanah	01.01.13.13.08	00204	1406	1985	DS. PAGENDINGAN	Hak pakai	1985-04-28	Sertifikat No. 1		GED. SD	Pembelian	118.505.000,00	KEPSEK. SD PAGENDINGAN II
194	Tanah	01.01.13.13.08	00205	1833	0	DESA PAKONG	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	151.222.500,00	KEPSEK. SD PAKONG I
195	Tanah	01.01.13.13.08	00206	3250	0	DESA PAKONG	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	268.125.000,00	KEPSEK. SD PAKONG II
196	Tanah	01.01.13.13.08	00207	1565	1991	DESA PAKONG	Hak pakai	1991-07-26	Sertifikat No. 16		GED. SD	Pembelian	33.110.000,00	KEPSEK. SD PAKONG V
197	Tanah	01.01.13.13.08	00208	3500	0	DESA PAKONG	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	113.750.000,00	KEPSEK. SD PAKONG VI
198	Tanah	01.01.13.13.08	00209	1050	0	DESA PAKONG	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	89.250.000,00	KEPSEK. SD PAKONG VII
199	Tanah	01.01.13.13.08	00210	1281	0	DS. PALALANG	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	46.116.000,00	KEPSEK. SD PALALANG I
200	Tanah	01.01.13.13.08	00211	1500	0	DS. PALALANG	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	54.000.000,00	KEPSEK. SD PALALANG II
201	Tanah	01.01.13.13.08	00212	750	0	DS. PALALANG	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	56.250.000,00	KEPSEK. SD PALALANG III

								00					
202	Tanah	01.01.13.13.08	00213	5600	0	DESA PALENGA'AN DAJA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	61.600.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN DAYA I
203	Tanah	01.01.13.13.08	00214	2070	1985	DESA PALENGA'AN DAYA	Hak pakai	1985-04-22	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	23.000.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN DAYA II
204	Tanah	01.01.13.13.08	00215	1560	0	KMP. ANGSOKA TIMUR DS PAL. DAJA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	15.600.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN DAYA III
205	Tanah	01.01.13.13.08	00216	2464	0	DESA PALENGA'AN DAJA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	24.640.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN DAYA IV
206	Tanah	01.01.13.13.08	00217	1239	1987	DESA PALENGA'AN DAYA	Hak pakai	1987-08-27	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	24.780.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN DAYA V
207	Tanah	01.01.13.13.08	00218	2000	0	DESA PALENGA'AN DAJA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	18.000.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN DAYA VI
208	Tanah	01.01.13.13.08	00219	1324	0	JL. PAHLAWAN	Hak pakai	2015-11-15	14 / BK 486904	GED. SD	Pembelian	46.760.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN LAOK I
209	Tanah	01.01.13.13.08	00220	1050	0	KAMPUNG GLUGUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	36.750.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN LAOK II
210	Tanah	01.01.13.13.08	00221	1500	0	KAMP. NAGASARE	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	67.500.000,00	KEPSEK. SD PALENGA'AN LAOK III

211	Tanah	01.01.13.13.08	00222	1262	0	DESA PALENGAAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	50.480.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN LAOK IV
212	Tanah	01.01.13.13.08	00223	1500	0	DESA PALENGAAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	11.250.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN LAOK V
213	Tanah	01.01.13.13.08	00224	4050	0	DUSUN PRAPATAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	30.375.000,00	KEPSEK. SD PALENGAAN LAOK VI
214	Tanah	01.01.13.13.08	00225	2100	0	DESA PALESANGGAR	Lain-lain	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	26.250.000,00	KEPSEK. SD PALESANGGAR II
215	Tanah	01.01.13.13.08	00226	1657	2007	DESA PALESANGGAR	Hak pakai	2007-03-28	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	15.000.000,00	KEPSEK. SD PALESANGGAR IV
216	Tanah	01.01.13.13.08	00227	1806	1987	DESA PALESANGGAR	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	17.750.000,00	KEPSEK. SD PALESANGGAR V
217	Tanah	01.01.13.13.08	00228	1015	0	DESA PAMAROH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	7.612.500,00	KEPSEK. SD PAMAROH I
218	Tanah	01.01.13.13.08	00229	1210	2006	DESA PAMAROH	Hak pakai	2006-09-28	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	12.750.000,00	KEPSEK. SD PAMAROH II
219	Tanah	01.01.13.13.08	00230	1600	0	DESA PAMAROH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	17.600.000,00	KEPSEK. SD PAMAROH III

220	Tanah	01.01.13.13.08	00231	1150	0	JALAN RAYA PAMOROH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	57.500.000,00	KEPSEK. SD PAMOROH I
221	Tanah	01.01.13.13.08	00232	772	1991	JALAN RAYA PAMOROH	Hak pakai	1991-07-18	Sertifikat No. 3	GED. SD	Pembelian	29.900.000,00	KEPSEK. SD PAMOROH I
222	Tanah	01.01.13.13.08	00233	3000	2006	JL.RAYA PAKONG	Hak pakai	2006-09-21	Sertifikat No. 4	GED. SD	Pembelian	18.750.000,00	KEPSEK. SD PAMOROH II
223	Tanah	01.01.13.13.08	00234	1440	0	DUSUN BUJUDAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	28.800.000,00	KEPSEK. SD PAMOROH III
224	Tanah	01.01.13.13.08	00235	1500	0	DESA PANA'AN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	22.500.000,00	KEPSEK. SD PANAAAN
225	Tanah	01.01.13.13.08	00236	1423	2006	JL. RAYA BATU AMPAR	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 6	GED. SD	Pembelian	9.900.000,00	KEPSEK. SD PANAGUAN I
226	Tanah	01.01.13.13.08	00237	1920	0	DESA PANAGUAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	9.600.000,00	KEPSEK. SD PANAGUAN II
227	Tanah	01.01.13.13.08	00238	1423	2006	DESA PANAGUAN	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 6	GED. SD	Pembelian	23.100.000,00	KEPSEK. SD PANAGUAN III
228	Tanah	01.01.13.13.08	00239	1500	0	SDN PANGBATOK II	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	30.000.000,00	KEPSEK. SD PANGBATOK II
229	Tanah	01.01.13.13.08	00240	530	2006	DESA PANGEREMAN	Hak pakai	2006-09-	Sertifikat No.	GED. SD	Pembelian	3.400.000,00	KEPSEK. SD PANGEREMAN I

								28	1				
230	Tanah	01.01.13.13.08	00241	2000	0	DESA PANGEREMAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	8.000.000,00	KEPSEK. SD PANGEREMAN III
231	Tanah	01.01.13.13.08	00242	530	2006	DESA PANGEREMAN	Hak milik	2006-04-28	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	2.840.000,00	KEPSEK. SD PANGEREMAN IV
232	Tanah	01.01.13.13.08	00243	2907	0	DESA PANGLEGUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	218.025.000,00	KEPSEK. SD PANGLEGUR III
233	Tanah	01.01.13.13.08	00244	1898	0	DS PANGLEMAH PROPO	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	52.195.000,00	KEPSEK. SD PANGLEMAH
234	Tanah	01.01.13.13.08	00245	1502	1987	DUSUN LAOK SOMOR PANGORAIAN	Lain-lain	1987-08-19	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	50.925.000,00	KEPSEK. SD PANGORAIAN I
235	Tanah	01.01.13.13.08	00246	750	0	DESA PANGORAIAN	Lain-lain	0000-00-00	-	RUMAH DINAS	Pembelian	26.250.000,00	KEPSEK. SD PANGORAIAN II
236	Tanah	01.01.13.13.08	00247	2211	0	DESA PANGTONGGAL NO.150	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	33.165.000,00	KEPSEK. SD PANGTONGGAL I
237	Tanah	01.01.13.13.08	00248	1065	0	JL. COKROATMOJO GG.11	Hak pakai	2017-01-17	89 / BK 486666	GED. SD	Pembelian	53.820.000,00	KEPSEK. SD PARTEKER I
238	Tanah	01.01.13.13.08	00249	1196	0	JL. COKROATMOJO GG 11	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	53.820.000,00	KEPSEK. SD PARTEKER I

239	Tanah	01.01.13.13.08	00250	1627	1987	DESA PASANGGAR	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	31.500.000,00	KEPSEK. SD PASANGGAR I
240	Tanah	01.01.13.13.08	00251	2450	0	DESA PASANGGAR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	12.250.000,00	KEPSEK. SD PASANGGAR II
241	Tanah	01.01.13.13.08	00252	2800	0	KP. TL LAOK (MENDIK)	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	8.400.000,00	KEPSEK. SD PASANGGAR III
242	Tanah	01.01.13.13.08	00253	1800	0	DESA MINIAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	49.500.000,00	KEPSEK. SD PASANGGAR IV
243	Tanah	01.01.13.13.08	00254	650	0	DESA PASANGGAR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	11.375.000,00	KEPSEK. SD PASANGGAR V
244	Tanah	01.01.13.13.08	00255	924	0	SDN PATEMON I	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	323.400.000,00	LURAH PATEMON
245	Tanah	01.01.13.13.08	00256	1465	1987	JL. RAYA PEGANTENAN	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 7	GED. SD	Pembelian	36.382.500,00	KEPSEK. SD PEGANTENAN I
246	Tanah	01.01.13.13.08	00257	954	0	DESA PEGANTENAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	47.700.000,00	KEPSEK. SD PEGANTENAN III
247	Tanah	01.01.13.13.08	00258	1440	0	JL.RAYA PELTONG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	43.200.000,00	KEPSEK. SD PELTONG

248	Tanah	01.01.13.13.08	00259	812	1991	JL. RAYA PLAKPLAK	Hak pakai	1991-07-26	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	28.490.000,00	KEPSEK. SD PLAKPAK I
249	Tanah	01.01.13.13.08	00260	1166	0	DS. PLAKPLAK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	2.915.000,00	KEPSEK. SD PLAKPAK II
250	Tanah	01.01.13.13.08	00261	2250	0	DS. PLAKPLAK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	168.750.000,00	KEPSEK. SD PLAKPAK III
251	Tanah	01.01.13.13.08	00262	1012	0	JL. RAYA PLAKPLAK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	101.200.000,00	KEPSEK. SD PLAKPAK IV
252	Tanah	01.01.13.13.08	00263	1340	1987	JL. RAYA PLAKPLAK	Hak pakai	1987-09-23	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	36.630.000,00	KEPSEK. SD PLAKPAK V
253	Tanah	01.01.13.13.08	00264	1560	0	DSN SLATREH PLAKPLAK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	54.600.000,00	KEPSEK. SD PLAKPAK VI
254	Tanah	01.01.13.13.08	00265	1625	0	JL. DESA PLAKPLAK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	4.062.500,00	KEPSEK. SD PLAKPAK VII
255	Tanah	01.01.13.13.08	00266	2332	1989	DESA POLAGAN	Hak pakai	1989-09-22	Sertifikat No. 7	GED. SD	Pembelian	52.650.000,00	KEPSEK. SD POLAGAN I & IV
256	Tanah	01.01.13.13.08	00267	1959	1987	DESA POLAGAN	Hak pakai	1987-01-26	Sertifikat No. 3	GED. SD	Pembelian	33.565.000,00	KEPSEK. SD POLAGAN II
257	Tanah	01.01.13.13.08	00268	3250	0	DESA POLAGAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	73.125.000,00	KEPSEK. SD POLAGAN III

								00					
258	Tanah	01.01.13.13.08	00269	1446	1985	DESA PONJANAN BARAT	Hak pakai	1985-04-26	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	28.920.000,00	KEPSEK. SD PONJANAN BARAT I
259	Tanah	01.01.13.13.08	00270	792	0	DS. PONJANAN BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	13.860.000,00	KEPSEK. SD PONJANAN BARAT III
260	Tanah	01.01.13.13.08	00271	700	0	DESA PONJANAN TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	15.750.000,00	KEPSEK. SD PONJANAN TIMUR II
261	Tanah	01.01.13.13.08	00272	1118	0	DSN. LANG - TALANG DS. PONTEH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	16.770.000,00	KEPSEK. SD PONTEH I
262	Tanah	01.01.13.13.08	00273	2296	0	JL. RAYA GALIS	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	126.280.000,00	KEPSEK. SD PONTEH III
263	Tanah	01.01.13.13.08	00274	1123	0	DESA PATOAN DAYA	Hak pakai	2016-03-28	6/ BR 166647	GED. SD	Pembelian	87.500.000,00	KEPSEK. SD POTO
264	Tanah	01.01.13.13.08	00275	1400	0	DESA PATO'AN DAJA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	26.600.000,00	KEPSEK. SD POTO'AN DAYA II
265	Tanah	01.01.13.13.08	00276	1398	1991	DESA PATO'AN DAJA	Hak pakai	1991-09-17	Sertifikat No. 2	GED. SD	Pembelian	31.185.000,00	KEPSEK. SD POTO'AN DAYA III
266	Tanah	01.01.13.13.08	00277	1508	0	DESA POTO'AN LAOK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	113.100.000,00	KEPSEK. SD POTO'AN LAOK I

267	Tanah	01.01.13.13.08	00278	2212	0	JL RAYA PROPO 143	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	77.420.000,00	KEPSEK. SD PROPO II
268	Tanah	01.01.13.13.08	00279	600	0	DESA RAGANG	Lain-lain	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	7.500.000,00	KEPSEK. SD RAGANG
269	Tanah	01.01.13.13.08	00280	1500	1985	JL.DESA RANGPERANG DAYA	Hak pakai	1985-04-16	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	6.750.000,00	KEPSEK. SD RANGPERANG DAYA II
270	Tanah	01.01.13.13.08	00281	1890	0	DESA REK KERREK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	47.250.000,00	KEPSEK. SD REK KERREK I
271	Tanah	01.01.13.13.08	00282	2232	0	DESA REK KERREK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	16.740.000,00	KEPSEK. SD REK KERREK II
272	Tanah	01.01.13.13.08	00283	2700	0	DESA REK KERREK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	67.500.000,00	KEPSEK. SD REK KERREK III
273	Tanah	01.01.13.13.08	00284	1400	0	DESA REK KERREK	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	28.000.000,00	KEPSEK. SD REK KERREK IV
274	Tanah	01.01.13.13.08	00285	2100	0	DESA ROMBUH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	10.500.000,00	KEPSEK. SD ROMBUH I
275	Tanah	01.01.13.13.08	00286	1750	0	DESA ROMBUH	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	48.125.000,00	KEPSEK. SD ROMBUH II

276	Tanah	01.01.13.13.08	00287	2120	0	JL. RAYA PROPPPO	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	74.200.000,00	KEPSEK. SD SAMATAN
277	Tanah	01.01.13.13.08	00288	1500	0	DESA SANA DAYA	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	5.250.000,00	KEPSEK. SD SANA DAYA II
278	Tanah	01.01.13.13.08	00289	1567	1985	DESA SANA LAOK	Hak pakai	1985-11-06	Sertifikat No. 1		GED. SD	Pembelian	47.125.000,00	KEPSEK. SD SANA LAOK I
279	Tanah	01.01.13.13.08	00290	1710	0	DESA SANA LAO'	Lain-lain	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	38.475.000,00	KEPSEK. SD SANA LAOK II
280	Tanah	01.01.13.13.08	00291	750	0	KAMPUNG JUJILA	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	20.625.000,00	KEPSEK. SD SANA LAOK III
281	Tanah	01.01.13.13.08	00292	450	0	DESA SANA TENGAH	Lain-lain	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	2.250.000,00	KEPSEK. SD SANA TENGAH IV
282	Tanah	01.01.13.13.08	00293	2700	0	DESA SEDDUR	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	60.750.000,00	KEPSEK. SD SEDDUR I
283	Tanah	01.01.13.13.08	00294	459	0	DESA SEDDUR	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	6.885.000,00	KEPSEK. SD SEDDUR II
284	Tanah	01.01.13.13.08	00295	1581	1985	DESA SENTOL	Hak pakai	1985-04-27	Sertifikat No. 1		GED. SD	Pembelian	20.706.000,00	KEPSEK. SD SENTOL II
285	Tanah	01.01.13.13.08	00296	1800	0	DESA SUKOLELA	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SD	Pembelian	49.500.000,00	KEPSEK. SD SUKOLELA II

								00					
286	Tanah	01.01.13.13.08	00297	2353	0	DS. SOMALANG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	294.125.000,00	KEPSEK. SD SOMALANG
287	Tanah	01.01.13.13.08	00298	1600	0	DESA SOPA'AH KEC.PADEMAWU	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	320.000.000,00	KEPSEK. SD SOPA'AH
288	Tanah	01.01.13.13.08	00299	1595	0	DESA SUMBER WARU	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	57.420.000,00	KEPSEK. SD SUMBER WARU I
289	Tanah	01.01.13.13.08	00300	1548	0	DESA SUMBER WARU	Hak pakai	2016-01-08	1 / br 166665	GED. SD	Pembelian	10.134.000,00	KEPSEK. SD SUMBER WARU II
290	Tanah	01.01.13.13.08	00301	1200	0	DESA SUMBER WARU	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	10.800.000,00	KEPSEK. SD SUMBER WARU III
291	Tanah	01.01.13.13.08	00302	1000	0	DESA SUMEDANGAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	27.500.000,00	KEPSEK. SD SUMEDANGAN I
292	Tanah	01.01.13.13.08	00303	1697	1991	DESA SUMEDANGAN	Hak pakai	1991-07-26	Sertifikat No. 4	GED. SD	Pembelian	67.500.000,00	KEPSEK. SD SUMEDANGAN II
293	Tanah	01.01.13.13.08	00304	1529	1981	DESA SUMEDANGAN	Hak pakai	1981-01-06	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	39.325.000,00	KEPSEK. SD SUMEDANGAN III
294	Tanah	01.01.13.13.08	00305	1375	0	DESA TAGENGSEK DAYA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	24.062.500,00	KEPSEK. SD TAGENGSEK DAYA II

295	Tanah	01.01.13.13.08	00306	509	0	JL.RAYA TAMBERU	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	50.900.000,00	KEPSEK. SD TAMBERU I
296	Tanah	01.01.13.13.08	00307	1452	0	DESA TAMBUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	65.340.000,00	KEPSEK. SD TAMBUNG II
297	Tanah	01.01.13.13.08	00308	924	0	DS. TAMPOJUNG GUWA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	11.550.000,00	KEPSEK. SD TAMPOJUNG GUWA
298	Tanah	01.01.13.13.08	00309	3310	0	DESA TAMPOJUNG PREGI	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	24.825.000,00	KEPSEK. SD TAMPOJUNG PREGI
299	Tanah	01.01.13.13.08	00310	1360	1987	DS. TAMPOJUNG TENGAH	Hak pakai	1987-03-30	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	104.000.000,00	KEPSEK. SD TAMPOJUNG TENGAH
300	Tanah	01.01.13.13.08	00311	600	0	DESA TAMPOJUNG TENGGINA	Lain-lain	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	13.500.000,00	KEPSEK. SD TAMPOJUNG TENGGINA
301	Tanah	01.01.13.13.08	00312	1204	1991	DS TANJUNG	Hak pakai	1991-07-25	Sertifikat No. 3	GED. SD	Pembelian	10.500.000,00	KEPSEK. SD TANJUNG I
302	Tanah	01.01.13.13.08	00313	1458	0	DESA TANJUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	51.030.000,00	KEPSEK. SD TANJUNG I
303	Tanah	01.01.13.13.08	00314	1862	0	DESA TANJUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	37.240.000,00	KEPSEK. SD TANJUNG II

304	Tanah	01.01.13.13.08	00315	1500	0	DS TANJUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	11.250.000,00	KEPSEK. SD TANJUNG II
305	Tanah	01.01.13.13.08	00316	1472	0	DS TANJUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	11.040.000,00	KEPSEK. SD TANJUNG IV
306	Tanah	01.01.13.13.08	00317	1500	0	DESA TANJUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	30.000.000,00	KEPSEK. SD TANJUNG IV
307	Tanah	01.01.13.13.08	00318	1860	0	DESA TANJUNG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	18.600.000,00	KEPSEK. SD TANJUNG VI
308	Tanah	01.01.13.13.08	00319	1500	0	DESA TARABAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	37.500.000,00	KEPSEK. SD TARABAN
309	Tanah	01.01.13.13.08	00320	1500	0	DESA TEBUL BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	18.750.000,00	KEPSEK. SD TEBUL BARAT
310	Tanah	01.01.13.13.08	00321	1500	0	DS. TEBUL TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	56.250.000,00	KEPSEK. SD TEBUL TIMUR I
311	Tanah	01.01.13.13.08	00322	1000	0	JL. RAYA PAKONG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	37.500.000,00	KEPSEK. SD TEBUL TIMUR II
312	Tanah	01.01.13.13.08	00323	100	0	DS. TEBUL TEMOR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	1.750.000,00	KEPSEK. SD TEBUL TIMUR III
313	Tanah	01.01.13.13.08	00324	510	0	-	Lain-lain	0000-00-00	-	SDN Tebul Timur 3	Pembelian	15.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan

								00		Pegantenan			
314	Tanah	01.01.13.13.08	00325	4000	0	JL.RAYA TEGANGSER LAOK	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	50.000.000,00	KEPSEK. SD TEGANGSER LAOK I&II
315	Tanah	01.01.13.13.08	00326	1500	0	DESA TEGANGSER LAOK	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	33.750.000,00	KEPSEK. SD TEGANGSER LAOK IV
316	Tanah	01.01.13.13.08	00327	1475	0	JLN TEJA TIMUR	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	33.187.500,00	KEPSEK. SD TEJA TIMUR IV
317	Tanah	01.01.13.13.08	00328	1540	0	DESA TENTENAN BARAT	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	192.500.000,00	KEPSEK. SD TENTENAN BARAT
318	Tanah	01.01.13.13.08	00329	1008	0	DESA TLAGAH	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	17.640.000,00	KEPSEK. SD TLAGAH I
319	Tanah	01.01.13.13.08	00330	756	0	JL RAYA TLANAKAN	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	34.020.000,00	KEPSEK. SD TLANAKAN II
320	Tanah	01.01.13.13.08	00331	1875	1985	DESA TLESAH	Hak pakai	1985-03- 19	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	28.740.000,00	KEPSEK. SD TLESAH
321	Tanah	01.01.13.13.08	00332	2460	0	DS. TLONTO ARES	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	29.520.000,00	KEPSEK. SD TLONTO ARES
322	Tanah	01.01.13.13.08	00333	1950	0	JL. RAYA WARU - PASEAN	Hak pakai	0000-00- 00	-	GED. SD	Pembelian	97.500.000,00	KEPSEK. SD TLONTORAJA VII

323	Tanah	01.01.13.13.08	00334	2565	0	DESA TLONTORAJA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	128.250.000,00	KEPSEK. SD TLONTORAJA VIII
324	Tanah	01.01.13.13.08	00335	1482	1994	DS TOKET KEC PROPO	Hak pakai	1994-07-26	Sertifikat No. 6	GED. SD	Pembelian	37.800.000,00	KEPSEK. SD TOKET I
325	Tanah	01.01.13.13.08	00336	858	0	DESA TOKET KEC. PROPO	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	23.595.000,00	KEPSEK. SD TOKET II
326	Tanah	01.01.13.13.08	00337	456	0	DESA TOKET KEC. PROPO	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	12.540.000,00	KEPSEK. SD TOKET II
327	Tanah	01.01.13.13.08	00338	1817	2001	JL SUMBER NYAMPLONG DESA TORONAN	Hak pakai	2001-12-02	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	63.595.000,00	KEPSEK. SD TORONAN I
328	Tanah	01.01.13.13.08	00339	813	1987	DESA TRASAK	Hak pakai	2016-08-10	50 / BK 486669	GED. SD	Pembelian	27.900.000,00	KEPSEK. SD TRASAK II
329	Tanah	01.01.13.13.08	00340	1462	0	JL. WARU BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	219.300.000,00	KEPSEK. SD WARU BARAT I
330	Tanah	01.01.13.13.08	00341	1392	0	JALAN WARU	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	62.640.000,00	KEPSEK. SD WARU BARAT II
331	Tanah	01.01.13.13.08	00342	816	0	JALAN WARU	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	102.000.000,00	KEPSEK. SD WARU BARAT III

332	Tanah	01.01.13.13.08	00343	961	1987	DS. WARU BARAT	Hak pakai	1987-03-30	Sertifikat No. 1	GED. SD	Pembelian	115.500.000,00	KEPSEK. SD WARU BARAT IV
333	Tanah	01.01.13.13.08	00344	1260	0	DESA WARU BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	107.100.000,00	KEPSEK. SD WARU BARAT V
334	Tanah	01.01.13.13.08	00345	1700	0	DESA WARU BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	38.250.000,00	KEPSEK. SD WARU BARAT VI
335	Tanah	01.01.13.13.08	00346	1890	0	DESA WARU BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	23.625.000,00	KEPSEK. SD WARU BARAT VII
336	Tanah	01.01.13.13.08	00347	618	1987	DESA WARU TIMUR	Hak pakai	1987-03-28	Sertifikat No. 7	GED. SD	Pembelian	33.600.000,00	KEPSEK. SD WARU TIMUR I
337	Tanah	01.01.13.13.08	00348	550	0	DESA WARU TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	13.750.000,00	KEPSEK. SD WARU TIMUR II
338	Tanah	01.01.13.13.08	00349	425	0	DESA WARU TIMUR	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	21.250.000,00	KEPSEK. SD WARU TIMUR III
339	Tanah	01.01.13.13.08	00350	17300	0	JALAN RAYA BLABAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	562.250.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 BATUMARMAR
340	Tanah	01.01.13.13.08	00351	9155	0	JL. RAYA GALIS	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	320.425.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 GALIS
341	Tanah	01.01.13.13.08	00353	10482	0	JL. RAYA LARANGAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	393.075.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 LARANGAN

								00					
342	Tanah	01.01.13.13.08	00354	10345	0	JL. RAYA PADEMAWU	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	465.525.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 PADEMAWU
343	Tanah	01.01.13.13.08	00355	11335	0	JL. RAYA PAKONG	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	850.125.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 PAKONG
344	Tanah	01.01.13.13.08	00356	10070	2008	DESA POTO'AN LAOK	Hak pakai	2008-01-29	Sertifikat No. 1	GED. SLTP	Pembelian	755.250.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 PALENGAAN
345	Tanah	01.01.13.13.08	00357	15340	0	JL. R.ABD AZIZ	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	4.371.900.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 PAMEKASAN
346	Tanah	01.01.13.13.08	00358	15000	0	JL RAYA PEGANTENAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	300.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 PEGANTENAN
347	Tanah	01.01.13.13.08	00359	10000	0	JL DESA LENTENG PROPO	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	225.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 PROPO
348	Tanah	01.01.13.13.08	00360	10700	0	JL RAYA BRANTA TINGGI TLANAKAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	321.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 TLANAKAN
349	Tanah	01.01.13.13.08	00361	10730	0	DESA WARU BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	5.365.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 WARU
350	Tanah	01.01.13.13.08	00362	10730	0	JL. WARU BARAT RAYA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SLTP	Pembelian	8.047.500.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 WARU

351	Tanah	01.01.13.13.08	00363	8800	0	JL.TALANG LARANGAN	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	616.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 2 LARANGAN
352	Tanah	01.01.13.13.08	00364	9185	0	JL. RAYA PADEMAWU BARAT	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	55.110.000,00	KEPSEK. SLTPN 2 PADEMAWU
353	Tanah	01.01.13.13.08	00365	13000	0	DESA PALENGAAN DAYA	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	390.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 2 PALENGAAN
354	Tanah	01.01.13.13.08	00366	4555	0	JL BALAIKAMBANG	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	6.832.500.000,00	KEPSEK. SLTPN 2 PAMEKASAN
355	Tanah	01.01.13.13.08	00367	6966	0	JL. DESA PLAKPLAK	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	243.810.000,00	KEPSEK. SLTPN 2 PEGANTENAN
356	Tanah	01.01.13.13.08	00368	6000	0	DESA BATU KALANGAN PROPO	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	90.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 2 PROPO
357	Tanah	01.01.13.13.08	00369	10800	2008	JL. RAYA MAJUNGAN	Hak pakai	2008-11-28	Sertifikat No. 1		GED. SLTP 3 Pademawu	Pembelian	325.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 3 PADEMAWU
358	Tanah	01.01.13.13.08	00370	1500	0	JL BAHAGIA NO 6	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	225.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 3 PAMEKASAN
359	Tanah	01.01.13.13.08	00371	4043	0	JL JOKOTOLE 125 KEL. BARTIM	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	4.043.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 5 PAMEKASAN

360	Tanah	01.01.13.13.08	00372	6720	0	JL. PINTU GERBANG 208 PAMEKASAN	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	268.800.000,00	KEPSEK. SLTPN 6 PALENGAAN
361	Tanah	01.01.13.13.08	00373	10000	0	JL RAYA BETTET	Hak pakai	0000-00-00	-		GED. SLTP	Pembelian	375.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 7 PAMEKASAN
362	Tanah	01.01.13.13.08	00386	19979	1987	DESA BATU KERBUY	Hak pakai	1987-09-18	Sertifikat No. 2		SD. INPRES 10/73	Pembelian	719.244.000,00	-
363	Tanah	01.01.13.13.08	00387	1482	1989	TLONTO ARES	Hak pakai	1989-09-02	Sertifikat No. 2		SD. INPRES 10/73	Pembelian	53.352.000,00	-
364	Tanah	01.01.13.13.08	00388	1500	1989	SANA TENGAH	Hak pakai	1989-09-22	Sertifikat No. 3		SD. INPRES 3/77	Pembelian	300.000.000,00	-
365	Tanah	01.01.13.13.08	00389	1789	1989	TAMPOJUNG TENGGIH	Hak pakai	1989-07-02	Sertifikat No. 8		SD. INPRES 3/77	Pembelian	64.404.000,00	-
366	Tanah	01.01.13.13.08	00390	1871	1987	PONJANAN TIMUR	Hak pakai	1987-09-18	Sertifikat No. 1		SD. INPRES 10/73	Pembelian	67.356.000,00	-
367	Tanah	01.01.13.13.08	00391	1276	1987	BANGSEREH	Hak pakai	1987-03-30	Sertifikat No. 1		SD. INPRES 3/77	Pembelian	45.936.000,00	-
368	Tanah	01.01.13.13.08	00392	2212	1987	BANYU BULU	Hak pakai	1987-08-27	Sertifikat No. 1		SD. INPRES 10/73	Pembelian	30.968.000,00	-
369	Tanah	01.01.13.13.08	00393	2658	1987	SAMIRAN	Hak pakai	1987-08-	Sertifikat No.		SD. INPRES 10/73	Pembelian	37.212.000,00	-

								25	13				
370	Tanah	01.01.13.13.08	00394	1629	1987	CANDI BURUNG	Hak pakai	1987-01-26	Sertifikat No. 1	SD. INPRES	Pembelian	22.806.000,00	-
371	Tanah	01.01.13.13.08	00397	2165	1987	PELTONG	Hak pakai	1987-10-19	Sertifikat No. 2	SD. INPRES	Pembelian	177.530.000,00	-
372	Tanah	01.01.13.13.08	00398	1036	1989	ARTODUNG	Hak pakai	1989-09-22	Sertifikat No. 1	SD. INPRES 3/77	Pembelian	84.952.000,00	-
373	Tanah	01.01.13.13.08	00399	1588	1985	PADELEGAN	Hak pakai	1985-04-27	Sertifikat No. 1	SD. INPRES 6/75	Pembelian	317.600.000,00	-
374	Tanah	01.01.13.13.08	00400	1350	1985	BADDURIH	Hak pakai	1985-04-27	Sertifikat No. 1	SD. INPRES	Pembelian	270.000.000,00	-
375	Tanah	01.01.13.13.08	00401	755	1987	AMBENDER	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 1	SD. INPRES 3/77	Pembelian	15.100.000,00	-
376	Tanah	01.01.13.13.08	00402	1853	1987	TLAGAH	Hak pakai	1987-09-21	Sertifikat No. 1	SD. INPRES 3/77	Pembelian	37.060.000,00	-
377	Tanah	01.01.13.13.08	00403	1905	1987	POTO'AN DAYA	Hak pakai	1987-01-26	Sertifikat No. 1	SD. INPRES	Pembelian	26.670.000,00	-
378	Tanah	01.01.13.13.08	00405	2049	1987	REK KERREK	Hak pakai	1987-08-19	Sertifikat No. 3	SD. INPRES 3/77	Pembelian	40.980.000,00	-

379	Tanah	01.01.13.13.08	00407	1883	2000	PATEMON	Hak pakai	2000-11-22	Sertifikat No. 7	SD	Pembelian	457.569.000,00	-
380	Tanah	01.01.13.13.08	00409	1168	2006	PEGANTENAN	Hak pakai	2006-09-28	Sertifikat No. 14	SDN BLUMBUNGAN III	Pembelian	30.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
381	Tanah	01.01.13.13.08	00410	546	2006	KEC KADUR	Hak pakai	2006-09-28	Sertifikat No. 02	SDN BLUMBUNGAN I	Pembelian	20.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
382	Tanah	01.01.13.13.08	00411	1781	2006	BULENGAN HAJI	Hak pakai	2006-09-28	Sertifikat No. 02	SDN BULENGAN HAJI I	Pembelian	30.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
383	Tanah	01.01.13.13.08	00412	1898	2006	DESA LEMBUNG GALIS	Hak pakai	2006-09-28	Sertifikat No. 03	SDN LEMBUNG I	Pembelian	60.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
384	PERKAMPUNGAN	01.01.01.00.00	00413	1193	2007	NYALABUH LAOK	Hak pakai	2007-04-12	Sertifikat No. 37	KANTOR DIKNAS	Pembelian	150.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
385	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00414	616	2007	WARU TIMUR	Hak pakai	2007-03-28	Sertifikat No. 07	SDN WARU TIMUR III	Pembelian	30.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
386	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00415	9836	2008	PALENGGAAN DAYA	Hak pakai	2008-01-29	Sertifikat No. 01	SMPN PALENGGAAN I	Pembelian	200.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
387	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00416	1059	2007	BUJUR TENGAH	Hak pakai	2007-03-28	Sertifikat No. 01	SDN BUJUR TENGAH II	Pembelian	65.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan

388	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00417	1651	2007	DESA PALESANGGER	Hak pakai	2007-03-28	Sertifikat No. 01	SDN PALESANGGER IV	Pembelian	30.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
389	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00418	1201	2007	DEMPO BARAT	Hak pakai	2007-09-12	Sertifikat No. 01	SDN DEMPO BARAT II	Pembelian	86.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
390	Tanah	01.01.13.13.08	00421	960	0	PAKONG	Hak pakai	0000-00-00	-	SDN PAKONG III	Pembelian	60.000.000,00	-
391	Tanah	01.01.13.13.08	00423	760	2009	Kecamatan Kadur	Hak pakai	2009-08-29	Sertifikat No. 57	Kantor Cabang Diknas Kadur	Pembelian	65.000.000,00	-
392	Tanah	01.01.13.13.08	00424	1610	2009	Pademawu	Hak pakai	2009-07-28	Sertifikat No. 51	SDN Pademawu Timur II dan III	Pembelian	100.000.000,00	ganti tanah SDN Pademawu II dan III
393	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00435	1683	1985	Banyupelle Kec. Palengaan	Hak pakai	1985-04-22	Sertifikat No. 01	SDN Banyupelle	Pembelian	83.000.000,00	-
394	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00436	1500	1989	Srambah Kec. Proppo	Hak pakai	1989-09-22	Sertifikat No. 02	SDN Srambah	Pembelian	38.000.000,00	-
395	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00437	1878	1987	Campor Kec. Proppo	Hak pakai	1987-03-30	Sertifikat No. 01	SDN Campor	Pembelian	66.000.000,00	-
396	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00438	1516	1991	Rangperang Daya Kec. Proppo	Hak pakai	1991-07-26	Sertifikat No. 02	SDN Rang Perang Daya II	Pembelian	42.000.000,00	-
397	Tanah	01.01.01.01.01	00439	1500	1985	Rangperang Daya Kec. Proppo	Hak pakai	1985-04-	Sertifikat No.	SDN Rang Perang	Pembelian	43.000.000,00	-

	Kampung							26	01	Daya I			
398	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00440	1128	1991	Klampar Kec. Proppo	Hak pakai	1991-07-26	Sertifikat No. 02	SDN Klampar III	Pembelian	41.000.000,00	-
399	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00441	1835	1987	Bukek Kec. Tlanakan	Hak pakai	1987-08-27	Sertifikat No. 02	SDN Bukek	Pembelian	56.000.000,00	-
400	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	00442	2553	1985	Toket Kec. Proppo	Hak pakai	1985-05-19	Sertifikat No. 01	SDN Toket	Pembelian	26.000.000,00	-
401	Tanah	01.01.13.13.08	00444	3360	1981	DESA GLADAK ANYAR	Hak pakai	1981-05-12	Sertifikat No. 23	SD INPRES 10/1973	Pembelian	957.600.000,00	-
402	Tanah	01.01.13.13.08	00445	1503	1987	PANEMPAN	Hak pakai	1987-08-20	Sertifikat No. 2	SD INPRES 6/75	Pembelian	54.108.000,00	-
403	Tanah	01.01.13.13.08	00446	887	0	JL. STADION NO. 63	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	1.330.500.000,00	LURAH BARURAMBAT KOTA
404	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	0011	12000	2017	DESA SUKOLELA	Lain-lain	2017-12-31	-	GED. SLTP	Pembelian	330.000.000,00	KEPSEK. SLTPN 1 KADUR
405	Tanah	01.01.13.13.08	00448	2200	1985	JL DIRGAHAYU	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	275.000.000,00	SDN BUGIH 2
406	Tanah	01.01.13.13.08	00450	1275	0	JUNG CANG-CANG JL. R.ABD AZIS 23	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	446.250.000,00	LURAH JUNG CANGCANG

407	Tanah	01.01.13.13.08	00451	1271	0	JUNG CANG-CANG JL. SEGARA	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	190.650.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
408	Tanah	01.01.13.13.08	00452	1032	0	JUNG CANG-CANG JL. SEGARA 121	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	154.800.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
409	Tanah	01.01.13.13.08	00453	6020	2004	KANGENAN	Hak pakai	2004-10-12	Sertifikat No. 22	GED. TK	Pembelian	120.000.000,00	LURAH KANGENAN
410	Tanah	01.01.13.13.08	00454	7560	0	KANGENAN	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	1.200.000.000,00	LURAH KANGENAN
411	Tanah	01.01.13.13.08	00455	2388	2008	JL KOWEL JAYA 75	Hak pakai	2008-09-07	Sertifikat No. 53	GED. SD	Pembelian	41.737.500,00	LURAH KOWEL
412	Tanah	01.01.13.13.08	00456	4820	0	JL KOWEL JAYA 43	Hak pakai	2017-01-17	65 / BK 486717	GED. SD	Pembelian	49.680.000,00	LURAH KOWEL
413	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	0010	379	2017	-	Lain-lain	2017-12-31	-	SDN ANGSANAH	Pembelian	26.939.188,00	SDN ANGSANAH
414	Tanah	01.01.13.13.08	00458	2780	0	JL KOWEL JAYA NO 45	Hak pakai	0000-00-00	-	GED. SD	Pembelian	60.660.000,00	LURAH KOWEL
415	Tanah	01.01.13.13.08	00459	1889	2012	PATEMON	Hak pakai	2012-12-13	Sertifikat No. 21	SDN PATEMON II	Pembelian	240.000.000,00	LURAH PATEMON

416	Tanah	01.01.13.13.08	00462	722	2006	LAWANGAN DAYA	Hak milik	2006-04-18	Sertifikat No. 1994	RSBI Lawangan Daya	Pembelian	113.300.000,00	-
417	Tanah	01.01.13.13.08	00463	879	2006	LAWANGAN DAYA	Hak milik	2006-04-18	Sertifikat No. 1993	RSBI Lawangan Daya	Pembelian	136.850.000,00	-
418	Tanah	01.01.13.13.08	00464	984	2009	LAWANGAN DAYA	Hak milik	2009-06-12	Sertifikat No. 2897	RSBI Lawangan Daya	Pembelian	152.600.000,00	-
419	Tanah	01.01.13.13.08	00465	1276	2009	LAWANGAN DAYA	Hak milik	2009-03-12	Sertifikat No. 2895	RSBI Lawangan Daya	Pembelian	196.400.000,00	-
420	Tanah	01.01.13.13.08	00466	696	2009	LAWANGAN DAYA	Hak milik	2009-03-12	Sertifikat No. 2896	RSBI Lawangan Daya	Pembelian	109.400.000,00	-
421	Tanah	01.01.13.13.08	00467	1511	2006	LAWANGAN DAYA	Hak milik	2006-04-18	Sertifikat No. 1992	RSBI Lawangan Daya	Pembelian	226.650.000,00	-
422	Tanah	01.01.13.13.08	00468	2580	0	LAWANGAN DAYA	Hak milik	0000-00-00	-	RSBI Lawangan Daya	Pembelian	387.000.000,00	-
423	Tanah	01.01.13.13.08	00469	1530	0	Batu Bintang	Hak milik	0000-00-00	-	SDN Batu Bintang 2	Pembelian	300.000.000,00	Penggantian Tanah 2011
424	Tanah	01.01.13.13.08	00470	1200	0	Klampar	Hak milik	0000-00-00	-	SDN Klampar 1	Pembelian	125.000.000,00	Penggantian Tanah 2011
425	Tanah	01.01.13.13.08	00471	1190	0	Tlontoraja	Hak milik	0000-00-00	-	SDN Tlontoraja 6	Pembelian	100.000.000,00	Penggantian Tanah 2011

							milik	00						
426	Tanah	01.01.13.13.08	00472	1010	0	Durbuk	Hak milik	0000-00-00	-		SDN Durbuk 2	Pembelian	150.000.000,00	Penggantian Tanah 2011
427	Tanah	01.01.13.13.08	00473	1590	0	Palengaan Daya	Hak milik	0000-00-00	-		SDN Palengaan Daya 4	Pembelian	40.000.000,00	Penggantian Tanah 2011
428	Tanah	01.01.13.13.08	00476	3700	2012	Tanjung - Pademawu	Hak pakai	2012-06-11	Sertifikat No. 4A		SDN Tanjung 3	Pembelian	262.500.000,00	-
429	Tanah	01.01.13.13.08	00477	3990	2012	Lawangan Daya - Pademawu	Hak pakai	2012-03-11	Sertifikat No. 4		RSBI	Pembelian	360.350.000,00	-
430	Tanah Kampung	01.01.01.01.01	009	1396	2017	-	Lain-lain	2017-12-31	-		SDN BLABAN	Pembelian	389.095.812,00	SDN BLABAN
431	Tanah	01.01.13.13.08	00479	1906	2012	Konang - Galis	Hak pakai	2012-11-13	Sertifikat No. 16		SDN Konang II	Pembelian	250.162.500,00	-
432	Tanah	01.01.13.13.08	00480	1382	2012	Konang - Galis	Hak pakai	2012-11-13	Sertifikat No. 17		SDN Konang III	Pembelian	263.157.900,00	-
433	Tanah	01.01.13.13.08	00483	4457	2012	Desa Jalmak	Hak pakai	2012-12-13	Sertifikat No. 1		SMPN 8 JALMAK	Pembelian	213.936.000,00	-
434	Tanah	01.01.13.13.08	00486	0	0	SDN Jambringin I Kec. Propo	Hak pakai	0000-00-00	-		SDN Jambringin I	Pembelian	175.000.000,00	-

435	Tanah	01.01.13.13.08	00487	0	0	SDN Larangan Luar III Kec. Larangan	Hak pakai	0000-00-00	-	SDN Larangan Luar III	Pembelian	292.500.000,00	-
436	Tanah	01.01.13.13.08	00490	0	2014	Desa Sumber Waru	Hak pakai	2014-12-31	-	SDN. SUMBER WARU 2	Pembelian	140.000.000,00	-
437	Tanah	01.01.13.13.08	00491	0	2014	Desa Potoan Daya	Hak pakai	2014-12-31	-	SDN. POTOAN DAYA 3	Pembelian	60.000.000,00	-
438	Tanah	01.01.13.13.08	00492	0	2014	Desa bangsereh	Hak pakai	2014-12-31	-	SDN BANGSEREH 1	Pembelian	375.000.000,00	-
439	Tanah	01.01.13.13.08	00493	0	2014	Desa Trasak	Hak pakai	2014-12-31	-	SDN TRASAK 2	Pembelian	100.000.000,00	-
440	Appraisal	01.01.13.13.1.9	00494	0	0	-	Lain-lain	0000-00-00	-	-	Pembelian	24.640.000,00	-
441	Appraisal	01.01.13.13.1.9	00495	0	0	-	Lain-lain	0000-00-00	-	-	Pembelian	34.650.000,00	-
442	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.02	009	742	2015	SDN Panglegur 2	Hak pakai	2015-12-29	-	Sekolah	Pembelian	295.000.000,00	-

443	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.02	0010	363	2015	SDN Pademawu Timur 2	Hak pakai	2015-12-29	-	Sekolah	Pembelian	42.000.000,00	-
444	Appraisal	01.01.13.13.1.9	0011	0	2015	-	Hak pakai	2015-12-29	-	-	Pembelian	39.600.000,00	-
445	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.02	0003	0	2016	pamekasan	Hak milik	2016-12-31	S.592	P.4	Pembelian	24.640.000,00	Pengadaan/Perluasan Tanah SMPN 6 Pamekasan
TOTAL												83.129.920.400,00	0

Berdasarkan data diatas juga terlihat bahwa selain tahun pengadaan dan tahun sertifikat beberapa aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan baik dalam bentuk tanah maupun bangunan belum seluruhnya teridentifikasi terkait ukuran atau luas lahan yang ada. Aset daerah berupa tanah yang ada di Kecamatan Proppo, Larangan, Desa Sumber waru dan sebagainya terlihat masih belum diketahui ukuran luas lahannya. Di samping itu beberapa aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan juga belum teridentifikasi penggunaannya. Selanjutnya apabila memperhatikan tahun pengadaan nampak belum seluruhnya terdata secara lengkap. Kondisi yang hampir sama terlihat dalam soal status lahan khususnya menyangkut nomor sertifikat. Berbagai jenis aset yang dimiliki Dinas Pendidikan umumnya diperoleh dari pembelian dengan besaran harga yang sangat bervariasi. Dari berbagai jenis aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan menurut catatan yang ada terlihat bahwa aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dilakukan pengadaan sejak tahun 1981 sampai dengan 2017 yakni dalam bentuk tanah yang diatasnya berdiri bangunan atau gedung sekolah. Sampai saat ini aset yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam bentuk gedung sekolah baik di tingkat SD maupun SLTP tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Artinya di hampir seluruh desa dan wilayah kecamatan di kabupaten Pamekasan telah dilengkapi dengan gedung sekolah untuk tempat anak-anak usia sekolah menempuh pendidikan formal. Meski telah banyak gedung sekolah yang didirikan di ebrbagai desa dan kecamatan tetapi dalam praktek masih ditemukan anak usia sekolah yang harus menempuh beberapa kilometer perjalanan menuju tempat sekolah. Bagi masyarakat Pamekasan keberadaan infrastruktur publik dalam bentuk ketersediaan lahan dan bangunan atau gedung sekolah pasar sangat dibutuhkan sebagai tempat menempuh pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang ada di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan di masa yang akan datang. Faktanya sebagian besar aset yang dimiliki Dinas Pendidikan baik dalam bentuk tanah dan bangunan atau gedung digunakan sebagai kantor, gedung sekolah dan sebagainya yang tujuannya adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat secara luas.

6. Aset yang Dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika

Aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2019 tercatat hanya 2 (dua) jenis aset yakni tanah bangunan rumah negara golongan I dan satu lahan tanah bangunan untuk kantor pemerintah. Aset pertama yakni tanah bangunan rumah dengan ukuran atau luas tanah 200 meter persegi dan aset kedua yakni tanah bangunan kantor pemerintah dengan luas lahan 2.053 meter persegi. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah bangunan rumah ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 2003 terletak di jalan Raya Pademawu dan tanah bangunan kantor sejak tahun 2008 terletak di jalan Jokotole Kecamatan Kota. Menurut catatan yang ada aset tersebut memiliki status tanah hak pakai. Aset berupa tanah bangunan untuk rumah dinas dibeli Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2008 seharga Rp. 70.000.000,- dan tanah bangunan untuk kantor seharga Rp. 1.642.400.000,- Bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pamekasan ketersediaan aset ini sangat penting dalam rangka mendukung kegiatan penyiaran, pengembangan komunikasi dan informatika. Sebagaimana dipahami bahwa di era perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan perhatian dari pihak pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang produktif bagi masyarakat. Di era *digital society* dan arus informasi yang sangat cepat niscaya keberadaan dan peran dinas ini sangat strategis sehingga dibutuhkan fasilitas, sarana dan prasarana fisik yang mampu menunjang aktivitas operasional dalam bentuk penyediaan aset pemerintah yang memadai.

Tabel IV.6
Aset yang Dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUA S (m2)	TAHU N PENGAD AAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)
		KODE BARANG	REGIST ER				HAK	SERTIFIKAT				
								TANGGAL	NOMOR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	01.01.11.01.01	0021	200	200 8	Jl Raya Pademawu Pamekasan	Hak pengelolan an	2008-09- 25	-	Rumah Dinas	Pembelian	70.000.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	009	2053	200 3	Jl. Jokotole IV / 1 Pamekasan	Hak pakai	2003-12- 31	-	Kantor (Eks. Perhubungan)	Pembelian	1.642.400.000,00
TOTAL												1.712.400.000,00

Memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2019 aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tercatat hanya berupa tanah bangunan baik yang tersedia untuk rumah dinas maupun bangunan kantor yang merupakan bekas kantor perhubungan. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 2003 dengan status hak pakai dengan sertifikat tertanggal 31-12-2003. Lokasinya di jalan Jokotole. Meski selama ini aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika masih terbatas yakni hanya dalam bentuk aset tanah yang diatasnya berdiri bangunan gedung dan rumah dinas tetapi dalam aktivitas keseharian dinas ini terlihat dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Pamekasan khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika.

7. Aset yang Dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Aset atau barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya sangat dibutuhkan upaya pengelolaan secara baik dan benar sesuai dengan azas pengelolaan barang milik daerah. Dalam proses pengelolaan harus mendasarkan pada berbagai asas yakni: asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Selanjutnya dalam rangka memberikan garansi terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan aset milik pemerintah daerah dibutuhkan adanya kesamaan persepsi dari berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah sehingga barang atau aset milik pemerintah daerah dapat terjaga dan terpelihara secara baik serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan secara luas. Sangat disadari bahwa sejalan semakin meningkatnya tugas-tugas pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik yang profesional dan performa layanan yang berkualitas serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian aset milik pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola secara tertib, baik, benar, dan mematuhi azas-azas pengelolaannya

agar supaya dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, efisien, tidak menimbulkan pemborosan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini upaya pengelolaan terhadap aset pemerintah daerah di Kabupaten Pamekasan telah dilakukan sesuai SKPD yang melakukan pengelolaan. Sebagaimana dipahami bahwa aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan tersebar di berbagai SKPD dan dimanfaatkan untuk aktivitas operasional yang mendukung program pembangunan sesuai dengan tupoksi yang ada. Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga misalnya, selama ini tercatat ada beberapa jenis aset daerah yang dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga. Aset yang ada dan dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pamekasan telah tercatat sesuai dengan nama barang, tahun pengadaan, status kepemilikan, penggunaan, asal usul serta besaran harga ketika melakukan pengadaan aset. Terkait dengan jenis aset atau barang yang ada Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki aset dalam bentuk tanah, tanah bangunan dan tanah bangunan olahraga. Sebagian besar aset yang ada dalam bentuk tanah dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan keolahragaan seperti sport center, sarana stadion dan pemandian. Meski demikian menurut catatan yang ada juga ditemukan ada aset dalam bentuk tanah bangunan yang digunakan sebagai kantor pemerintah.

Aset dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki ukuran atau luas tanah yang relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran 523 meter persegi dalam bentuk tanah sampai dengan yang paling luas yakni 8345 meter persegi yang digunakan untuk pemandian. Aset tanah dengan luas 523 meter persegi dimanfaatkan untuk sarana stadion olahraga. Menurut data yang ada aset yang dimiliki dinas ini beragam sejak tahun 1981 sampai dengan 2018 yakni dalam bentuk tanah yang digunakan untuk stadion dan terletak di kecamatan Tlanakan. Apabila memperhatikan persebaran aset yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga ternyata sebagian besar terdapat di Kecamatan Tlanakan. Menurut catatan yang ada aset yang ada mayoritas dalam bentuk tanah bangunan sport center ada di Ceguk Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Meski demikian terdapat satu aset dalam bentuk pemandian yang ada di Kecamatan Larangan dan sport center yang ada di

Kecamatan Pademawu. Bagi masyarakat di Kabupaten Pamekasan aset dalam bentuk sport center dan stadion serta fasilitas olahraga sangat penting dalam rangka mendukung aktivitas kepemudaan dan olahraga serta meningkatkan prestasi olahraga. Bagi masyarakat Pamekasan keberadaan infrastruktur dalam bentuk sport center dan stadion olahraga tidak hanya dapat menyalurkan bakat pemuda dalam bidang keolahragaan tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemuda di Kabupaten Pamekasan untuk dapat meraih prestasi di bidang olah raga baik di tingkat lokal, regional maupun internasional.

Tabel IV.7
Aset yang Dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUA S (m2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGGAL	NOMOR				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah	01.01.13.13.08	0011	8345	2003	Jl. Nyalaran Kec Larangan	Hak pakai	1981-12-25	Sertifikat No. 1	Pemandian	Pembelian	296.440.000,00	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0010	1280	2003	Jl. Dharma 12 Pamekasan	Hak pakai	1987-09-18	Sertifikat No. 15	Kantor	Pembelian	352.000.000,00	-
3	Tanah	01.01.13.13.08	0013	1894	2012	Ceguk - Tlanakan	Hak pakai	2012-04-27	Sertifikat No. 100	Sport Center	Pembelian	616.080.000,00	-
4	Tanah	01.01.13.13.08	0014	532	2012	Ceguk - Tlanakan	Hak pakai	2012-09-08	Sertifikat No. 28	Sport Center	Pembelian	177.360.000,00	-
5	Tanah	01.01.13.13.08	0015	1407	2012	Ceguk - Tlanakan	Hak pakai	2012-04-27	Sertifikat No. 99	Sport Center	Pembelian	460.240.000,00	-
6	Tanah	01.01.13.13.08	0016	1420	2012	Ceguk - Tlanakan	Hak pakai	2012-04-27	Sertifikat No. 99	Sport Center	Pembelian	464.400.000,00	-
7	Tanah	01.01.13.13.08	0017	1446	2012	Ceguk - Tlanakan	Hak pakai	2012-04-27	Sertifikat No. 99	Sport Center	Pembelian	472.720.000,00	-
8	Tanah Bangunan Olah Raga	01.01.11.04.08	009	523	2015	kabupaten pamekasan	Hak pakai	2015-03-26	1089 / BR 166594	Sarana Stadion Olahraga	Pembelian	49.445.000,00	-

9	Tanah	01.01.13.13.08	0002	732	2016	Ds. Ceguk Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan	Hak pakai	2016-05-24	1136	P.2	Pembelian	375.516.000,00	UNTUK PEMBANGUNAN SPORT CENTER
10	Tanah	01.01.13.13.08	0003	1776	2016	Ds. Sumedangan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan	Hak pakai	2016-05-24	809	P.3	Pembelian	893.328.000,00	UNTUK PEMBANGUNAN SPORT CENTER
11	Tanah	01.01.13.13.08	001535	1052	2018	desa ceguk kec.tlanakan	Hak pakai	2018-11-20	Dok.1535	untuk stadion	Pembelian	655.671.600,00	pengadaan tanah untuk stadion daerah
TOTAL												4.813.200.600,00	

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ukuran atau luas tanah yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran 523 meter persegi dalam bentuk tanah untuk sarana stadion olahraga sampai dengan yang paling luas yakni 8345 meter persegi dalam bentuk tanah bangunan pemandian. Selanjutnya dari data diatas juga terlihat bahwa aset tanah yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pamekasan seluruhnya memiliki status tanah hak pakai. Selama ini aset dalam bentuk tanah yang ada digunakan sebagai pemandian, kantor, sport center atau gedung olahraga, dan stadion olahraga. Aset tanah ini dilengkapi dengan sertifikat sejak tahun 1981 sampai dengan 2018. Sedangkan asal usul pemilikan aset tanah ini semuanya diperoleh dari hasil pembelian dengan berbagai harga dalam kisaran antara Rp. 49.445.000,- sampai dengan Rp. 893.328.000,-. Selanjutnya dari data diatas juga terlihat bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama ini yakni sejak tahun pengadaan 1981 sampai dengan 2018 untuk pembelian tanah tersebut tercatat sebesar Rp. 4.813.200.600,00,-.

Apabila memperhatikan data terkait aset yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga tersebut terlihat bahwa sebagian besar aset dimanfaatkan untuk pembangunan *sport center* dan stadion. Hal ini sangatlah wajar mengingat bahwa dinas ini memiliki tupoksi untuk memberikan fasilitas dan meningkatkan prestasi pemuda dalam bidang keolahragaan sesuai dengan bidang atau tugas pokok dan fungsi dinas. Dalam hal pengelolaan aset juga terlihat bahwa selama ini pencatatan aset telah dilakukan dengan konten meliputi ; jenis aset, tahun pengadaan, ukuran, harga, penggunaan, status sertifikat serta lokasi aset yang ada. Aset yang ada juga dalam status hak pakai dengan lokasi yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

8. Aset yang Dimiliki Kecamatan Pamekasan

Selama ini aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak hanya berada di berbagai SKPD atau dinas yang ada di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga tersebar di berbagai kecamatan. Salah satu aset yang dimiliki pemerintah daerah terletak di Kecamatan Pamekasan. Memperhatikan pentingnya

melakukan pengelolaan aset daerah maka kegiatan identifikasi dan inventarisasi aset atau barang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pamekasan harus dilakukan termasuk yang ada di berbagai wilayah kecamatan. Melalui kegiatan inventarisasi aset yang ada di kecamatan diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan lengkap serta mutakhir terkait dengan kekayaan yang dimiliki daerah. Berdasarkan kegiatan inventarisasi maka akan diperoleh informasi arat data yang memperlihatkan seluruh kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada di kecamatan Pamekasan.

Apabila memperhatikan data tentang aset yang ada di Kecamatan Pamekasan terlihat bahwa aset yang ada di Kecamatan Pamekasan telah tercatat sesuai dengan nama barang, tahun pengadaan, status kepemilikan, penggunaan, asal usul serta besaran harga ketika melakukan pengadaan aset. Menurut catatan yang ada jenis aset yang ada di Kecamatan Pamekasan seluruhnya atau sebanyak 266 berupa tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai jenis keperluan. Seluruh aset yang ada di Kecamatan Pamekasan dimiliki melalui proses pembelian dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2011. Aset yang ada di Kecamatan Pamekasan selama ini dipergunakan untuk berbagai keperluan antar alain; untuk kantor kecamatan, lahan pertanian, makam umum, kantor kelurahan atau desa, gedung sekolah TK, pasar dan sebagainya.

Selanjutnya jika memperhatikan ukuran atau luas tanah yang ada di Kecamatan Pamekasan nampak relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran kurang dari 300 meter persegi dalam bentuk tanah dan bangunan sampai dengan yang paling luas yakni lebih dari 11 ribu meter persegi. Aset yang ada di Kecamatan ini letaknya tersebar di berbagai kelurahan dan desa yang difungsikan dalam berbagai bentuk baik untuk kantor, gedung sekolah, pasar dan sebagainya. Selain telah diberikan kode barang dan register, tahun pengadaan, luas serta letak atau alamat aset berada menurut data yang ada aset yang ada juga telah dicantumkan status tanah terkait dengan tanggal dan nomor sertifikat. Di samping itu penggunaan dan asal usul serta harga aset yang dimiliki juga telah dicantumkan.

Relatif banyaknya aset milik pemerintah daerah yang ada di Kecamatan Pamekasan sesungguhnya wajar saja mengingat bahwa masyarakat di Kecamatan

Pamekasan selama ini sangat membutuhkan berbagai jenis fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung kehidupan mereka baik terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, ekonomi dan sebagainya. Berbagai jenis kebutuhan dimaksud selanjutnya diberikan fasilitas dalam bentuk aset tanah yang di atasnya dibangun infrastruktur publik seperti gedung atau kantor kelurahan dan atau desa, kantor kecamatan, sekolah, pasar lahan pertanian dan sebagainya.

Tabel IV.8
Aset yang Dimiliki Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUA S (m2)	TAHU N PENGAD AAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGIST ER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGG AL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah	01.01.13.13.08	0010	2730	2003	NYALABUH LAOK	Hak pakai	1987-10-23	Sertifikat No. 3	PERCETAAN DESA BUGIH	Pembelian	546.000.000,00	-
2	Tanah	01.01.13.13.08	0011	280	2003	DESA TORONAN	Hak pakai	1981-08-13	Sertifikat No. 2	-	Pembelian	9.800.000,00	-
3	Tanah	01.01.13.13.08	0012	1500	2003	NYALABUH DAYA	Hak pakai	1981-01-07	Sertifikat No. 1	-	Pembelian	300.000.000,00	-
4	Tanah	01.01.13.13.08	0013	1681	2003	JL TRUNOJOYO 369	Hak pakai	2005-06-06	Sertifikat No. 56	KANTOR CAMAT	Pembelian	682.500.000,00	CAMAT PAMEKASAN
5	Tanah	01.01.13.13.08	0014	1305	2003	JL JOKOTOLE NO 177	Hak Kuasai	1900-00-00	-	KANTOR LURAH BARKOT	Pembelian	1.957.500.000,00	LURAH BARURAMBAT KOTA
6	Tanah	01.01.13.13.08	0015	473	2003	TEJA BARAT	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	11.825.000,00	LURAH BARURAMBAT KOTA
7	Tanah	01.01.13.13.08	0016	8537	2003	TEJA BARAT	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	170.740.000,00	LURAH BARURAMBAT KOTA
8	Tanah	01.01.13.13.08	0017	9800	2003	TEJA BARAT	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	196.000.000,00	LURAH BARURAMBAT KOTA

9	Tanah	01.01.13.13.08	001 8	350	200 3	TEJA BARAT	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	PERTANIAN	Pembelian	8.750.000,00	LURAH BARURAMBAT KOTA
10	Tanah	01.01.13.13.08	001 9	888	200 3	TEJA BARAT	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	-	Pembelian	22.200.000,00	LURAH BARURAMBAT KOTA
11	Tanah	01.01.13.13.08	002 0	2163	200 3	TEJA BARAT	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	PERTANIAN	Pembelian	54.075.000,00	LURAH BARURAMBAT KOTA
12	Tanah	01.01.13.13.08	002 1	9050	200 3	CEGUK	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	STADION/PSC	Pembelian	271.500.000,00	LURAH BARURAMBAT KOTA
13	Tanah	01.01.13.13.08	002 2	6008	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 36	KUBURAN	Pembelian	203.000.000,00	LURAH BUGIH
14	Tanah	01.01.13.13.08	002 3	1466	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 53	-	Pembelian	53.550.000,00	LURAH BUGIH
15	Tanah	01.01.13.13.08	002 4	767	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 56	KUBURAN	Pembelian	28.000.000,00	LURAH BUGIH
16	Tanah	01.01.13.13.08	002 5	1399	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 74	PERTANIAN	Pembelian	33.250.000,00	LURAH BUGIH
17	Tanah	01.01.13.13.08	002 6	3650	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 35	PERTANIAN	Pembelian	138.250.000,00	LURAH BUGIH
18	Tanah	01.01.13.13.08	002 7	6008	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 36	PERTANIAN	Pembelian	280.000.000,00	LURAH BUGIH
19	Tanah	01.01.13.13.08	002 8	2157	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 62	PERTANIAN	Pembelian	77.000.000,00	LURAH BUGIH
20	Tanah	01.01.13.13.08	002 9	4257	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 67	PERTANIAN	Pembelian	248.500.000,00	LURAH BUGIH
21	Tanah	01.01.13.13.08	003	3033	200	BUGIH	Hak	2006-12-	Sertifikat No.	PERTANIAN	Pembelian	115.500.000,00	LURAH BUGIH

			0		3		pakai	01	41				
22	Tanah	01.01.13.13.08	003 1	1182	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 52	PERTANIAN	Pembelian	33.250.000,00	LURAH BUGIH
23	Tanah	01.01.13.13.08	003 2	2550	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 45	PERTANIAN	Pembelian	290.500.000,00	LURAH BUGIH
24	Tanah	01.01.13.13.08	003 3	407	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 39	PERTANIAN	Pembelian	30.100.000,00	LURAH BUGIH
25	Tanah	01.01.13.13.08	003 4	2480	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 60	PERTANIAN	Pembelian	180.320.000,00	LURAH BUGIH
26	Tanah	01.01.13.13.08	003 5	373	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 38	PERTANIAN	Pembelian	7.350.000,00	LURAH BUGIH
27	Tanah	01.01.13.13.08	003 6	1138	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 40	PERTANIAN	Pembelian	39.900.000,00	LURAH BUGIH
28	Tanah	01.01.13.13.08	003 7	3650	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 1	PERTANIAN	Pembelian	131.250.000,00	LURAH BUGIH
29	Tanah	01.01.13.13.08	003 8	1337	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 55	PERTANIAN	Pembelian	49.000.000,00	LURAH BUGIH
30	Tanah	01.01.13.13.08	003 9	2084	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 63	PERTANIAN	Pembelian	325.500.000,00	LURAH BUGIH
31	Tanah	01.01.13.13.08	004 0	1058	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 64	PERTANIAN	Pembelian	252.000.000,00	LURAH BUGIH
32	Tanah	01.01.13.13.08	004 1	513	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 70	PERTANIAN	Pembelian	75.000.000,00	LURAH BUGIH
33	Tanah	01.01.13.13.08	004 2	2423	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 73	PERTANIAN	Pembelian	77.000.000,00	LURAH BUGIH

34	Tanah	01.01.13.13.08	004 3	1059	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 61	PERTANIAN	Pembelian	31.500.000,00	LURAH BUGIH
35	Tanah	01.01.13.13.08	004 4	1897	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 33	PERTANIAN	Pembelian	68.250.000,00	LURAH BUGIH
36	Tanah	01.01.13.13.08	004 5	6126	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 72	PERTANIAN	Pembelian	185.500.000,00	LURAH BUGIH
37	Tanah	01.01.13.13.08	004 6	3331	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 65	PERTANIAN	Pembelian	119.000.000,00	LURAH BUGIH
38	Tanah	01.01.13.13.08	004 7	1465	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 42	PERTANIAN	Pembelian	49.000.000,00	LURAH BUGIH
39	Tanah	01.01.13.13.08	004 8	11438	200 3	BUGIH	Hak pakai	2008-06- 09	Sertifikat No. 53	KUBURAN	Pembelian	276.250.000,00	LURAH BUGIH
40	Tanah	01.01.13.13.08	004 9	476	200 3	BUGIH	Hak pakai	2008-06- 09	Sertifikat No. 80	PERTANIAN	Pembelian	15.750.000,00	LURAH BUGIH
41	Tanah	01.01.13.13.08	005 0	598	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 69	PERTANIAN	Pembelian	17.500.000,00	LURAH BUGIH
42	Tanah	01.01.13.13.08	005 1	362	200 3	BUGIH	Hak pakai	2008-06- 09	Sertifikat No. 81	PERTANIAN	Pembelian	45.000.000,00	LURAH BUGIH
43	Tanah	01.01.13.13.08	005 2	3190	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 44	PERTANIAN	Pembelian	120.750.000,00	LURAH BUGIH
44	Tanah	01.01.13.13.08	005 3	1424	200 3	BUGIH	Hak pakai	1900-00- 00	Sertifikat No. 66	PERTANIAN	Pembelian	178.500.000,00	LURAH BUGIH
45	Tanah	01.01.13.13.08	005 4	832	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 54	PERTANIAN	Pembelian	31.500.000,00	LURAH BUGIH

46	Tanah	01.01.13.13.08	005 5	1844	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 68	PERTANIAN	Pembelian	309.750.000,00	LURAH BUGIH
47	Tanah	01.01.13.13.08	005 6	1426	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 71	PERTANIAN	Pembelian	280.000.000,00	LURAH BUGIH
48	Tanah	01.01.13.13.08	005 7	1524	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 75	PERTANIAN	Pembelian	120.750.000,00	LURAH BUGIH
49	Tanah	01.01.13.13.08	005 8	7586	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 59	PERTANIAN	Pembelian	259.000.000,00	LURAH BUGIH
50	Tanah	01.01.13.13.08	005 9	1624	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 58	PERTANIAN	Pembelian	57.750.000,00	LURAH BUGIH
51	Tanah	01.01.13.13.08	006 0	407	200 3	BUGIH	Hak pakai	2006-12- 01	Sertifikat No. 38	PERTANIAN	Pembelian	14.350.000,00	LURAH BUGIH
52	Tanah	01.01.13.13.08	006 1	1062	200 3	BUGIH	Hak pakai	2008-06- 09	Sertifikat No. 79	PERTANIAN	Pembelian	7.965.000,00	LURAH BUGIH
53	Tanah	01.01.13.13.08	006 2	1037	200 3	LADEN	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	PERTANIAN	Pembelian	10.370.000,00	LURAH BUGIH
54	Tanah	01.01.13.13.08	006 3	2196	200 3	NYALABU LAOK	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	PERTANIAN	Pembelian	437.100.000,00	LURAH BUGIH
55	Tanah	01.01.13.13.08	006 4	56	200 3	BUGIH	Hak pakai	2008-06- 09	Sertifikat No. 78	PERTANIAN	Pembelian	8.150.000,00	LURAH BUGIH
56	Tanah	01.01.13.13.08	006 5	3195	200 3	TEJA TIMUR	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	PERTANIAN	Pembelian	23.962.500,00	LURAH BUGIH
57	Tanah	01.01.13.13.08	006 6	967	200 3	LADEN	Hak pakai	2008-11- 28	Sertifikat No. 59	PERTANIAN	Pembelian	9.780.000,00	LURAH BUGIH
58	Tanah	01.01.13.13.08	006	8950	200	BUGIH	Hak	1900-00-	-	PERTANIAN	Pembelian	313.250.000,00	LURAH BUGIH

			7		3		Kuasai	00					
59	Tanah	01.01.13.13.08	0068	3805	2003	NYALABU LAOK	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	570.750.000,00	LURAH BUGIH
60	Tanah	01.01.13.13.08	0069	2196	2008	NYALABU DAYA	Hak pakai	2008-06-09	Sertifikat No. 77	PERTANIAN	Pembelian	127.350.000,00	LURAH BUGIH
61	Tanah	01.01.13.13.08	0070	2520	2003	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	2008-06-09	Sertifikat No. 76	PERTANIAN	Pembelian	198.000.000,00	LURAH BUGIH
62	Tanah	01.01.13.13.08	0071	583	2003	BUGIH	Hak pakai	2006-12-01	Sertifikat No. 37	KANTOR KADES	Pembelian	85.500.000,00	LURAH BUGIH
63	Tanah	01.01.13.13.08	0072	1348	2003	BUGIH	Hak pakai	2006-12-01	Sertifikat No. 57	RUMAH	Pembelian	202.500.000,00	LURAH BUGIH
64	Tanah	01.01.13.13.08	0073	1743	2003	BUGIH	Hak pakai	2006-12-01	Sertifikat No. 34	RUMAH	Pembelian	262.500.000,00	LURAH BUGIH
65	Tanah	01.01.13.13.08	0074	2272	2003	BUGIH	Hak pakai	2006-12-01	Sertifikat No. 46	PASAR	Pembelian	67.500.000,00	LURAH BUGIH
66	Tanah	01.01.13.13.08	0075	644	2003	BUGIH	Hak pakai	2006-12-01	Sertifikat No. 51	PASAR/SEBELAH SDLB	Pembelian	18.000.000,00	LURAH BUGIH
67	Tanah	01.01.13.13.08	0076	1085	2003	JL. KH. AMIN JAKFAR V/11	Hak pakai	2002-12-24	Sertifikat No. 37	KANTOR KELURAHAN	Pembelian	192.500.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
68	Tanah	01.01.13.13.08	0077	5000	2003	TEJA TIMUR	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	250.000.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
69	Tanah	01.01.13.13.08	0078	7410	2003	RONGKARONG	Hak pakai	2002-12-24	Sertifikat No. 35	PERTANIAN	Pembelian	347.500.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
70	Tanah	01.01.13.13.08	0079	1390	2003	RONGKARONG	Hak pakai	1900-00-00	Sertifikat No. 36	PERTANIAN	Pembelian	55.000.000,00	LURAH GLADAK ANYAR

71	Tanah	01.01.13.13.08	0081	2025	200 3	DESA TAROAN	Hak pakai	2001-08-10	Sertifikat No. 1	PERTANIAN	Pembelian	130.000.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
72	Tanah	01.01.13.13.08	0082	922	200 3	DESA DUKO	Hak pakai	2002-12-24	Sertifikat No. 38	PERTANIAN	Pembelian	37.500.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
73	Tanah	01.01.13.13.08	0083	3165	200 3	DESA PANEMPAN	Hak pakai	2001-08-10	Sertifikat No. 4	PERTANIAN	Pembelian	167.450.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
74	Tanah	01.01.13.13.08	0085	155	200 3	RONGKARONG	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	321.000.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
75	Tanah	01.01.13.13.08	0086	3165	200 3	DESA TAROAN	Hak pakai	2001-08-10	Sertifikat No. 2	PERTANIAN	Pembelian	192.500.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
76	Tanah	01.01.13.13.08	0087	170	200 3	RONGKARONG	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	8.500.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
77	Tanah	01.01.13.13.08	0088	2750	200 3	RONGKARONG	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	137.500.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
78	Tanah	01.01.13.13.08	0089	11975	200 3	DUSUN DUKO	Hak pakai	2002-12-24	Sertifikat No. 39	PERTANIAN	Pembelian	317.500.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
79	Tanah	01.01.13.13.08	0090	1700	200 3	PANGLEGUR	Hak pakai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	85.000.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
80	Tanah	01.01.13.13.08	0080	3725	200 3	TEJA TIMUR	Hak pakai	2001-10-08	Sertifikat No. 47	PERTANIAN	Pembelian	195.450.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
81	Tanah	01.01.13.13.08	0090	6000	200 3	PANGLEGUR	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	300.000.000,00	LURAH GLADAK ANYAR
82	Tanah	01.01.13.13.08	0091	7320	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 16	-	Pembelian	549.000.000,00	LURAH JUNG CANGCANG

83	Tanah	01.01.13.13.08	0092	1817	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 21	PERTANIAN	Pembelian	136.275.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
84	Tanah	01.01.13.13.08	0093	5750	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 17	PERTANIAN	Pembelian	431.250.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
85	Tanah	01.01.13.13.08	0094	979	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 27	PERTANIAN	Pembelian	73.425.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
86	Tanah	01.01.13.13.08	0095	1460	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 31	-	Pembelian	109.500.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
87	Tanah	01.01.13.13.08	0096	2830	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 36	PERTANIAN	Pembelian	212.250.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
88	Tanah	01.01.13.13.08	0097	3420	200 3	TEJA TIMUR	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 44	-	Pembelian	256.500.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
89	Tanah	01.01.13.13.08	0098	970	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 30	PERTANIAN	Pembelian	72.750.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
90	Tanah	01.01.13.13.08	0099	2033	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 26	PERTANIAN	Pembelian	152.475.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
91	Tanah	01.01.13.13.08	00100	2925	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 11	-	Pembelian	219.375.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
92	Tanah	01.01.13.13.08	00101	14250	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 20	PERTANIAN	Pembelian	427.500.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
93	Tanah	01.01.13.13.08	00102	3960	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 12	PERTANIAN	Pembelian	297.000.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
94	Tanah	01.01.13.13.08	00103	2023	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 39	PERTANIAN	Pembelian	151.725.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
95	Tanah	01.01.13.13.08	00104	6870	200	JUNG CANG-CANG	Hak	1900-00-	Sertifikat No.	-	Pembelian	515.250.000,00	LURAH JUNG CANGCANG

					3		pakai	00	37				
96	Tanah	01.01.13.13.08	00105	12660	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 29	PERTANIAN	Pembelian	379.800.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
97	Tanah	01.01.13.13.08	00106	3470	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 40	PERTANIAN	Pembelian	233.250.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
98	Tanah	01.01.13.13.08	00107	1685	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 22	PERTANIAN	Pembelian	260.250.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
99	Tanah	01.01.13.13.08	00108	2126	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 41	-	Pembelian	126.375.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
100	Tanah	01.01.13.13.08	00109	726	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 14	-	Pembelian	54.450.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
101	Tanah	01.01.13.13.08	00110	4160	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1979-06-01	Sertifikat No. 10	-	Pembelian	183.689.904,19	LURAH JUNG CANGCANG
102	Tanah	01.01.13.13.08	00111	2177	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 38	PERTANIAN	Pembelian	163.275.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
103	Tanah	01.01.13.13.08	00112	7320	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 1	-	Pembelian	549.000.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
104	Tanah	01.01.13.13.08	00113	1196	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 32	PERTANIAN	Pembelian	89.700.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
105	Tanah	01.01.13.13.08	00114	481	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 25	-	Pembelian	36.075.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
106	Tanah	01.01.13.13.08	00115	130	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 28	PERTANIAN	Pembelian	9.750.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
107	Tanah	01.01.13.13.08	00116	6010	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 19	-	Pembelian	450.750.000,00	LURAH JUNG CANGCANG

108	Tanah	01.01.13.13.08	00117	2200	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 48	-	Pembelian	158.700.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
109	Tanah	01.01.13.13.08	00118	1265	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 33	PERTANIAN	Pembelian	94.875.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
110	Tanah	01.01.13.13.08	00119	4245	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 13	PERTANIAN	Pembelian	318.375.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
111	Tanah	01.01.13.13.08	00120	1894	200 3	JUNG CANG-CANG	Hak pakai	1997-01-06	Sertifikat No. 23	-	Pembelian	142.050.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
112	Tanah	01.01.13.13.08	00121	176	200 3	JUNG CANG-CANG JL BRAWIJAYA	Hak pakai	2005-06-06	Sertifikat No. 47	KANTOR KELURAHAN JUNGJANGCANG	Pembelian	17.600.000,00	LURAH JUNG CANGCANG
113	Tanah	01.01.13.13.08	00122	1196	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 7	KANTOR	Pembelian	250.000.000,00	LURAH KANGENAN
114	Tanah	01.01.13.13.08	00123	1035	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2001-02-15	Sertifikat No. 2	-	Pembelian	53.250.000,00	LURAH KANGENAN
115	Tanah	01.01.13.13.08	00124	3905	200 3	CEGUK	Hak pakai	2008-06-09	Sertifikat No. 47	PERTANIAN	Pembelian	107.500.000,00	LURAH KANGENAN
116	Tanah	01.01.13.13.08	00125	1273	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 17	PERTANIAN	Pembelian	190.950.000,00	LURAH KANGENAN
117	Tanah	01.01.13.13.08	00126	1988	200 3	TEJA TIMUR	Hak pakai	2006-12-14	Sertifikat No. 46	PERTANIAN	Pembelian	55.000.000,00	LURAH KANGENAN
118	Tanah	01.01.13.13.08	00127	4545	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2006-12-14	Sertifikat No. 33	PERTANIAN	Pembelian	500.000.000,00	LURAH KANGENAN
119	Tanah	01.01.13.13.08	00128	10271	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2006-12-14	Sertifikat No. 35	-	Pembelian	1.956.000.000,00	LURAH KANGENAN

120	Tanah	01.01.13.13.08	00129	1070	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 38	-	Pembelian	217.600.000,00	LURAH KANGENAN
121	Tanah	01.01.13.13.08	00130	3464	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 37	-	Pembelian	660.000.000,00	LURAH KANGENAN
122	Tanah	01.01.13.13.08	00131	847	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2001-12-01	Sertifikat No. 5	PERTANIAN	Pembelian	177.870.000,00	LURAH KANGENAN
123	Tanah	01.01.13.13.08	00132	1808	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2001-12-01	Sertifikat No. 4	PERTANIAN	Pembelian	315.000.000,00	LURAH KANGENAN
124	Tanah	01.01.13.13.08	00133	4545	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 15	-	Pembelian	1.000.000.000,00	LURAH KANGENAN
125	Tanah	01.01.13.13.08	00134	111	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 18	-	Pembelian	40.000.000,00	LURAH KANGENAN
126	Tanah	01.01.13.13.08	00135	6800	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 8	PERTANIAN	Pembelian	788.125.000,00	LURAH KANGENAN
127	Tanah	01.01.13.13.08	00136	4607	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 42	-	Pembelian	866.250.000,00	LURAH KANGENAN
128	Tanah	01.01.13.13.08	00137	2455	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 12	-	Pembelian	40.000.000,00	LURAH KANGENAN
129	Tanah	01.01.13.13.08	00138	836	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 16	-	Pembelian	167.200.000,00	LURAH KANGENAN
130	Tanah	01.01.13.13.08	00139	693	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 44	-	Pembelian	139.200.000,00	LURAH KANGENAN
131	Tanah	01.01.13.13.08	00140	2060	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 11	KANTOR KELURAHAN	Pembelian	309.000.000,00	LURAH KANGENAN

132	Tanah	01.01.13.13.08	00141	12700	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	1900-00-00	Sertifikat No. 14	-	Pembelian	2.540.000.000,00	LURAH KANGENAN
133	Tanah	01.01.13.13.08	00142	1748	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 21	-	Pembelian	349.600.000,00	LURAH KANGENAN
134	Tanah	01.01.13.13.08	00144	1014	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 20	PERTANIAN	Pembelian	152.100.000,00	LURAH KANGENAN
135	Tanah	01.01.13.13.08	00145	1648	200 3	CEGUK	Hak pakai	2008-10-06	Sertifikat No. 48	PERTANIAN	Pembelian	43.750.000,00	LURAH KANGENAN
136	Tanah	01.01.13.13.08	00146	10760	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2006-12-12	Sertifikat No. 34	-	Pembelian	1.356.250.000,00	LURAH KANGENAN
137	Tanah	01.01.13.13.08	00147	4607	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 42	-	Pembelian	805.000.000,00	LURAH KANGENAN
138	Tanah	01.01.13.13.08	00148	1492	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 10	-	Pembelian	260.000.000,00	LURAH KANGENAN
139	Tanah	01.01.13.13.08	00149	2390	200 3	TEJA TIMUR	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 45	PERTANIAN	Pembelian	72.250.000,00	LURAH KANGENAN
140	Tanah	01.01.13.13.08	00150	130	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 43	PERTANIAN	Pembelian	322.500.000,00	LURAH KANGENAN
141	Tanah	01.01.13.13.08	00151	2785	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 41	PERTANIAN	Pembelian	350.000.000,00	LURAH KANGENAN
142	Tanah	01.01.13.13.08	00152	572	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 6	-	Pembelian	114.400.000,00	LURAH KANGENAN
143	Tanah	01.01.13.13.08	00153	433	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 9	-	Pembelian	86.600.000,00	LURAH KANGENAN
144	Tanah	01.01.13.13.08	00154	5298	200	KEL. KANGENAN	Hak	2006-12-	Sertifikat No.	PERTANIAN	Pembelian	455.250.000,00	LURAH KANGENAN

					3		pakai	14	32				
145	Tanah	01.01.13.13.08	00155	1118	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 40	-	Pembelian	239.200.000,00	LURAH KANGENAN
146	Tanah	01.01.13.13.08	00156	1065	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2001-12-01	Sertifikat No. 3	-	Pembelian	200.000.000,00	LURAH KANGENAN
147	Tanah	01.01.13.13.08	00157	4635	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 27	PERTANIAN	Pembelian	593.750.000,00	LURAH KANGENAN
148	Tanah	01.01.13.13.08	00158	464	200 3	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-08-29	Sertifikat No. 13	PERTANIAN	Pembelian	92.800.000,00	LURAH KANGENAN
149	Tanah	01.01.13.13.08	00159	6815	200 3	KOLPAJUNG	Hak pakai	2007-10-01	Sertifikat No. 8	PERTANIAN	Pembelian	1.005.000.000,00	LURAH KOLPAJUNG
150	Tanah	01.01.13.13.08	00160	1319	200 3	KOLPAJUNG	Hak pakai	2008-11-28	Sertifikat No. 17	PERTANIAN	Pembelian	110.211.000,00	LURAH KOLPAJUNG
151	Tanah	01.01.13.13.08	00161	3996	200 3	KOLPAJUNG	Hak pakai	2007-10-01	Sertifikat No. 9	PERTANIAN	Pembelian	40.500.000,00	LURAH KOLPAJUNG
152	Tanah	01.01.13.13.08	00162	1590	200 3	KOLPAJUNG	Hak pakai	2005-06-06	Sertifikat No. 7	KANTOR LURAH	Pembelian	184.500.000,00	LURAH KOLPAJUNG
153	Tanah	01.01.13.13.08	00163	1777	200 3	KOLPAJUNG	Hak pakai	2007-12-01	Sertifikat No. 10	TANAH KOSONG	Pembelian	139.500.000,00	LURAH KOLPAJUNG
154	Tanah	01.01.13.13.08	00164	1321	200 3	KOLPAJUNG	Hak pakai	2007-12-01	Sertifikat No. 13	TANAH KOSONG	Pembelian	215.625.000,00	LURAH KOLPAJUNG
155	Tanah	01.01.13.13.08	00165	856	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2016-11-15	66 / BU 265107	LAPANGAN KOWEL	Pembelian	28.625.000,00	LURAH KOWEL
156	Tanah	01.01.13.13.08	00166	1198	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 62	-	Pembelian	30.000.000,00	LURAH KOWEL

157	Tanah	01.01.13.13.08	00167	315	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 48	-	Pembelian	7.875.000,00	LURAH KOWEL
158	Tanah	01.01.13.13.08	00168	12170	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 22	KANTOR KELURAHAN	Pembelian	334.675.000,00	LURAH KOWEL
159	Tanah	01.01.13.13.08	00169	2290	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 23	MADRASAH	Pembelian	62.975.000,00	LURAH KOWEL
160	Tanah	01.01.13.13.08	00170	1780	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 26	PERTANIAN	Pembelian	44.500.000,00	LURAH KOWEL
161	Tanah	01.01.13.13.08	00171	1130	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 64	PERTANIAN	Pembelian	95.875.000,00	LURAH KOWEL
162	Tanah	01.01.13.13.08	00172	597	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 37	PERTANIAN	Pembelian	14.925.000,00	LURAH KOWEL
163	Tanah	01.01.13.13.08	00173	5000	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 21	PERTANIAN	Pembelian	125.000.000,00	LURAH KOWEL
164	Tanah	01.01.13.13.08	00174	1200	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 48	PERTANIAN	Pembelian	30.000.000,00	LURAH KOWEL
165	Tanah	01.01.13.13.08	00175	15900	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 13	PERTANIAN	Pembelian	318.000.000,00	LURAH KOWEL
166	Tanah	01.01.13.13.08	00176	374	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-09-06	Sertifikat No. 55	PERTANIAN	Pembelian	9.400.000,00	LURAH KOWEL
167	Tanah	01.01.13.13.08	00177	1225	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 43	PERTANIAN	Pembelian	30.625.000,00	LURAH KOWEL
168	Tanah	01.01.13.13.08	00178	3835	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 14	PERTANIAN	Pembelian	95.875.000,00	LURAH KOWEL

169	Tanah	01.01.13.13.08	00179	813	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 63	PERTANIAN	Pembelian	55.000.000,00	LURAH KOWEL
170	Tanah	01.01.13.13.08	00180	2780	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 50	PERTANIAN	Pembelian	59.200.000,00	LURAH KOWEL
171	Tanah	01.01.13.13.08	00181	558	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 35	PERTANIAN	Pembelian	13.950.000,00	LURAH KOWEL
172	Tanah	01.01.13.13.08	00182	7120	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 47	PERTANIAN	Pembelian	178.000.000,00	LURAH KOWEL
173	Tanah	01.01.13.13.08	00183	4620	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 11	PERTANIAN	Pembelian	115.500.000,00	LURAH KOWEL
174	Tanah	01.01.13.13.08	00184	3920	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 33	PERTANIAN	Pembelian	72.250.000,00	LURAH KOWEL
175	Tanah	01.01.13.13.08	00185	700	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 61	PERTANIAN	Pembelian	18.750.000,00	LURAH KOWEL
176	Tanah	01.01.13.13.08	00186	3920	200 3	KEL. KOWEL	Hak Kuasai	1900-00-00	-	PERTANIAN	Pembelian	98.000.000,00	LURAH KOWEL
177	Tanah	01.01.13.13.08	00187	4475	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 20	PERTANIAN	Pembelian	111.875.000,00	LURAH KOWEL
178	Tanah	01.01.13.13.08	00188	10215	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 12	PERTANIAN	Pembelian	204.300.000,00	LURAH KOWEL
179	Tanah	01.01.13.13.08	00189	710	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-06-08	Sertifikat No. 60	PERTANIAN	Pembelian	18.600.000,00	LURAH KOWEL
180	Tanah	01.01.13.13.08	00190	700	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-06-08	Sertifikat No. 61	PERTANIAN	Pembelian	16.300.000,00	LURAH KOWEL
181	Tanah	01.01.13.13.08	00191	3530	200	LEMPER PADEMAWU	Hak	2001-05-	Sertifikat No.	PERTANIAN	Pembelian	8.825.000,00	LURAH KOWEL

					3		pakai	22	3				
182	Tanah	01.01.13.13.08	00192	7965	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 17	PERTANIAN	Pembelian	199.125.000,00	LURAH KOWEL
183	Tanah	01.01.13.13.08	00193	3315	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 38	PERTANIAN	Pembelian	82.875.000,00	LURAH KOWEL
184	Tanah	01.01.13.13.08	00194	2400	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 15	PERTANIAN	Pembelian	60.000.000,00	LURAH KOWEL
185	Tanah	01.01.13.13.08	00195	2930	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 59	PERTANIAN	Pembelian	27.475.000,00	LURAH KOWEL
186	Tanah	01.01.13.13.08	00196	1946	200 3	LEMPER PADEMAWU	Hak pakai	2001-05-06	Sertifikat No. 1	PERTANIAN	Pembelian	4.865.000,00	LURAH KOWEL
187	Tanah	01.01.13.13.08	00197	7335	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 24	PERTANIAN	Pembelian	183.375.000,00	LURAH KOWEL
188	Tanah	01.01.13.13.08	00198	11565	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-04-11	Sertifikat No. 42	PERTANIAN	Pembelian	231.300.000,00	LURAH KOWEL
189	Tanah	01.01.13.13.08	00199	3440	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 28	PERTANIAN	Pembelian	86.000.000,00	LURAH KOWEL
190	Tanah	01.01.13.13.08	00200	3745	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 40	PERTANIAN	Pembelian	185.375.000,00	LURAH KOWEL
191	Tanah	01.01.13.13.08	00201	1749	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 56	PERTANIAN	Pembelian	32.425.000,00	LURAH KOWEL
192	Tanah	01.01.13.13.08	00202	9089	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2006-01-18	Sertifikat No. 51	PERTANIAN	Pembelian	93.625.000,00	LURAH KOWEL
193	Tanah	01.01.13.13.08	00203	1610	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 32	PERTANIAN	Pembelian	40.250.000,00	LURAH KOWEL

194	Tanah	01.01.13.13.08	00204	1485	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 58	PERTANIAN	Pembelian	10.400.000,00	LURAH KOWEL
195	Tanah	01.01.13.13.08	00205	1750	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 39	PERTANIAN	Pembelian	43.750.000,00	LURAH KOWEL
196	Tanah	01.01.13.13.08	00206	1330	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 31	PERTANIAN	Pembelian	33.250.000,00	LURAH KOWEL
197	Tanah	01.01.13.13.08	00207	1185	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 45	PERTANIAN	Pembelian	29.625.000,00	LURAH KOWEL
198	Tanah	01.01.13.13.08	00208	5580	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 41	PERTANIAN	Pembelian	139.500.000,00	LURAH KOWEL
199	Tanah	01.01.13.13.08	00209	1414	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2006-01-18	Sertifikat No. 49	PERTANIAN	Pembelian	30.900.000,00	LURAH KOWEL
200	Tanah	01.01.13.13.08	00210	2270	200 3	LEMPER PADEMAWU	Hak pakai	2001-05-06	Sertifikat No. 4	PERTANIAN	Pembelian	5.675.000,00	LURAH KOWEL
201	Tanah	01.01.13.13.08	00211	2160	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 19	PERTANIAN	Pembelian	54.000.000,00	LURAH KOWEL
202	Tanah	01.01.13.13.08	00212	11750	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 16	PERTANIAN	Pembelian	235.000.000,00	LURAH KOWEL
203	Tanah	01.01.13.13.08	00213	5915	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-04-11	Sertifikat No. 10	PERTANIAN	Pembelian	147.875.000,00	LURAH KOWEL
204	Tanah	01.01.13.13.08	00214	9200	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 27	PERTANIAN	Pembelian	230.000.000,00	LURAH KOWEL
205	Tanah	01.01.13.13.08	00215	1920	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-10-19	Sertifikat No. 44	PERTANIAN	Pembelian	48.000.000,00	LURAH KOWEL

206	Tanah	01.01.13.13.08	00216	625	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-08- 06	Sertifikat No. 54	PERTANIAN	Pembelian	16.050.000,00	LURAH KOWEL
207	Tanah	01.01.13.13.08	00217	1328	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2008-08- 06	Sertifikat No. 57	PERTANIAN	Pembelian	11.000.000,00	LURAH KOWEL
208	Tanah	01.01.13.13.08	00218	3930	200 3	LEMPER PADEMAWU	Hak pakai	2001-05- 06	Sertifikat No. 2	PERTANIAN	Pembelian	9.825.000,00	LURAH KOWEL
209	Tanah	01.01.13.13.08	00219	10165	200 3	KEL. KOWEL	Hak pakai	2000-04- 11	Sertifikat No. 25	PERTANIAN	Pembelian	254.125.000,00	LURAH KOWEL
210	Tanah	01.01.13.13.08	00220	1807	200 3	TEJA TIMUR	Hak pakai	2006-09- 28	Sertifikat No. 97	PERTANIAN	Pembelian	49.140.000,00	LURAH PARTEKER
211	Tanah	01.01.13.13.08	00221	2190	200 3	TEJA TIMUR	Hak pakai	2006-12- 13	Sertifikat No. 28	PERTANIAN	Pembelian	67.230.000,00	LURAH PARTEKER
212	Tanah	01.01.13.13.08	00222	10768	200 3	SAMIRAN (PROPPO)	Hak pakai	2006-09- 28	Sertifikat No. 14	PERTANIAN	Pembelian	272.700.000,00	LURAH PARTEKER
213	Tanah	01.01.13.13.08	00223	1402	200 3	BANYU BULU (PROPPO)	Hak pakai	2006-04- 28	Sertifikat No. 2	PERTANIAN	Pembelian	68.850.000,00	LURAH PARTEKER
214	Tanah	01.01.13.13.08	00224	4998	200 3	BETTET	Hak pakai	2006-11- 25	Sertifikat No. 49	PERTANIAN	Pembelian	151.200.000,00	LURAH PARTEKER
215	Tanah	01.01.13.13.08	00225	1931	200 3	BANYU BULU (PROPPO)	Hak pakai	2008-01- 29	Sertifikat No. 29	PERTANIAN	Pembelian	43.200.000,00	LURAH PARTEKER
216	Tanah	01.01.13.13.08	00226	1371	200 3	BETTET	Hak pakai	2006-11- 25	Sertifikat No. 50	PERTANIAN	Pembelian	41.850.000,00	LURAH PARTEKER
217	Tanah	01.01.13.13.08	00227	2480	200 3	DS. TEJA TEMOR PAMEKASAN	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	PERTANIAN	Pembelian	66.960.000,00	LURAH PARTEKER
218	Tanah	01.01.13.13.08	00228	130	200	JL. ABD. AZIZ 110	Hak	1900-00-	-	KANTOR	Pembelian	19.500.000,00	LURAH PARTEKER

					3		Kuasai	00		PANWASLU			
219	Tanah	01.01.13.13.08	00229	2300	200 3	KELURAHAN PATEMON	Hak pakai	2005-10- 06	Sertifikat No. 8	KANTOR KELURAHAN	Pembelian	1.725.000.000,00	LURAH PATEMON
220	Tanah	01.01.13.13.08	00230	6581	200 3	BARAT SUNGAI KEL PATEMON	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	-	Pembelian	1.316.200.000,00	LURAH PATEMON
221	Tanah	01.01.13.13.08	00231	2000	200 3	PATEMON	Hak pakai	2012-12- 13	Sertifikat No. 22	Eks. Pasar Gurem Belakang Pasar	Pembelian	153.000.000,00	LURAH PATEMON
222	Tanah	01.01.13.13.08	00232	6565	200 3	LADEN	Hak pakai	1984-03- 30	Sertifikat No. 17	PASAR	Pembelian	987.150.000,00	LURAH PATEMON
223	Tanah	01.01.13.13.08	00233	4950	200 3	BARAT SUNGAI KELURAHAN PATEMON	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	PERTANIAN	Pembelian	990.000.000,00	LURAH PATEMON
224	Tanah	01.01.13.13.08	00234	619	200 3	LADEN	Hak pakai	2007-11- 07	Sertifikat No. 57	Pasar Desa	Pembelian	94.800.000,00	LURAH PATEMON
225	Tanah	01.01.13.13.08	00235	297	200 3	PATEMON	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	-	Pembelian	44.550.000,00	LURAH PATEMON
226	Tanah	01.01.13.13.08	00236	11561	200 3	LARANGAN TOKOL	Hak Kuasai	1900-00- 00	-	-	Pembelian	1.530.000.000,00	LURAH PATEMON
227	Tanah	01.01.13.13.08	00237	1879	200 3	PATEMON	Hak pakai	2006-04- 28	Sertifikat No. 20	-	Pembelian	78.750.000,00	LURAH PATEMON
228	Tanah	01.01.13.13.08	00238	4635	200 3	KANGENAN	Hak pakai	2006-04- 28	Sertifikat No. 27	-	Pembelian	875.700.000,00	LURAH PATEMON
229	Tanah	01.01.13.13.08	00239	1525	200 3	KANGENAN	Hak pakai	2008-06- 08	Sertifikat No. 43	-	Pembelian	217.500.000,00	LURAH PATEMON
230	Tanah	01.01.13.13.08	00240	3762	200	PATEMON	Hak	1900-00-	-	PERTANIAN	Pembelian	83.550.000,00	LURAH PATEMON

					3		Kuasai	00					
231	Tanah	01.01.13.13.08	00241	4010	200 3	PATEMON	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 17	-	Pembelian	742.500.000,00	LURAH PATEMON
232	Tanah	01.01.13.13.08	00242	1068	200 3	PATEMON	Hak pakai	2011-07-12	Sertifikat No. 19	PERTANIAN	Pembelian	66.150.000,00	LURAH PATEMON
233	Tanah	01.01.13.13.08	00243	1132	200 3	PATEMON	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 12	-	Pembelian	184.500.000,00	LURAH PATEMON
234	Tanah	01.01.13.13.08	00244	805	200 3	LADEN	Hak pakai	2004-03-30	Sertifikat No. 40	-	Pembelian	125.100.000,00	LURAH PATEMON
235	Tanah	01.01.13.13.08	00245	2178	200 3	KANGENAN	Hak pakai	2008-06-08	Sertifikat No. 36	-	Pembelian	101.550.000,00	LURAH PATEMON
236	Tanah	01.01.13.13.08	00246	10608	200 3	PATEMON	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 9	-	Pembelian	1.732.500.000,00	LURAH PATEMON
237	Tanah	01.01.13.13.08	00247	1674	200 3	LADEN	Hak pakai	2004-03-30	Sertifikat No. 45	-	Pembelian	255.900.000,00	LURAH PATEMON
238	Tanah	01.01.13.13.08	00248	1041	200 3	KANGENAN	Hak pakai	2002-06-29	Sertifikat No. 16	-	Pembelian	126.150.000,00	LURAH PATEMON
239	Tanah	01.01.13.13.08	00249	2133	200 3	PANEMPAN	Hak pakai	2004-02-18	Sertifikat No. 40	-	Pembelian	300.000.000,00	LURAH PATEMON
240	Tanah	01.01.13.13.08	00250	5523	200 3	PANGLEGUR	Hak pakai	2008-06-08	Sertifikat No. 12	-	Pembelian	375.000.000,00	LURAH PATEMON
241	Tanah	01.01.13.13.08	00251	3192	200 3	LADEN	Hak Kuasai	1900-00-00	-	-	Pembelian	478.800.000,00	LURAH PATEMON
242	Tanah	01.01.13.13.08	00252	6483	200 3	PATEMON	Hak pakai	2006-04-22	Sertifikat No. 18	-	Pembelian	952.500.000,00	LURAH PATEMON

243	Tanah	01.01.13.13.08	00253	1879	200 3	PATEMON	Hak Kuasai	1900-00-00	-	-	Pembelian	112.500.000,00	LURAH PATEMON
244	Tanah	01.01.13.13.08	00254	656	200 3	LADEN	Hak Kuasai	1900-00-00	-	-	Pembelian	98.400.000,00	LURAH PATEMON
245	Tanah	01.01.13.13.08	00255	1869	200 3	LADEN	Hak Kuasai	1900-00-00	-	-	Pembelian	280.350.000,00	LURAH PATEMON
246	Tanah	01.01.13.13.08	00256	3512	200 3	KANGENAN	Hak Kuasai	1900-00-00	-	-	Pembelian	750.600.000,00	LURAH PATEMON
247	Tanah	01.01.13.13.08	00257	1058	200 3	PATEMON	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 13	TANAH PERTANIAN	Pembelian	257.094.000,00	-
248	Tanah	01.01.13.13.08	00258	2749	200 3	PANGLEGUR	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 14	TANAH PERTANIAN	Pembelian	225.418.000,00	TANAH PATEMON DI PANGLEGUR
249	Tanah	01.01.13.13.08	00259	1818	200 3	PATEMON	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 16	TANAH PERTANIAN	Pembelian	363.600.000,00	-
250	Tanah	01.01.13.13.08	00260	3045	200 3	PATEMON	Hak pakai	2006-04-28	Sertifikat No. 15	TANAH PERTANIAN	Pembelian	609.000.000,00	-
251	Tanah	01.01.13.13.08	00261	620	200 3	KANGENAN	Hak pakai	2004-10-11	Sertifikat No. 22	KANTOR KELURAHAN KANGENAN	Pembelian	117.800.000,00	-
252	Tanah	01.01.13.13.08	00264	800	201 1	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2002-09-20	Sertifikat No. 19	PERTANIAN	Pembelian	38.400.000,00	-
253	Tanah	01.01.13.13.08	00265	1045	201 1	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2006-12-14	Sertifikat No. 29	PERTANIAN	Pembelian	50.160.000,00	-
254	Tanah	01.01.13.13.08	00266	1459	201 1	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2006-12-14	Sertifikat No. 30	PERTANIAN	Pembelian	70.032.000,00	-

255	Tanah	01.01.13.13.08	00267	681	201 1	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 36	PERTANIAN	Pembelian	32.688.000,00	-
256	Tanah	01.01.13.13.08	00268	7162	201 1	KEL. KANGENAN	Hak pakai	2008-08-06	Sertifikat No. 39	PERTANIAN	Pembelian	343.776.000,00	-
257	Tanah	01.01.13.13.08	00269	2862	201 1	KOLPAJUNG (ada di TEJA BARAT)	Hak pakai	2008-03-12	Sertifikat No. 3	PERTANIAN	Pembelian	294.786.000,00	-
258	Tanah	01.01.13.13.08	00270	1712	201 1	KOLPAJUNG (ada di TEJA BARAT)	Hak pakai	2008-03-12	Sertifikat No. 4	PERTANIAN	Pembelian	176.336.000,00	-
259	Tanah	01.01.13.13.08	00272	3482	201 1	KOLPAJUNG	Hak pakai	2007-12-01	Sertifikat No. 11	PERTANIAN	Pembelian	358.646.000,00	-
260	Tanah	01.01.13.13.08	00273	2301	201 1	KOLPAJUNG	Hak pakai	2007-12-01	Sertifikat No. 12	PERTANIAN	Pembelian	237.003.000,00	-
261	Tanah	01.01.13.13.08	00274	3328	201 1	KOLPAJUNG	Hak pakai	2007-12-01	Sertifikat No. 14	PERTANIAN	Pembelian	342.784.000,00	-
262	Tanah	01.01.13.13.08	00275	3727	201 1	KOLPAJUNG	Hak pakai	2007-12-01	Sertifikat No. 15	PERTANIAN	Pembelian	383.881.000,00	-
263	Tanah	01.01.13.13.08	00276	2365	201 1	KOLPAJUNG	Hak pakai	2007-12-01	Sertifikat No. 16	PERTANIAN	Pembelian	243.595.000,00	-
264	Tanah	01.01.13.13.08	00277	1784	201 1	TEJA TIMUR	Hak pakai	2006-09-28	Sertifikat No. 98	PERTANIAN	Pembelian	17.840.000,00	-
265	Tanah	01.01.13.13.08	00281	894	201 2	Kelurahan Kolpajung	Hak pakai	2012-12-13	Sertifikat No. 19	Eks. Kolpajung Belakang Las	Pembelian	92.082.000,00	-
266	Tanah	01.01.13.13.08	00283	1825	201 2	JL. R. ABD. AZIZ KEC. PAMEKASAN	Hak pakai	2000-11-22	Sertifikat No. 15	PASAR GUREM	Pembelian	1.053.000.000,00	Sekarang Kantor Kel. Parteker 2013
TOTAL												64.185.074.404,19	

Memperhatikan tabel diatas terlihat jelas bahwa aset pemerintah Kabupaten Pamekasan yang ada di Kecamatan Pamekasan tersebar di berbagai wilayah baik desa maupun kelurahan. Menurut catatan yang ada aset yang ada sebagian besar tercatat dalam bentuk tanah meski dalam kenyataan diatas tanah telah dibangun berbagai gedung atau bangunan yang dimanfaatkan untuk kantor, sekolah, pasar, lahan pertanian dan sebagainya. Ketersediaan berbagai jenis infrastruktur publik yang merupakan aset daerah ini memberikan makna yang sangat penting bagi masyarakat sebab dengan adanya aset tersebut masyarakat akan memperoleh fasilitas dan dukungan baik dalam aktivitas ekonomi produktif, pendidikan, administrasi kependudukan bahkan dapat memberikan hasil dari aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian. Aset dalam bentuk pasar misalnya, diharapkan akan memberikan dukungan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat masyarakat di berbagai wilayah di Kecamatan tersebut. Sedangkan ketersediaan aset dalam bentuk kantor desa atau kantor kelurahan dan kantor kecamatan akan sangat berarti bagi masyarakat sebab akan dapat mendukung dan meningkatkan pelayanan publik dalam aspek administrasi kependudukan dan kepentingan yang lainnya. Sementara itu aset dalam bentuk gedung sekolah akan mampu memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan proses belajar serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Pamekasan.

Uraian diatas memberikan ilustrasi aset milik daerah sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan. Aset milik daerah sudah sewajarnya dimanfaatkan dan didayagunakan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat secara luas. Dengan mendayagunakan secara optimal aset yang ada maka akan memberikan berbagai manfaat antara lain; (a). memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan, pelayanan publik di bidang kependudukan, pekerjaan di sektor pertanian, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi produktif dan sebagainya; (b). tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya biaya dikaitkan dengan segi pemeliharaan dan pengamanannya, terutama untuk mencegah kemungkinan penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab; (c). Apabila aset daerah dimanfaatkan

secara optimal akan dapat meningkatkan atau menciptakan sumber PAD dan (d). Pemanfaatan aset daerah yang optimal akan menambah peluang penyerapan tenaga kerja dan akan menciptakan sumber pendapatan masyarakat. Dengan demikian ke depan diharapkan aset milik daerah seharusnya dapat ditingkatkan pemanfaatannya sehingga lebih bernilai guna dan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

9. Aset yang Dimiliki Kecamatan Pademawu

Selama ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga memiliki aset daerah yang terletak di Kecamatan Pademawu. Tidak berbeda dengan Kecamatan Pamekasan aset daerah yang terletak di Kecamatan Pademawu umumnya tercatat dalam bentuk tanah. Menurut catatan yang ada sampai dengan tahun 2018 di kecamatan Pademawu ada sebanyak 84 aset dalam bentuk tanah. Tidak jauh berbeda dengan kecamatan lain apabila memperhatikan data tentang aset yang ada di Kecamatan Pademawu terlihat bahwa aset yang ada telah dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan yakni dengan nama barang atau aset yang dimiliki, tahun pengadaan, nomor kode barang, luas tanah, status kepemilikan, tahun pengadaan, penggunaan, asal usul serta besaran harga ketika melakukan pengadaan aset. Menurut catatan yang ada jenis aset yang ada di Kecamatan Pademawu seluruhnya berupa tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai jenis keperluan. Seluruh aset yang ada di Kecamatan Pademawu dimiliki melalui proses pembelian dalam tahun 2003. Selama ini aset yang ada di Kecamatan Pademawu telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain; sebagai lokasi kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, gedung TK, lahan pertanian, pasar dan sebagainya.

Selanjutnya apabila menyimak ukuran atau luas tanah yang ada di Kecamatan Pademawu nampak relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran luas sekitar 524 meter persegi dan yang paling luas berukuran sekitar 31.111 meter persegi. Aset yang ada di Kecamatan ini letaknya tersebar di berbagai kelurahan dan desa yang difungsikan dalam berbagai bentuk baik untuk kantor, gedung sekolah, pasar dan sebagainya. Selain telah diberikan kode barang dan register, tahun pengadaan, luas serta letak atau alamat aset berada menurut data yang ada aset yang ada juga telah dicantumkan status tanah terkait dengan

tanggal dan nomor sertifikat. Di samping itu penggunaan dan asal usul serta harga aset yang dimiliki juga telah dicantumkan. Relatif banyaknya aset milik pemerintah daerah yang ada di Kecamatan Pademawu selama ini telah mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang ada di Kecamatan Pademawu. Sebagaimana terjadi di wilayah lain masyarakat Pademawu juga membutuhkan berbagai jenis fasilitas sarana dan prasarana baik yang memiliki keterkaitan dengan urusan ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, kependudukan dan sebagainya. Dengan tersedianya aset daerah yang ada di kecamatan Pademawu masyarakat memberikan respon positif sebab berbagai kebutuhan mereka dapat terfasilitasi oleh adanya berbagai jenis infrastruktur publik seperti; ekonomi yakni dalam bentuk bangunan pasar, dalam aspek pendidikan telah ada aset dalam bentuk gedung sekolah, penyediaan lahan pertanian untuk menyerap tenaga kerja, kantor camat, kantor desa dan kelurahan yang selama ini turut membantu dalam memberikan layanan publik bidang kependudukan.

Tabel IV.9
Aset yang Dimiliki Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (m2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah	01.01.13.13.08	0010	1440	2003	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	1994-10-14	Sertifikat No. 52	PASAR	Pembelian	36.000.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
2	Tanah	01.01.13.13.08	0011	1772	2003	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2001-02-15	Sertifikat No. 50	PASAR	Pembelian	44.300.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
3	Tanah	01.01.13.13.08	0013	1630	2003	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2002-02-15	Sertifikat No. 27	PERTANIAN	Pembelian	40.750.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
4	Tanah	01.01.13.13.08	0014	3665	2003	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2003-02-15	Sertifikat No. 46	PERTANIAN	Pembelian	91.625.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
5	Tanah	01.01.13.13.08	0015	16660	2003	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	1981-06-29	Sertifikat No. 11	PERTANIAN	Pembelian	263.875.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
6	Tanah	01.01.13.13.08	0016	1080	2003	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	1987-09-23	Sertifikat No. 3	PERTANIAN	Pembelian	26.700.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
7	Tanah	01.01.13.13.08	0017	3625	2003	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2001-02-15	Sertifikat No. 51	PERTANIAN	Pembelian	90.625.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
8	Tanah	01.01.13.13.08	0018	1889	2003	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2002-02-15	Sertifikat No. 29	PERTANIAN	Pembelian	45.875.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR

9	Tanah	01.01.13.13.08	001 9	3470	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2003-02- 15	Sertifikat No. 59	PERTANIAN	Pembelian	86.750.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
10	Tanah	01.01.13.13.08	002 0	2655	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2004-02- 15	Sertifikat No. 61	PERTANIAN	Pembelian	66.375.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
11	Tanah	01.01.13.13.08	002 1	2560	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2005-02- 15	Sertifikat No. 42	PERTANIAN	Pembelian	64.000.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
12	Tanah	01.01.13.13.08	002 2	3650	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2006-02- 15	Sertifikat No. 35	PERTANIAN	Pembelian	91.250.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
13	Tanah	01.01.13.13.08	002 3	3385	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2007-02- 15	Sertifikat No. 45	PERTANIAN	Pembelian	84.625.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
14	Tanah	01.01.13.13.08	002 4	3230	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2008-02- 15	Sertifikat No. 37	PERTANIAN	Pembelian	80.750.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
15	Tanah	01.01.13.13.08	002 5	1690	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2009-02- 15	Sertifikat No. 30	PERTANIAN	Pembelian	42.250.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
16	Tanah	01.01.13.13.08	002 6	1745	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2001-01- 29	Sertifikat No. 36	PERTANIAN	Pembelian	43.625.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
17	Tanah	01.01.13.13.08	002 7	3885	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2001-02- 15	Sertifikat No. 40	PERTANIAN	Pembelian	97.125.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
18	Tanah	01.01.13.13.08	002 8	5340	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2002-02- 15	Sertifikat No. 41	PERTANIAN	Pembelian	133.500.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
19	Tanah	01.01.13.13.08	002 9	4790	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2003-02- 15	Sertifikat No. 55	PERTANIAN	Pembelian	119.750.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
20	Tanah	01.01.13.13.08	003 0	2960	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2004-02- 15	Sertifikat No. 53	PERTANIAN	Pembelian	74.000.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
21	Tanah	01.01.13.13.08	003	2200	200	BARURAMAT TIMUR	Hak	2005-02-	Sertifikat No.	PERTANIAN	Pembelian	55.000.000,00	LURAH BARURAMBAT

			1		3		pakai	15	48				TEMOR
22	Tanah	01.01.13.13.08	003 2	3380	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2006-02- 15	Sertifikat No. 39	PERTANIAN	Pembelian	84.500.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
23	Tanah	01.01.13.13.08	003 3	2145	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2007-02- 15	Sertifikat No. 58	PERTANIAN	Pembelian	53.625.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
24	Tanah	01.01.13.13.08	003 4	4005	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2008-02- 15	Sertifikat No. 33	PERTANIAN	Pembelian	100.125.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
25	Tanah	01.01.13.13.08	003 5	4970	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2009-02- 15	Sertifikat No. 34	PERTANIAN	Pembelian	124.250.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
26	Tanah	01.01.13.13.08	003 6	6480	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2010-02- 15	Sertifikat No. 60	PERTANIAN	Pembelian	162.000.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
27	Tanah	01.01.13.13.08	003 7	3020	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2011-02- 15	Sertifikat No. 57	PERTANIAN	Pembelian	75.500.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
28	Tanah	01.01.13.13.08	003 8	1835	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2011-02- 15	Sertifikat No. 54	PERTANIAN	Pembelian	47.225.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
29	Tanah	01.01.13.13.08	003 9	1605	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2011-02- 15	Sertifikat No. 49	PASAR	Pembelian	40.125.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
30	Tanah	01.01.13.13.08	004 0	581	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2005-06- 06	Sertifikat No. 64	PERTANIAN	Pembelian	16.225.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
31	Tanah	01.01.13.13.08	004 1	3536	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	1989-09- 23	Sertifikat No. 24	PERTANIAN	Pembelian	90.000.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
32	Tanah	01.01.13.13.08	004 2	3650	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2001-02- 15	Sertifikat No. 56	PERTANIAN	Pembelian	91.250.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
33	Tanah	01.01.13.13.08	004 3	5260	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2002-02- 15	Sertifikat No. 38	PERTANIAN	Pembelian	131.500.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR

34	Tanah	01.01.13.13.08	004 4	1559	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2003-02- 15	Sertifikat No. 28	PERTANIAN	Pembelian	38.975.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
35	Tanah	01.01.13.13.08	004 5	3105	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	1987-09- 18	Sertifikat No. 4	PERTANIAN	Pembelian	76.250.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
36	Tanah	01.01.13.13.08	004 6	1380	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 67	-	Pembelian	452.340.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA (tukar menukar)
37	Tanah	01.01.13.13.08	004 7	966	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2004-10- 11	Sertifikat No. 65	PERTANIAN	Pembelian	193.200.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
38	Tanah	01.01.13.13.08	004 8	908	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2004-10- 11	Sertifikat No. 66	PERTANIAN	Pembelian	181.600.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
39	Tanah	01.01.13.13.08	004 9	649	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2001-02- 15	Sertifikat No. 43	PERTANIAN	Pembelian	16.225.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
40	Tanah	01.01.13.13.08	005 0	1068	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2001-02- 15	Sertifikat No. 47	PERTANIAN	Pembelian	26.700.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
41	Tanah	01.01.13.13.08	005 1	3119	200 3	BARURAMAT TIMUR	Hak pakai	2009-01- 27	Sertifikat No. 69	PERTANIAN	Pembelian	623.800.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
42	Tanah	01.01.13.13.08	005 3	19595	200 3	DS PADELEGAN PADEMAWU	Hak pakai	1994-10- 14	Sertifikat No. 61	TAMBAK GARAM	Pembelian	195.950.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
43	Tanah	01.01.13.13.08	005 4	4800	200 3	JL RAYA BUNDER PADEMAWU	Hak pakai	1900-00- 00	-	KANTOR CAMAT	Pembelian	216.000.000,00	CAMAT PADEMAWU
44	Tanah	01.01.13.13.08	005 5	2265	200 3	JL. JOKOTOLE	Hak pakai	2001-01- 29	Sertifikat No. 32	GED. TK	Pembelian	283.125.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR
45	Tanah	01.01.13.13.08	005 6	572	200 3	JL. VETERAN	Hak pakai	2001-01- 29	Sertifikat No. 62	KANTOR KADES	Pembelian	21.450.000,00	LURAH BARURAMBAT TEMOR

46	Tanah	01.01.13.13.08	005 7	2920	200 3	LARANGAN BADUNG	Hak pakai	2004-10- 29	Sertifikat No. 259	-	Pembelian	50.400.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA (tukar menukar)
47	Tanah	01.01.13.13.08	005 8	4839	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2007-10- 11	Sertifikat No. 70	PERTANIAN	Pembelian	246.950.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
48	Tanah	01.01.13.13.08	005 9	2417	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 61	-	Pembelian	121.300.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
49	Tanah	01.01.13.13.08	006 0	1579	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-06- 20	Sertifikat No. 52	-	Pembelian	65.700.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
50	Tanah	01.01.13.13.08	006 1	6370	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2007-10- 11	Sertifikat No. 57	-	Pembelian	381.150.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
51	Tanah	01.01.13.13.08	006 2	6555	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2007-10- 11	Sertifikat No. 55	-	Pembelian	368.000.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
52	Tanah	01.01.13.13.08	006 3	1100	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2005-10- 13	Sertifikat No. 35	-	Pembelian	62.350.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
53	Tanah	01.01.13.13.08	006 4	524	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 59	-	Pembelian	34.050.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
54	Tanah	01.01.13.13.08	006 5	2520	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2005-10- 13	Sertifikat No. 41	-	Pembelian	124.150.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
55	Tanah	01.01.13.13.08	006 6	17335	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2007-10- 11	Sertifikat No. 72	-	Pembelian	684.355.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
56	Tanah	01.01.13.13.08	006 7	1010	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2005-10- 13	Sertifikat No. 42	-	Pembelian	21.400.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
57	Tanah	01.01.13.13.08	006 8	3550	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2005-10- 13	Sertifikat No. 37	-	Pembelian	199.050.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
58	Tanah	01.01.13.13.08	006	1980	200	LAWANGAN DAYA	Hak	2005-10-	Sertifikat No.	-	Pembelian	97.500.000,00	LURAH LAWANGAN

			9		3		pakai	13	38				DAYA
59	Tanah	01.01.13.13.08	007 0	1613	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 65	-	Pembelian	77.950.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
60	Tanah	01.01.13.13.08	007 1	5200	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-06- 20	Sertifikat No. 51	-	Pembelian	162.250.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
61	Tanah	01.01.13.13.08	007 2	9139	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2007-10- 11	Sertifikat No. 54	-	Pembelian	421.900.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
62	Tanah	01.01.13.13.08	007 3	2897	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2005-10- 13	Sertifikat No. 44	-	Pembelian	105.150.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
63	Tanah	01.01.13.13.08	007 4	9096	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2007-11- 13	Sertifikat No. 73	-	Pembelian	531.475.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
64	Tanah	01.01.13.13.08	007 5	5010	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-06- 20	Sertifikat No. 50	-	Pembelian	257.700.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
65	Tanah	01.01.13.13.08	007 6	4165	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2005-10- 13	Sertifikat No. 40	-	Pembelian	187.500.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
66	Tanah	01.01.13.13.08	007 7	1020	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2004-10- 11	Sertifikat No. 33	KELURAHAN LAMA LADA	Pembelian	51.150.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
67	Tanah	01.01.13.13.08	007 8	3192	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2007-10- 11	Sertifikat No. 53	-	Pembelian	482.265.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
68	Tanah	01.01.13.13.08	007 9	1975	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2005-10- 13	Sertifikat No. 43	-	Pembelian	165.400.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
69	Tanah	01.01.13.13.08	008 0	31111	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 60	EKS TKD	Pembelian	4.977.760.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
70	Tanah	01.01.13.13.08	008 1	6615	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 63	EKS TKD	Pembelian	1.058.400.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA

71	Tanah	01.01.13.13.08	008 2	694	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 64	EKS TKD	Pembelian	111.040.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
72	Tanah	01.01.13.13.08	008 4	2959	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	1981-12- 29	Sertifikat No. 18	EKS TKD	Pembelian	473.440.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
73	Tanah	01.01.13.13.08	008 5	1054	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2009-01- 27	Sertifikat No. 75	PERTANIAN	Pembelian	168.640.000,00	tukar menukar dgn NUR HIK
74	Tanah	01.01.13.13.08	008 6	2218	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 62	-	Pembelian	111.750.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
75	Tanah	01.01.13.13.08	008 7	6370	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-09- 28	Sertifikat No. 57	-	Pembelian	296.650.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
76	Tanah	01.01.13.13.08	008 8	1179	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 68	-	Pembelian	57.100.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
77	Tanah	01.01.13.13.08	008 9	6446	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 58	-	Pembelian	355.800.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
78	Tanah	01.01.13.13.08	009 0	9335	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 69	-	Pembelian	466.300.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
79	Tanah	01.01.13.13.08	009 1	1140	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2005-10- 13	Sertifikat No. 36	-	Pembelian	50.450.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
80	Tanah	01.01.13.13.08	009 2	13385	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2007-10- 11	Sertifikat No. 71	-	Pembelian	473.165.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
81	Tanah	01.01.13.13.08	009 3	1451	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2007-10- 11	Sertifikat No. 56	-	Pembelian	73.050.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
82	Tanah	01.01.13.13.08	009 4	1633	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-03- 10	Sertifikat No. 66	-	Pembelian	79.800.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA

83	Tanah	01.01.13.13.08	009 5	5087	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2005-10- 13	Sertifikat No. 39	-	Pembelian	246.850.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
84	Tanah	01.01.13.13.08	009 6	2350	200 3	LAWANGAN DAYA	Hak pakai	2006-08- 21	Sertifikat No. 30	-	Pembelian	119.850.000,00	LURAH LAWANGAN DAYA
TOTAL												19.039.830.000, 00	

Memperhatikan tabel diatas terlihat jelas bahwa aset pemerintah Kabupaten Pamekasan yang ada di Kecamatan Pademawu terpusat pada 2 wilayah yakni di desa Lawangan daya dan Baruramat Timur. Sementara itu ada 2 aset yang ada di jalan Jokotole dan Jalan Veteran. Menurut catatan yang ada aset yang ada sebagian besar tercatat dalam bentuk tanah meski dalam kenyataan diatas tanah telah dibangun berbagai gedung atau bangunan yang dimanfaatkan untuk kantor, sekolah, pasar, lahan pertanian dan sebagainya. Berbagai jenis aset tersebut selama ini diperoleh melalui proses pembelian dengan nominal harga yang bervariasi.

Bagi masyarakat Kecamatan Pademawu ketersediaan berbagai jenis infrastruktur publik yang merupakan aset daerah ini tentu disambut positif sebab aset milik pemerintah daerah tersebut akan dapat memfasilitasi mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi produktif, pendidikan, administrasi kependudukan bahkan dapat memberikan lapangan pekerjaan melalui sektor pertanian. Aset tanah ayng diatasnya dibangun gedung sekolah misalnya, diharapkan akan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan angka melek huruf dan tingkat partisipasi sekolah bagi masyarakat di Kecamatan Pademawu. Di samping itu melalui aset yang dimiliki pemerintah daerah akan mampu mendukung berbagai sektor terutama di sektor perekonomian dan kependudukan dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian aset milik daerah yang ada di Kecamatan Pademawu diharapkan kelak mampu berperan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan di berbagai sektor serta memberikan manfaat dan hasil guna yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10. Aset yang Dimiliki Kecamatan Waru

Di Kecamatan Waru aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pamekasan tercatat tidak terlalu banyak. Menurut catatan yang ada selama ini di Kecamatan Waru hanya ada 2 aset yakni dalam bentuk tanah yang keduanya terletak di Waru Barat. Kedua jenis aset ini telah didaftar secara sistematis sesuai dengan urutan yakni nama barang, nomor (kode barang dan register), luas tanah, tahun pengadaan, lokasi atau alamat, status tanah, penggunaan, asal usul serta besaran harga ketika melakukan pengadaan aset. Menurut catatan yang ada jenis aset yang

ada di Kecamatan Waru ada 2 tanah. Pertama tanah dengan luas 9887 meter persegi dengan tahun pengadaan 2008. Status tanah hak pakai dengan sertifikat tanggal 29-01-2008. Tanah tersebut saat ini dipergunakan untuk kantor camat dan aset tersebut diperoleh melalui proses pembelian dengan harga Rp. 1.080.000.000,-

Sementara itu aset kedua dalam bentuk tanah dengan luas 3814 meter persegi yang dibeli pada tahun 2003. Aset ini terletak di Waru Barat dengan status tanah hak pakai dan saat ini dipergunana sebagai eks pembantu bupati. Tanah ini diberli dengan harga 137.304.000,-. Dengan demikian seluruh aset yang ada di Kecamatan Waru dimiliki melalui proses pembelian dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Aset yang ada di Kecamatan Waru selama ini dipergunakan untuk kantor camat dan eks. kantor bupati yang ada di Waru.

Tabel IV.10
Aset yang Dimiliki Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (m2)	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
		KODE BARANG	REGISTER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah	01.01.13.13.08	009	987	2008	WARU BARAT	Hak pakai	2008-01-29	Sertifikat No. 14	Kantor Camat	Pembelian	1.080.000.000,00	-
2	Tanah	01.01.13.13.08	0010	384	2003	WARU BARAT	Hak pakai	2003-12-31	-	Eks. Pembantu Bupati - WARU	Pembelian	137.304.000,00	-
TOTAL												1.217.304.000,00	

Mencermati tabel diatas terlihat bahwa aset pemerintah Kabupaten Pamekasan yang ada di Kecamatan Waru tergolong sangat terbatas yakni hanya 2 aset saja yang keduanya dalam bentuk tanah. Meski hanya 2 aset tanah tetapi aset tersebut dalam proses pembelian telah dikeluarkan anggaran yang relatif cukup besar yakni sebesar Rp. 1.217.304.000,- Biaya tersebut dikeluarkan untuk pembiayaan pembelian 2 aset tanah dengan ukuran yang relatif luas yakni 9.887 meter persegi dan 3.814 meter persegi. Mengingat relatif besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk membeli aset tersebut maka sangat wajar apabila perlu adanya pengelolaan terhadap aset yang ada. Dengan kata lain bahwa aset milik daerah diharapkan dapat dimanfaatkan dan didayagunakan secara optimal dengan orientasi pada kepentingan masyarakat secara luas. Dengan mendayagunakan secara optimal aset yang ada maka akan memberikan berbagai manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat luas. Bagi pemerintah daerah optimalisasi kemanfaatan aset daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan asli daerah atau PAD. Sedangkan bagi masyarakat luas pemanfaatan aset yang produktif akan menghasilkan sumber ekonomi baru bagi masyarakat dan membuka kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Waru.

11. Aset yang Dimiliki Sekretariat Daerah

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga memiliki aset daerah yang terletak di Sekretariat Daerah. Tidak berbeda dengan SKPD dan wilayah aset yang ada di berbagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan aset daerah yang ada di sekretariat daerah seluruhnya tercatat dalam bentuk tanah. Menurut catatan yang ada sampai dengan tahun 2018 di sekretariat daerah ada sebanyak 14 aset dalam bentuk tanah dengan ukuran atau luas yang beragam. Sebagaimana terlihat pada inventarisasi pada SKPD dan kecamatan jika memperhatikan data tentang aset yang ada di sekretariat daerah di Kabupaten Pamekasan terlihat bahwa aset yang ada telah dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan yakni dengan nama barang atau aset yang dimiliki, tahun pengadaan, nomor kode barang, luas tanah, status tanah, sertifikat, tahun pengadaan, penggunaan, asal usul serta besaran harga aset. Menurut catatan yang ada jenis aset yang ada di sekretariat daerah seluruhnya berupa tanah yang

kemudian dimanfaatkan untuk berbagai jenis keperluan. Seluruh aset yang ada di sekretariat daerah dimiliki melalui proses pembelian sejak tahun 1981 sampai dengan dalam tahun 2018. Tercatat beberapa aset dibeli pada tahun 1981 antara lain; bangunan pendopo, kantor Pemda sebelah timur, monumen arek lancor, monumen garuda dan lapangan tenis. Sedangkan aset yang terakhir dibeli pada tahun 2018 adalah tanah desa Ceguk yang berlokasi di Kecamatan Tlanakan.

Selama ini aset yang ada di sekretariat daerah telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain; pendopo, kantor pemda, rumah dinas wakil bupati, rumah dinas Sekda, Stadion Cegug, Islamic Center, Monumen, Tanah untuk pemasangan tugu, gedung KONI, monumen garuda dan lapangan tenis. Dengan demikian aset daerah dalam bentuk tanah yang ada di sekretariat daerah lebih banyak dimanfaatkan untuk memfasilitasi berbagai kepentingan terkait dengan urusan pemerintahan, simbo-simbol pemerintahan seperti; monumen, fasilitas pendukung kegiatan olahraga dan bidang keagamaan dan sebagainya. Selanjutnya apabila menyimak ukuran atau luas tanah yang menjadi aset daerah dan ada di sekretariat daerah nampak cukup bervariasi mulai dari yang paling sempit dengan ukuran luas sekitar 37 meter persegi yang digunakan untuk pemasangan tugu dan yang paling luas berukuran sekitar 50.270 meter persegi yang digunakan untuk stadion. Aset daerah ini umumnya berlokasi di pusat kota Kabupaten Pamekasan tersebar di berbagai wilayah di kecamatan kota.

Diakui atau tidak berbagai aset milik pemerintah daerah yang ada di sekretariat daerah dalam bentuk pendopo, kantor pemda, rumah wakil bupati dan sekda, monumen dan fasilitas olahraga serta fasilitas keagamaan sangatlah penting tidak hanya mendukung identitas yang khas Kabupaten Pamekasan melainkan juga mendukung aktivitas pemerintahan serta meningkatkan prestasi olahraga dan peningkatan spiritualitas keagamaan bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan. Artinya bahwa aset yang ada sesungguhnya telah memberikan banyak kemanfaatan bagi bago pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu tidak dapat disangkal lagi bahwa upaya pengelolaan aset daerah yang dilakukan secara optimal merupakan sebuah keniscayaan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus mengupayakan agar seluruh aset daerah yang

memiliki fungsi sebagai komponen pendukung penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas olahraga, keagamaan dan sebagainya selalu dilakukan secara maksimal.

Tabel IV.11
Aset yang Dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR		LUA S (m2)	TAHUN PENGAD AAN	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp.)	KETERANG AN
		KODE BARANG	REGIST ER				HAK	SERTIFIKAT					
								TANGG AL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah	01.01.13.13.08	0010	25600	1981	JL PAMONG PRAJA NO 1 PAMEKASAN	Hak pakai	1981-06-29	Sertifikat No. 3	PENDOPO	Pembelian	21.750.000.000,00	BAG. UMUM
2	Tanah	01.01.13.13.08	0011	16660	1981	JL. JOKOTOLE 143	Hak pakai	1981-06-29	Sertifikat No. 11	KANTOR PEMDA TIMUR	Pembelian	11.452.000.000,00	BAG. UMUM
3	Tanah	01.01.13.13.08	0012	945	1986	JL AMIN JAKFAR PAMEKASAN	Hak pakai	1986-09-23	Sertifikat No. 26	RUMAH DINAS KETUA DPRD / eks Kec. kota	Pembelian	283.500.000,00	BAG. UMUM
4	Tanah	01.01.13.13.08	0013	16775	1989	JL KABUPATEN NO 107 PAMEKASAN	Hak pakai	1989-09-22	Sertifikat No. 19	KANTOR PEMDA BARAT	Pembelian	16.775.000.000,00	BAG. UMUM
5	Tanah	01.01.13.13.08	0014	2735	1986	JL JOKOTOLE PAMEKASAN	Hak pakai	1990-09-22	Sertifikat No. 51	RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	Pembelian	3.600.000.000,00	BAG. UMUM
6	Tanah	01.01.13.13.08	0016	522	1986	JL. AGUS SALIM	Hak pakai	1986-09-23	Sertifikat No. 21	RUMAH DINAS SEKDA	Pembelian	300.000.000,00	-
7	Tanah	01.01.13.13.08	0017	50270	2003	DESA CEGUG TLANAKAN	Hak pakai	2003-12-31	-	STADION CEGUG	Pembelian	423.700.000,00	-
8	Tanah	01.01.13.13.08	0018	17786	2017	DESA PANGLEGUR KEC. TLANAKAN	Hak pakai	2018-02-26	SERTIFIKAT NO 15	ISLAMIC CENTER	Pembelian	681.563.465,05	-

9	Tanah	01.01.13.13.08	0021	2373	198 1	JL. SLAMET RIYADI	Hak pakai	1981-12- 24	Sertifikat No. 37	MONUMEN AREK LANCOR	Pembelian	676.305.000,00	-
10	Tanah	01.01.13.13.08	0022	37	200 6	desa2 di perbatasan sampang-sumenep	Hak pakai	2006-12- 31	-	Tanah Utk Pemasangan Tugu	Pembelian	37.000.000,00	TAPEM, tiap tugu luasnya 1 M2
11	Tanah	01.01.13.13.08	0025	768	200 6	BARKOT	Hak pakai	2007-04- 11	Sertifikat No. 69	GEDUNG KONI	Pembelian	300.000.000,00	Eks. Dinas Perikanan
12	Tanah	01.01.13.13.08	0028	2373	198 1	Baruramat Kota Pamekasan	Hak pakai	1981-12- 24	Sertifikat No. 37	Monumen Garuda	Pembelian	5.932.500.000,00	-
13	Tanah	01.01.13.13.08	0029	2305	198 1	Baruramat Kota Pamekasan	Hak pakai	1981-12- 29	Sertifikat No. 35	Lapangan Tennis	Pembelian	5.762.500.000,00	-
14	Tanah	01.01.13.13.08	001535	26577	201 8	DESA CEGUK TLANAKAN	Hak pakai	2018-12- 20	-	TANAH DESA CEGUK	Pembelian	1.018.436.534,95	-
TOTAL												68.992.505.000,00	

Memperhatikan data diatas terlihat bahwa aset tanah yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pamekasan seluruhnya dengan status tanah hak pakai. Sedangkan asal usul pemilikan aset tanah ini semuanya diperoleh dari hasil pembelian dengan berbagai harga dalam kisaran antara Rp. 37.000.000,- yang digunakan untuk pembelian tanah untuk pemasangan tugu sampai dengan Rp. 21.750.000.000,- yang digunakan untuk pendopo kabupaten Pamekasan. Selajutnya dari data diatas juga terlihat bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama ini yakni sejak tahun pengadaan 1981 sampai dengan tahun 2018 untuk pembelian tanah tersebut tercatat sebesar Rp. 68.992.505.000,-. Menurut catatan yang ada juga ada beberapa aset dengan nominal pembelian relatif cukup besar seperti; aset untuk kantor pemda timur dengan biaya sebesar Rp. 11.452.000.000,- dan kantor oemda barat sebesar Rp. 16.775.000.000,- serta rumah dina bupati sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan monumen garuda sebesar Rp. 5.932.500.000,- serta lapangan tenis dengan biaya sebesar Rp. 5.762.500.000,-.

Data diatas menunjukkan bahwa aset yang dimiliki pemerintah daerah terlihat relatif besar sehingga sewajarnya apabila ke depan sangat dibutuhkan upaya pengelolaan yang dilakukan secara wajar dan profesional. Artinya bahwa aset milik daerah sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan. Aset milik daerah sudah seharusnya dapat digunakan dan didayagunakan secara maksimal untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung proses pembangunan serta memberikan pelayanan publik secara luas. Dengan mengoptimalkan peran aset yang dimiliki daerah diharapkan mampu memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, keagamaan, keolahragaan, pekerjaan, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi produktif dan sebagainya. Di samping itu optimalisasi manfaat atas aset daerah diharapkan juga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetapi justru mampu meningkatkan PAD. Melalui upaya pengelolaan dan perawatan yang profesional aset daerah yang ada justru lebih aman, terpelihara dan mencegah kemungkinan penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Satu hal yang sangat penting adalah bahwa aset daerah yang

dimanfaatkan secara optimal akan dapat menambah peluang penyerapan tenaga kerja dan akan menciptakan sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

12. Kendala dalam Upaya Perlindungan Aset Daerah (FGD)

Dalam memetakan aset-aset daerah Kabupaten Pamekasan yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), telah dilakukan diskusi terpumpung dengan beberapa OPD terkait. Adapun pihak Bappeda Kabupaten Pamekasan menyebutkan pemetaan aset yang berpotensi menghasilkan PAD ini terinspirasi oleh dibentuknya Lembaga Manajemen Aset Negara oleh pemerintah pusat sebagai solusi pengelolaan aset-aset negara. Mereka menyebutkan bahwa perlu adanya investasi yg masuk untuk mengembangkan kota atau kabupaten masing-masing sehingga pemerintah daerah harus terus mengupayakan peningkatan dana yang masuk. Oleh karena itu, dibutuhkan pula regulasi dan pedoman teknis terkait pengelolaan aset daerah.

“Jika regulasinya jelas, maka otomatis PAD akan naik. Selama ini banyak lahan yang dikuasai oleh perorangan, banyak yang menempati lahan aset daerah dan tidak membayar uang sewa sebagaimana mestinya. Ini harus kita kelola, bagaimana regulasinya.” (BAPPEDA Kabupaten Pamekasan)

Menambahkan pernyataan dari Bappeda, pihak dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa ada lembaga atau sekolah di kecamatan tertentu yang asetnya tidak bisa difungsikan untuk PAD kecuali dijual untuk peningkatan aset daerah. Selain itu, terdapat beberapa sekolah dasar yang asetnya terbengkalai.

“Aset-aset yang menganggur ini sulit kalau difungsikan, jadinya ya terbengkalai begitu saja. Karena kan.. kalau untuk disewakan tidak memungkinkan jika lokasinya di desa, seperti di Kaduara Barat, yang memungkinkan untuk disewakan ya hanya yang di perkotaan.” (Dinas Pendidikan)

Sejalan dengan Dinas Pendidikan, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan menyebutkan bahwa ada banyak tanah yang tidak digunakan oleh pemerintah yang kemudian disewakan. Namun

menurut mereka, nilai sewa lahan-lahan terbengkalai tersebut masih sangat rendah. Jika ditimbang dari sisi regulasi, dengan perubahan pengelolaan aset yang baru, hanya ada Perda No. 9 Tahun 2018 yang menjadi acuan pengelolaan aset daerah. Menurut BKAD, seharusnya ada aturan turunan lagi dari Perda tersebut yang lebih mengatur teknis pengelolaan aset termasuk biaya sewa.

“Memang masih banyak lahan yang terlantar, itu kami sewakan, tapi harga sewanya juga itu pun masih sangat murah. Sedangkan ini kan regulasinya.. dengan perubahan pengelolaan aset yang baru ini kan cuma ada Perda No. 9 tahun 2008 padahal harusnya di bawah Perda itu ada regulasi lagi seperti peraturan bupati terkait pengelolaan aset dan memasukkan aturan terkait sewa. Kalau begitu bisa lebih jelas nantinya kita ini mau mengelolanya bagaimana.” (BKAD Kabupaten Pamekasan)

Selain itu, pihak BKAD juga menambahkan bahwa banyak tanah milik pemerintah yang dimanfaatkan sebagai rumah huni. Adapun pemanfaatan lahan pemerintah sebagai rumah huni memang memiliki payung hukumnya di mana tanah yang disewakan sebagai rumah huni telah mendapatkan izin dari kelurahan.

“Sebagian tanah memang dimanfaatkan untuk rumah huni karena memang diperbolehkan ya secara hukum. Tapi sementara ini kalau urusan sewa-menyewa masih di tingkat kelurahan hingga kecamatan.” (BKAD Kabupaten Pamekasan)

Adapun terkait pengamanan aset, pihak BKAD menjelaskan bahwa SKPD harus bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan aset daerah. Pihak BKAD menyayangkan bahwa masih terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai oleh pihak ketiga (paling sering dengan perorangan). Misalnya, ada tanah bersertifikat milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh perseorangan dan diklaim sebagai hak milik pihak tersebut.

“Untuk tanah yang dikuasai kelurahan rata-rata dimanfaatkan dan dikuasai masyarakat desa. Ada juga yang disewa oleh beberapa instansi di wilayah-wilayah tertentu, seperti perusahaan dan JTV.” (BKAD Kabupaten Pamekasan)

Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pamekasan menjelaskan tanah atau lahan milik Dispora telah dimanfaatkan dengan baik. Mereka juga menyebutkan bahwa ada tanah yang akan dibangun untuk fasilitas olahraga seperti pengadaan kolam renang baru dan perbaikan kolam renang yang sudah ada, serta pembuatan lapangan tenis.

“Kita mau ada upgrading kolam renang, sama mau dibangun kolam renang juga di tanah milik Dispora. Lapangan tenis juga kita butuhkan. Jadi itu juga akan kami tambahkan.” (Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pamekasan)

Selain Dispora, perwakilan dari Kecamatan Pademawu juga turut menjelaskan potensi-potensi pemanfaatan lahan yang terdapat di beberapa desa. Akan tetapi, pihak pemerintah Kecamatan mengaku mengalami kesulitan karena sering kali terbentur berbagai penolakan dari masyarakat terkait pemanfaatan lahan. Mereka juga menambahkan bahwa dalam mengelola lahan pemerintah, terutama untuk pertanian maupun perkebunan, pemerintah perlu memerhatikan jenis tanaman yang akan ditanam.

“Jenis tanaman yang baik perlu diperhatikan ketika akan tanam pohon atau bunga, atau yang lainnya. Jadi tanaman yang ditanam perlu dikaji lagi agar bisa menyesuaikan dengan perubahan cuaca karena memang tanah di beberapa desa di Pademawu ini tidak memiliki estetika. Sehingga kemungkinan besar memang akan cocok untuk dikelola sebagai sarana pertanian.” (Pemerintah Kecamatan Pademawu)

Sementara itu, perwakilan dari Sekretariat Daerah menjabarkan bahwa terdapat tiga titik lahan milik pemerintah yang perlu diperhatikan antara lain; gedung serbaguna yang sejak tahun 2018 sudah tidak lagi dipakai karena kondisinya sudah rusak dan memerlukan rehabilitasi total sehingga tidak akan digunakan lagi untuk tahun-tahun selanjutnya; gedung Islamic Center yang pada tahun 2020 pengelolaannya akan dipindahkan secara keseluruhan kepada Dinas Penanaman Modal; ATM Bank Jatim di lingkungan Sekda yang tanahnya yang disewa dengan harga 4 juta rupiah per tahun.

Berbeda dengan dinas lainnya, pihak perwakilan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pamekasan menyebutkan bahwa Dinas Kominfo tidak memiliki aset lahan yang bisa menghasilkan PAD. Akan tetapi, Dinas Kominfo memiliki saluran radio yang menerima penyewa dari vendor saluran komunikasi namun selama ini tower saluran radio tersebut belum dimanfaatkan karena masih baru.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa kontribusi dari Dinas Perindag cukup besar terhadap PAD yang berupa persewaan toko dan persewaan lahan lainnya.

“Tahun 2014 awal sudah mengelola aset pasar yang terdiri dari 13 pasar tradisional dan 2 pertokoan. Dalam 1 tahun, jumlah sewa aset tidak kurang dari 2,5 milyar untuk PAD.” (Disperindag Kabupaten Pamekasan)

Adapun aset yang dikelola bukan hanya aset tetap. Pihak Disperindag juga mensinergiskan aset lainnya seperti aset pihak ketiga dengan aset tetap. Pihak Disperindag menyebutkan bahwa mereka sedang mengupayakan pengelolaan lahan parkir di beberapa pasar agar dapat meningkatkan PAD.

Dari pemaparan beberapa OPD tersebut, terdapat beberapa poin penting yang memerlukan perhatian terkait pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD. Pertama, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas terkait teknis pengelolaan hingga pengaturan biaya sewa. Hal ini akan memudahkan masing-masing instansi untuk mengelola aset-aset pemerintah daerah pada pos-pos tertentu sehingga dapat meningkatkan PAD. Kedua, diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu terkait upaya pemanfaatan lahan pemerintah ketika menghadapi penolakan dari masyarakat. Ketiga, pemerintah juga perlu mempertimbangkan perbaikan terhadap beberapa aset serta mensinergikan aset tetap dengan aset pihak ketiga.

Menurut BKAD, selama ini sebagian aset terlantar karena dari sisi regulasi belum ada Peraturan Bupati yang memformulasikan besaran sewa tanah maupun bangunan. Selain itu, sebagian aset juga dikuasai oleh pihak ketiga sebagai contoh ada tanah yang bersertifikat sebagai milik Pemerintah Daerah, akan tetapi ada pihak lain yang ternyata juga memiliki sertifikat atas tanah atau

bangunan yang dimaksud. Kondisi tersebut tentu saja memantik konflik antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait dan menyulitkan BPKAD dalam melakukan perlindungan aset.

Sementara disisi lain, pemanfaatan dan perlindungan aset dinilai memiliki peran strategis karena tidak hanya mampu meningkatkan PAD Kabupaten Pamekasan tetapi juga *multiplayer effect* bagi masyarakat. Menurut DISPORA dalam FGD, stadion gelora yang berskala nasional dapat dikembangkan menjadi gelanggang renang, lahan lapangan juga bisa dikembangkan sebagai lapangan tenis, kegiatan kompetisi. Dengan pengembangan tersebut, gelanggang olahraga setiap hari akan menarik minat masyarakat untuk menonton kompetisi yang dihelat, sehingga dapat menghidupkan perekonomian sekitar seperti parker, hotel maupun kuliner. Senada dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengatakan bahwa sewa loss dan lain-lain di pasar dapat memberikan kontribusi berupa penghasilan dari lahan parkir.

Selanjutnya, untuk optimalisasi pemanfaatan aset lahan dan bangunan menurut masukan beberapa pihak ada beberapa dimensi utama yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu: Pertama, adanya Parturan Bupati yang memformulasikan klasifikasi lahan dan peruntukan serta besaran sewa serta SKPD pengelola. Hal tersebut untuk memberikan acuan bagi pelaksana teknis dalam melakukan pengelolaan aset. Kedua, dalam upaya perlindungan aset daerah diperlukan anggaran khusus terutama untuk memberikan papan kepemilikan lahan, agar lahan tersebut tidak dipakai atau diakui pihak lain.. Ketiga, dalam upaya pemanfaatan dan perlindungan aset daerah juga perlu mempertimbangkan dampak social. Sebagian aset di wilayah perdesaan yang tidak memiliki nilai jual selama ini mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat desa dengan dimanfaatkannya lahan tersebut untuk lahan pertanian. Keempat, pengelolaan aset tidak hanya aset yang sifatnya tetap seperti tanah dan bangunan, tetapi perlu dikembangkan juga pengelolaan aset tidak tetap.(*)

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada dasarnya adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sejumlah lahan dan bangunan yang kini dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah bagian dari asset daerah yang jika dikelola dengan baik, niscaya akan menjadi salah satu sumber untuk menambah pendapatan daerah.

Selain melakukan pemetaan dan inventarisasi yang selalu *up to date*, salah satu langkah penting yang perlu dikembangkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini, tujuan yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset daerah antara lain: (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah; (2) Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah dan; (4) Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dari hasil kajian yang dilakukan, dapat disarankan di sini bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Lebih dari sekadar asset daerah, mengelola dan optimalisasi pengelolaan aset daerah penting dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pemanfaatan yang keliru, sekaligus menjamin akuntabilitas pengelolaan asset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun dari aspek sosial kemanfaatannya bagi masyarakat.

Di bab penutup ini, selain dipaparkan kembali sejumlah temuan pokok penelitian ini, juga dikemukakan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan asset daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.

1. Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, beberapa temuan pokok studi ini adalah sebagai berikut:

1. Aset tanah yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan memiliki status tanah hak pakai. Selama ini aset dalam bentuk tanah yang ada di BKD Kabupaten Pamekasan digunakan sebagai gedung atau kantor DPKAA, DPD Golkar, eks RSUD dan sebagainya. Aset tanah ini dilengkapi dengan sertifikat sejak tahun 1985 sampai dengan 2018. Sedangkan asal usul pemilikan aset tanah ini semuanya diperoleh dari hasil pembelian dengan berbagai harga dalam kisaran antara Rp. 64.350.500,- sampai dengan Rp. 6.540.000.000,-. Selanjutnya dari data diatas juga terlihat bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama ini yakni sejak tahun pengadaan 2003 sampai dengan 2018 untuk pembelian tanah tersebut tercatat sebesar Rp. 16.566.097.000,-.
2. Terkait dengan ukuran atau luas tanah yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran 278 meter persegi dalam bentuk tanah bangunan rumah negara sampai dengan yang paling luas yakni 32308 meter persegi dalam bentuk tanah bangunan pasar. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah bangunan ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 1980 sampai dengan 2018 yakni dalam bentuk tanah bangunan pasar Pakong. Aset yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Menurut catatan yang ada aset yang ada mayoritas dalam bentuk tanah bangunan pasar yang ada di berbagai Kecamatan di Kabupaten Pamekasan antara lain di Kecamatan Pamekasan, Pakong, Waru, Pasean, pegantenan, Polagan,

Blumbungan, Galis, Batumarmar, Larangan, Palengaan, dan Kecamatan Proppo. Aset dalam bentuk tanah bangunan pasar terlihat tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Ketersediaan aset ini sangat penting dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi produktif masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Bagi masyarakat Pamekasan keberadaan infrastruktur publik dalam bentuk pasar sangat dibutuhkan masyarakat sebagai media yang mampu memberikan fasilitas dalam menggerakkan kondisi perekonomian masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan.

3. Aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2019 tercatat hanya satu jenis aset yakni tanah dengan ukuran atau luas tanah 436 meter persegi. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 2006 yang terletak di Kelurahan Barurambat Kecamatan Kota. Menurut catatan yang ada aset tersebut memiliki status tanah hak pakai dan saat ini digunakan sebagai gedung. Aset ini dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2006 seharga Rp. 192.150.000,-. Sampai dengan tahun 2019 aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tercatat hanya berupa tanah dengan ukuran kurang dari 1000 meter persegi. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 2006 dengan status hak pakai dengan sertifikat tertanggal 03-10-2006. Lokasinya di jalan Balaikambang No 25 kelurahan Barurambat Kota. Meski selama ini aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman masih terbatas yakni hanya dalam bentuk aset tanah yang di atasnya berdiri bangunan gedung tetapi dalam praktek dinas ini terlihat dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan tugas pokok dan dan fungsi yang diemban dan mendukung program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pamekasan.
4. Aset atau kekayaan yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan digunakan untuk berbagai kepentingan antara lain kebun, kantor, bangunan, lahan pertanian dan bangunan yang

seluruhnya digunakan sebagai fasilitas dan sarana pendukung bagu tugas operasional keseharian SKPD. Bentuk aset yang dimiliki seluruhnya dalam bentuk tanah dengan ukuran luas yang beragam. Menurut catatan yang ada aset yang dimiliki dinas ini dalam bentuk tanah dengan berbagai ukuran mulai dari 1440 meter persegi sampai yang paling luas berukuran 74.670 meter persegi. Secara lokalistik berbagai tanah aset tersebut terletak di berbagai wilayah antara lain; di Kecamatan Proppo, Galis, Pakong, Pademawu dan Kecamatan Pasean. Selama ini aset dalam bentuk tanah yang ada digunakan sebagai kebun, lahan pertanian, gedung atau kantor dan sebagainya. Aset tanah ini dilengkapi dengan sertifikat sejak tahun 1971 sampai dengan 2009. Sedangkan asal usul pemilikan aset tanah ini semuanya diperoleh dari hasil pembelian dengan berbagai harga dalam kisaran antara Rp. 21.437.500,- sampai dengan Rp. 2.240.100.000,-. Selajutnya dari data di atas juga terlihat bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama ini yakni sejak tahun pengadaan 1971 sampai dengan 2009 untuk pembelian tanah tersebut tercatat sebesar Rp. 8.047.062.500,00,-.

5. Aset daerah yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagian besar dalam bentuk tanah dan gedung baik untuk kantor, gudang maupun gedung sekolah yang digunakan untuk memfasilitasi anak usia sekolah dalam menempuh pendidikan baik baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun SLTP. Aset dalam bentuk bangunan atau gedung, kantor dan sekolah SD dan SLTP tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Menurut catatan yang ada sampai tahun terakhir yakni tahun 2018 jumlah aset dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan mencapai 445 aset. Banyaknya aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan baik dalam bentuk tanah maupun kantor dan gedung sekolah sesungguhnya merefleksikan perhatian pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Pamekasan. Di samping itu banyaknya fasilitas pendidikan formal baik di tingkat SD maupun SLTP di Kabupaten Pamekasan merupakan perwujudan

implementasi atas amanah sesuai Undang-Undang Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Beberapa aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan baik dalam bentuk tanah maupun bangunan belum seluruhnya teridentifikasi terkait ukuran atau luas lahan yang ada. Aset daerah berupa tanah yang ada di Kecamatan Proppo, Larangan, Desa Sumber waru dan sebagainya terlihat masih belum diketahui ukuran luas lahannya. Di samping itu beberapa aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan juga belum teridentifikasi penggunaannya. Selanjutnya apabila memperhatikan tahun pengadaan nampak belum seluruhnya terdata secara lengkap. Kondisi yang hampir sama terlihat dalam soal status lahan khususnya menyangkut nomor sertifikat. Berbagai jenis aset yang dimiliki Dinas Pendidikan umumnya diperoleh dari pembelian dengan besaran harga yang sangat bervariasi. Dari berbagai jenis aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan menurut catatan yang ada terlihat bahwa aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dilakukan pengadaan sejak tahun 1981 sampai dengan 2017 yakni dalam bentuk tanah yang di atasnya berdiri bangunan atau gedung sekolah. Sampai saat ini aset yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam bentuk gedung sekolah baik di tingkat SD maupun SLTP tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Artinya di hampir seluruh desa dan wilayah kecamatan di kabupaten Pamekasan telah dilengkapi dengan gedung sekolah untuk tempat anak-anak usia sekolah menempuh pendidikan formal.

6. Aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2019 tercatat hanya 2 (dua) jenis aset yakni tanah bangunan rumah negara golongan I dan satu lahan tanah bangunan untuk kantor pemerintah. Aset pertama yakni tanah bangunan rumah dengan ukuran atau luas tanah 200 meter persegi dan aset kedua yakni tanah bangunan kantor pemerintah dengan luas lahan 2.053 meter persegi. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah bangunan rumah ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 2003 terletak di jalan Raya Pademawu dan tanah bangunan kantor sejak tahun 2008 terletak di jalan

Jokotole Kecamatan Kota. Menurut catatan yang ada aset tersebut memiliki status tanah hak pakai. Aset berupa tanah bangunan untuk rumah dinas dibeli Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2008 seharga Rp. 70.000.000,- dan tanah bangunan untuk kantor seharga Rp. 1.642.400.000,- Sampai dengan tahun 2019 aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tercatat hanya berupa tanah bangunan baik yang tersedia untuk rumah dinas maupun bangunan kantor yang merupakan bekas kantor perhubungan. Aset yang dimiliki dalam bentuk tanah ini dimiliki pemerintah daerah sejak tahun 2003 dengan status hak pakai dengan sertifikat tertanggal 31-12-2003. Lokasinya di jalan Jokotole.

7. Aset dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki ukuran atau luas tanah yang relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran 523 meter persegi dalam bentuk tanah sampai dengan yang paling luas yakni 8345 meter persegi yang digunakan untuk pemandian. Aset tanah dengan luas 523 meter persegi dimanfaatkan untuk sarana stadion olahraga. Menurut data yang ada aset yang dimiliki dinas ini beragam sejak tahun 1981 sampai dengan 2018 yakni dalam bentuk tanah yang digunakan untuk stadion dan terletak di kecamatan Tlanakan. Apabila memperhatikan persebaran aset yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga ternyata sebagian besar terdapat di Kecamatan Tlanakan. Menurut catatan yang ada aset yang ada mayoritas dalam bentuk tanah bangunan sport center ada di Ceguk Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Meski demikian terdapat satu aset dalam bentuk pemandian yang ada di Kecamatan Larangan dan sport center yang ada di Kecamatan Pademawu. Bagi masyarakat di Kabupaten Pamekasan aset dalam bentuk sport center dan stadion serta fasilitas olahraga sangat penting dalam rangka mendukung aktivitas kepemudaan dan olahraga serta meningkatkan prestasi olahraga. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ukuran atau luas tanah yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran 523 meter persegi dalam bentuk tanah untuk

sarana stadion olahraga sampai dengan yang paling luas yakni 8345 meter persegi dalam bentuk tanah bangunan pemandian. Selanjutnya dari data diatas juga terlihat bahwa aset tanah yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pamekasan seluruhnya memiliki status tanah hak pakai. Selama ini aset dalam bentuk tanah yang ada digunakan sebagai pemandian, kantor, sport center atau gedung olahraga, dan stadion olahraga. Aset tanah ini dilengkapi dengan sertifikat sejak tahun 1981 sampai dengan 2018. Sedangkan asal usul pemilikan aset tanah ini semuanya diperoleh dari hasil pembelian dengan berbagai harga dalam kisaran antara Rp. 49.445.000,- sampai dengan Rp. 893.328.000,-. Selajutnya dari data diatas juga terlihat bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama ini yakni sejak tahun pengadaan 1981 sampai dengan 2018 untuk pembelian tanah tersebut tercatat sebesar Rp. 4.813.200.600,00,-.

8. Menurut catatan yang ada jenis aset yang ada di Kecamatan Pamekasan seluruhnya atau sebanyak 266 berupa tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai jenis keperluan. Seluruh aset yang ada di Kecamatan Pamekasan dimiliki melalui proses pembelian dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2011. Aset yang ada di Kecamatan Pamekasan selama ini dipergunakan untuk berbagai keperluan antar alain; untuk kantor kecamatan, lahan pertanian, makam umum, kantor kelurahan atau desa, gedung sekolah TK, pasar dan sebagainya. Selanjutnya jika memperhatikan ukuran atau luas tanah yang ada di Kecamatan Pamekasan nampak relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran kurang dari 300 meter persegi dalam bentuk tanah dan bangunan sampai dengan yang paling luas yakni lebih dari 11 ribu meter persegi. Aset yang ada di Kecamatan ini letaknya tersebar di berbagai kelurahan dan desa yang difungsikan dalam berbagai bentuk baik untuk kantor, gedung sekolah, pasar dan sebagainya. Selain telah diberikan kode barang dan register, tahun pengadaan, luas serta letak atau alamat aset berada menurut data yang ada aset yang ada juga telah dicantumkan status tanah terkait

dengan tanggal dan nomor sertifikat. Di samping itu penggunaan dan asal usul serta harga aset yang dimiliki juga telah dicantumkan.

9. Menurut catatan yang ada sampai dengan tahun 2018 di kecamatan Pademawu ada sebanyak 84 aset dalam bentuk tanah. Tidak jauh berbeda dengan kecamatan lain apabila memperhatikan data tentang aset yang ada di Kecamatan Pademawu terlihat bahwa aset yang ada telah dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan yakni dengan nama barang atau aset yang dimiliki, tahun pengadaan, nomor kode barang, luas tanah, status kepemilikan, tahun pengadaan, penggunaan, asal usul serta besaran harga ketika melakukan pengadaan aset. Menurut catatan yang ada jenis aset yang ada di Kecamatan Pademawu seluruhnya berupa tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai jenis keperluan. Seluruh aset yang ada di Kecamatan Pademawu dimiliki melalui proses pembelian dalam tahun 2003. Selama ini aset yang ada di Kecamatan Pademawu telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain; sebagai lokasi kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, gedung TK, lahan pertanian, pasar dan sebagainya. Selanjutnya apabila menyimak ukuran atau luas tanah yang ada di Kecamatan Pademawu nampak relatif beragam mulai dari yang paling sempit dengan ukuran luas sekitar 524 meter persegi dan yang paling luas berukuran sekitar 31.111 meter persegi. Aset yang ada di Kecamatan ini letaknya tersebar di berbagai kelurahan dan desa yang difungsikan dalam berbagai bentuk baik untuk kantor, gedung sekolah, pasar dan sebagainya. Selain telah diberikan kode barang dan register, tahun pengadaan, luas serta letak atau alamat aset berada menurut data yang ada aset yang ada juga telah dicantumkan status tanah terkait dengan tanggal dan nomor sertifikat. Di samping itu penggunaan dan asal usul serta harga aset yang dimiliki juga telah dicantumkan. Relatif banyaknya aset milik pemerintah daerah yang ada di Kecamatan Pademawu selama ini telah mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang ada di Kecamatan Pademawu.
10. Di Kecamatan Waru aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pamekasan tercatat tidak terlalu banyak. Menurut catatan yang ada selama ini di

Kecamatan Waru hanya ada 2 aset yakni dalam bentuk tanah yang keduanya terletak di Waru Barat. Kedua jenis aset ini telah didaftar secara sistematis sesuai dengan urutan yakni nama barang, nomor (kode barang dan register), luas tanah, tahun pengadaan, lokasi atau alamat, status tanah, penggunaan, asal usul serta besaran harga ketika melakukan pengadaan aset. Menurut catatan yang ada jenis aset yang ada di Kecamatan Waru ada 2 tanah. Pertama tanah dengan luas 9887 meter persegi dengan tahun pengadaan 2008. Status tanah hak pakai dengan sertifikat tanggal 29-01-2008. Tanah tersebut saat ini dipergunakan untuk kantor camat dan aset tersebut diperoleh melalui proses pembelian dengan harga Rp. 1.080.000.000,- Sementara itu aset kedua dalam bentuk tanah dengan luas 3814 meter persegi yang dibeli pada tahun 2003. Aset ini terletak di Waru Barat dengan status tanah hak pakai dan saat ini dipergunakan sebagai eks pembantu bupati. Tanah ini diberli dengan harga 137.304.000,-. Dengan demikian seluruh aset yang ada di Kecamatan Waru dimiliki melalui proses pembelian dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Aset yang ada di Kecamatan Waru selama ini dipergunakan untuk kantor camat dan eks. kantor bupati yang ada di Waru.

11. Tidak berbeda dengan SKPD dan wilayah aset yang ada di berbagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan aset daerah yang ada di sekretariat daerah seluruhnya tercatat dalam bentuk tanah. Menurut catatan yang ada sampai dengan tahun 2018 di sekretariat daerah ada sebanyak 14 aset dalam bentuk tanah dengan ukuran atau luas yang beragam. Sebagaimana terlihat pada inventarisasi pada SKPD dan kecamatan jika memperhatikan data tentang aset yang ada di sekretariat daerah di Kabupaten Pamekasan terlihat bahwa aset yang ada telah dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan yakni dengan nama barang atau aset yang dimiliki, tahun pengadaan, nomor kode barang, luas tanah, status tanah, sertifikat, tahun pengadaan, penggunaan, asal usul serta besaran harga aset. Menurut catatan yang ada jenis aset yang ada di sekretariat daerah seluruhnya berupa tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai jenis keperluan. Seluruh aset yang ada di sekretariat daerah dimiliki melalui proses

pembelian sejak tahun 1981 sampai dengan dalam tahun 2018. Tercatat beberapa aset dibeli pada tahun 1981 antara lain; bangunan pendopo, kantor Pemda sebelah timur, monumen arek lancor, monumen garuda dan lapangan tenis. Sedangkan aset yang terakhir dibeli pada tahun 2018 adalah tanah desa Ceguk yang berlokasi di Kecamatan Tlanakan. Aset tanah yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Pamekasan seluruhnya dengan status tanah hak pakai. Sedangkan asal usul pemilikan aset tanah ini semuanya diperoleh dari hasil pembelian dengan berbagai harga dalam kisaran antara Rp. 37.000.000,- yang digunakan untuk pembelian tanah untuk pemasangan tugu sampai dengan Rp. 21.750.000.000,- yang digunakan untuk pendopo kabupaten Pamekasan. Selanjutnya dari data diatas juga terlihat bahwa alokasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama ini yakni sejak tahun pengadaan 1981 sampai dengan tahun 2018 untuk pembelian tanah tersebut tercatat sebesar Rp. 68.992.505.000,-. Menurut catatan yang ada juga ada beberapa aset dengan nominal pembelian relatif cukup besar seperti; aset untuk kantor pemda timur dengan biaya sebesar Rp. 11.452.000.000,- dan kantor oemda barat sebesar Rp. 16.775.000.000,- serta rumah dinas bupati sebesar Rp. 3.600.000.000,- dan monumen garuda sebesar Rp. 5.932.500.000,- serta lapangan tenis dengan biaya sebesar Rp. 5.762.500.000,-.

2. Saran

Secara teoritis, strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah paling-tidak meliputi: (1) Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; (2) Adanya sistem informasi manajemen aset daerah; (3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan asset; dan (4) Pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan *appraisal* (penilai).

Dalam laporan ini telah dilakukan proses identifikasi dan inventarisasi asset daerah yang dimiliki Kabupaten Pamekasan. Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah bagaimana memastikan asset daerah yang dimiliki Kabupaten Pamekasan dapat dikelola dengan baik, dan mampu menjadi tambahan

sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi adalah:

1. Berbagai asset daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Peran penting masyarakat dan DPRD di sini sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut pendistribusian, pengamanan dan perawatan. Untuk itu diperlukan adanya unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan kewenangan dalam pengelolaan kekayaan daerah. Begitu pula dalam hal pengamanan terhadap kekayaan daerah, harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem pengendalian interen.
2. Dalam pengelolaan asset daerah, akuntabilitas perlu dikedepankan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah. Pengelolaan asset daerah harus dilakukan dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan asset daerah, sejak awal perlu dipastikan agar tidak terjadi berbagai praktik atau tindakan yang menyimpang, seperti melakukan *mark up* kontrak, maupun pada saat menetapkan mitra kerjasama dalam pengelolaan asset daerah. Untuk memastikan agar tidak terjadi praktik yang kontra-produktif dalam pengelolaan asset daerah, diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan terhadap DPRD dan tentunya masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan ataupun pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan serta sampai kepada tahap penghapusan asset daerah.

3. Dalam proses pengelolaan dan untuk memastikan kelangsungan manfaat asset daerah, pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, pemanfaatan sampai pada tahap penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan pengelolaan asset daerah sangat penting dilakukan untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku. Selain itu pula, auditor internal juga sangat penting keterlibatannya untuk melakukan penilaian kebijakan akuntansi yang diterapkan, menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*) dan penilaiannya (*evaluation*). Pengawasan tujuannya untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah. Sistem dan teknik pengawasan terhadap pengelolaan asset daerah di Kabupaten Pamekasan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat, LSM dan NGO mudah mendeteksi terhadap kemungkinan adanya oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan asset milik daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bryant, Coralie & Louise G. White, 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.

Benveniste, Guy., 1989. *Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Budiman, Arief & Ph. Quarles van Ufford (Editor), 1988. *Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan: Birokrasi-Birokrasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Chaniago, Adrinof A., 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Conway, F., Kaganova, O., & McKellar, J. (2006). A “Composite Image” of Central Government Asset Management Reforms. *Managing government property assets: International experiences*, 125.

Esman, Milton J., 1991. *Management Demensions of Development Perspectives and Strategies*. Oakwood, Conecticut: Kumarian Press.

Hanis, M. H., Trigunarsyah, B., & Susilawati, C. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government: A case study in South Sulawesi province. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), 36-47.

Kaganova, O., & McKellar, J. (2006). *Managing Government Property Assets: International Experiences: The Urban Insitute*.

Kaganova, O., & Nayyar-Stone, R. (2000). Municipal real property asset management: An overview of world experience, trends and financial implications. *Journal of Real Estate Portfolio Management*, 6(4), 307-326. Retrieved from ProQuest Central.

Mardiasmo, D. (2012). *State asset management reform in Indonesia : a wicked problem* Dissertation/Thesis. Queensland University of Technology.

Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sampford, C. (2012). *Why stagnant? behind the scenes in Indonesia’s reformed state asset management policies*.

Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soegijoko, Budhy Tjahjati S dan BS Kusbiantoro, 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Setiono, Budi, 2002. *Jaring Birokrasi, Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*. Bekasi: Gugus Press.

Widodo, Joko, 2001. *Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.